

LAPORAN AKHIR

**PENELITIAN DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN
TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN/PEMBUDIDAYA
DI KABUPATEN BINTAN
T.A 2018**



KERJASAMA ANTARA:
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)
Kabupaten Bintan
Dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
STISIPOL Raja Haji

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, publikasi kajian dampak pemberian bantuan terhadap pendapatan nelayan/pembudidaya di Kabupaten Bintan ini telah selesai disusun. Penerbitan laporan ini selesai disusun tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Bintan, Dinas/Instansi terkait, penerima bantuan serta tokoh masyarakat yang telah memberikan dukungan informasi yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STSIPOL Raja Haji Tanjungpinang. Upaya peningkatan pembangunan pada sektor perikanan ini tetap dilakukan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mencapai Bintan Gemilang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya sehingga bisa mencapai kehidupan yang dapat memenuhi standar hidup dan kualitas hidup masyarakat nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Bintan.

Dengan diterbitkannya kajian dampak pemberian bantuan terhadap pendapatan nelayan/pembudidaya di Kabupaten Bintan ini hendaknya dapat membantu para pengambil keputusan (*decision maker*) untuk menentukan arah kebijakn dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya berdasarkan penyusunan langkah dengan cara dan metode yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. saran dan kritik dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dimasa mendatang sangatlah diharapkan. Atas bantuan dari semua pihak dalam peneribitan ini diucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, November 2018
KEPALA,

Drs. Wan Rudy Iskandar, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	11
1.3 RUMUSAN MASALAH.....	11
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.5 SASARAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
2.1 KEBIJAKAN PUBLIK.....	13
2.2 PROSES KEBIJAKAN.....	16
2.3 EVALUASI KEBIJAKAN DAN EVALUASI PROGRAM	21
2.3.1 Evaluasi Context.....	22
2.3.2 Evaluasi Input	23
2.3.3 Evaluasi Proses (<i>Process Evaluation</i>)	24
2.3.4 Evaluasi Produk (<i>Product Evaluation</i>).....	26
2.3.5 Implikasi Hasil Evaluasi Terhadap Program atau Kebijakan.....	27
2.4 KONSEP PEMBANGUNAN	28
2.4.1 Kesejahteraan Sosial.....	29
2.4.2 Pelaku-Pelaku Pembangunan	30
2.5 KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	35
2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	35
2.5.2 Penerima Manfaat.....	39
2.6 DISAIN PENELITIAN DALAM PENELITIAN EVALUASI.....	48
2.7 KONSEP PERIKANAN	49
2.7.1 Definisi Perikanan	49
2.8 KONSEP NELAYAN.....	51
2.9 KONSEP PEMBUDIDAYA	56

2.9.1	Definisi Pembudidaya Ikan.....	56
2.9.2	Menjalinkan kerja sama.....	57
BAB III METODE DAN PELAKSANAAN PENELITIAN		59
3.1	METODE PENELITIAN	59
3.1.1	JENIS PENELITIAN	59
3.1.2	LOKASI PENELITIAN.....	59
3.1.3	JENIS DAN SUMBER DATA	59
3.1.4	TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA	60
3.1.5	POPULASI DAN SAMPEL / INFORMAN PENELITIAN.....	61
3.1.6	TEKNIK ANALISIS DATA.....	62
3.2	JADUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	63
3.3	TENAGA AHLI	64
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		65
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bintan	65
4.2	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan.....	67
4.2.1	Kepala Dinas	69
4.2.2	Sekretaris	70
4.2.3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	71
4.2.4	Kepala Bidang Perikanan Budidaya.....	71
4.2.5	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan.....	75
4.2.6	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	81
4.2.7	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85
4.3	Kawasan Minapolitan.....	89
4.3.1	Kecamatan Bintan Pesisir	89
4.3.2	Bintan Timur.....	93
4.3.3	Kecamatan Mantang.....	99
4.4	Peningkatan Stok Perikanan, Capaian dan Target Volume Produksi	106
4.4.1	Peningkatan Stok Perikanan, Capaian dan Target Volume Produksi di Perairan Indonesia.....	106
4.4.2	Peningkatan Capaian dan Target Volume Produksi di Kabupaten Bintan	110
4.5	Sub-Sektor Perikanan (NTP-Pi) Provinsi Kepulauan Riau	114
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		116
5.1	Karakteristik Informan	116
5.1.1	Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan.....	117

5.1.2	Karakteristik Informan Berdasarkan Masa Kerja.....	119
5.1.3	Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Utama	120
5.1.4	Karakteristik Informan Berdasarkan Kategori Nelayan.....	122
5.1.5	Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Sampingan	124
5.2	Melakukan identifikasi terhadap kondisi eksisting metode pemberian bantuan kepada nelayan di Kabupaten Bintan.....	125
5.2.1	Regulasi Pemberian Bantuan.....	125
5.2.2	SOP.....	125
5.2.3	Pengusulan	126
5.2.4	Penyaluran.....	128
5.2.5	Pemeliharaan Pendampingan	128
5.3	Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada di lapangan terkait pemberian bantuan.	129
5.3.1	Masalah Data Penerima Bantuan.....	129
5.3.2	Masalah Ketepatan Sasaran (Penerima Bukan Orang yang Tepat)	130
5.3.3	Masalah Ketidaksesuaian Barang yang Diterima.....	131
5.3.4	Mekaisme Pengusulan.....	131
5.4	Melakukan identifikasi terhadap metode pembinaan pasca pemberian bantuan nelayan.....	134
5.4.1	Belum ada prosedur sistematis.....	135
5.4.2	Belum ada koordinasi yang jelas antar satuan tugas yang ada dilapangan terhadap pembinaan kepada penerima bantuan.....	137
5.5	Melakukan identifikasi terhadap dampak pemberian bantuan Terhadap pendapatan nelayan/pembudidaya di Kabupaten Bintan.	139
5.5.1	Bantuan Perikanan Tangkap	139
5.5.2	Bantuan budidaya Perikanan	148
5.6	Mengidentifikasi jenis bantuan yang memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan nelayan.	156
5.6.1	Perikanan Tangkap	158
5.6.2	Pembudidaya.....	167
BAB VI KONKLUSI, REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.....		173
6.1	Konklusi kajian	173
6.2	Rekomendasi Langkah-Langkah.....	174
6.2.1	Sektor Perikanan Tangkap.....	174
6.2.2	Sektor Perikanan Budidaya.....	175

6.3 Rekomendasi Kebijakan	176
DAFTAR PUSTAKA.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2014	7
Tabel 1 2 Data Pembudidya Perikanan Penerima Bantuan di Kab. Bintan Tahun 2013 -2017 Melalui Dana APBD	9
Tabel 1 3 Data Nelayan Tangkap Penerima Bantuan Di Kab. Bintan Tahun 2013 - 2017 Melalui Dana APBD.....	10
Tabel 1 4 Sumber dan jenis bantuan nelayan di Kabupaten Bintan tahun 2017	10
Tabel 2 1 Penggolongan Nelayan Berdasarkan Karakteristik Usaha	55
Tabel 3 1 Populasi dan Sampel.....	61
Tabel 3 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	63

DAFTAR GRAFIK

Garfik 5 1 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan.....	117
Garfik 5 2 Karakteristik Informan Berdasarkan Masa Kerja.....	119
Garfik 5 3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Utama	120
Garfik 5 4 Karakteristik Informan Berdasarkan Kategori Nelayan.....	122
Garfik 5 5 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Sampingan	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 The Policy Cycle (<i>A problem For Government</i>).....	16
Gambar 2 2 Karakteristik Program Pemberdayaan.....	40
Gambar 4 1 Peta Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	67
Gambar 4 2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabuoaten Bintan.....	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan sektor perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Nelayan merupakan suatu masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utamanya adalah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di perairan pesisir dan laut. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan nelayan dari masyarakat lain, yaitu karakteristik yang terbentuk dari kehidupan di laut yang sangat keras dan penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam berupa cuaca. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas usaha yang dijalankan sangat berfluktuasi dengan tingkat ketidakpastian hasil produksi yang sangat tinggi.

Nelayan mempunyai peran yang sangat substansial dalam memajukan kehidupan manusia, khususnya dalam hal pemenuhan sumberdaya perikanan oleh segenap lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan asupan protein hewani. Namun faktanya tingkat kesejahteraan nelayan relatif tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi pada sektor lain. Ini menunjukkan bahwa sektor ini memerlukan uluran/campur tangan pemegang kebijakan baik dalam bentuk fasilitas ekonomi maupun regulasi sehingga nelayan dapat terus melakukan kegiatan usahanya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. Seperti juga masyarakat yang

lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, (2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Anggi, 2016).

Masalah di atas disebabkan oleh hubungan-hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumberdaya lingkungan, dan belum adanya ketegasan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi ke sektor maritim. Namun demikian, berbagai upaya pembangunan untuk mengatasi masalah kemiskinan harus bertumpu pada basis kemampuan masyarakat yang terkena kemiskinan tersebut. Pada dasarnya, setiap golongan masyarakat, termasuk masyarakat miskin masih memiliki potensi sumber daya sosial yang bisa didayagunakan untuk mengatasi kemiskinan. Sumber daya sosial atau kapital sosial tersebut di antaranya berupa sistem nilai, norma-norma perilaku, etika sosial, institusi budaya, jaringan sosial, kepercayaan lokal, gotong royong, dan saling percaya yang telah bertahan dan terbukti mampu menjaga integrasi masyarakat.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup nelayan, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan wilayah pesisir yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah berakar dalam masyarakat nelayan.

Kabupaten Bintan yang memiliki luas wilayah 74.200,94 km², terdiri atas wilayah daratan seluas 2.418,79 km² (3.26 %) dan wilayah laut seluas 71.782,15 km² (96,74 %), dengan jumlah pulau ± 240 buah menunjukkan bahwa garis pantainya relatif panjang sekaligus memberikan gambaran bahwa secara umum kawasan pesisirnya juga luas. Usaha perikanan yang dilakukan di daerah pesisir ada 2 jenis yaitu usaha perikanan tangkap di laut dan usaha budidaya ikan di kolam dan laut. Masyarakat nelayan Kabupaten Bintan memiliki ketergantungan (*dependensi*) yang sangat tinggi terhadap kondisi pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan pesisir dan laut. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir melalui berbagai usaha penangkapan tentulah tidak terlepas dari fenomena terjadinya pemanfaatan sumber daya perikanan yang eksploitatif semata-mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya, sehingga berakibat kelebihan tangkap (*over fishing*), terancamnya stabilitas sumberdaya perikanan dan inefisiensi pemanfaatan sumberdaya. Selain

problema yang berasal dari intervensi manusia, kondisi cuaca yang tidak menentu dan tingginya resiko serta ketidakpastian produksi sebagai akibat dari sifat sumberdaya perikanan laut yang “*open access*” menjadi ancaman tersendiri bagi produktivitas usaha dan keselamatan nelayan.

Selain itu bisa jadi masyarakat nelayan di Kabupaten Bintan masih menghadapi berbagai kendala (*constraint*) klasik lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan (*sustainability*) usahanya seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan penguasaan modal dan akses informasi usaha, rendahnya adopsi tingkat teknologi yang digunakan, sehingga pemanfaatan sumberdaya belum optimal untuk mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Secara umum permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan terkait dengan belum tercapainya pengelolaan potensi sumber daya pembangunan secara optimal.

Kusnadi (2007:3) mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap belum tercapainya pengelolaan potensi sumber daya pembangunan secara optimal adalah : (1) terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, fasilitas ekonomi perikanan, dan fasilitas umum-sosial, (2) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), masyarakat belum memiliki kemampuan maksimal untuk mengelolanya demi meningkatkan kesejahteraan sosial mereka, (3) teknologi penangkapan yang terbatas kapasitasnya, (4) akses modal dan pasar produk ekonomi lokal yang terbatas, (5) tidak adanya kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjadi instrumen pembangunan masyarakat, dan (6) belum adanya komitmen pembangunan kawasan pesisir secara terpadu.

Sementara itu, Muhammad Karim (2016) dalam penelitiannya terkait Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2011 di Kabupaten Sukabumi menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : (1) problem kebijakan dan implementasi pedoman PUMP Perikanan Tangkap kepada masyarakat nelayan di Sukabumi adalah administrasi pencairan bantuan langsung program kurang sesuai dengan kondisi alamiah yang dialami nelayan, (2) dampak bantuan langsung program terhadap nelayan dan buruh nelayan adalah nelayan yang sudah memiliki aset sarana produksi perikanan akan mendapatkan tambahan aset baru. Sementara buruh nelayan mendapatkan aset sarana produksi perikanan yang semula belum memilikinya dan (3) merevisi petunjuk teknis program penyaluran bantuan langsung dengan dibuat lebih sederhana dan fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga faktor produksi di pasaran serta mengatasi problem *time-line* waktu pencairannya.

Disisi lain, Arnawa *et.al* (2016) dari hasil penelitiannya di Kabupaten Gianyar, Bali, mendapatkan bahwa dampak dari pemberian bantuan sarana perikanan tangkap tidak memperlihatkan perbedaan peningkatan penghasilan yang signifikan antara nelayan yang mendapatkan bantuan dengan nelayan yang tidak mendapatkan bantuan. Dimana rata-rata pendapatan nelayan yang memperoleh bantuan Rp 6.469.736,20/bulan dan rata-rata pendapatan nelayan yang tidak mendapatkan bantuan Rp 6.304.018,60/bulan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan adalah jenis perahu dan jumlah biaya yang dikeluarkan nelayan.

Namun demikian, selain kegagalan atau kurang efektifnya dampak bantuan terhadap peningkatan nelayan sebagaimana diungkapkan di atas, terdapat juga bantuan-bantuan ataupun program peningkatan penghasilan nelayan berhasil. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggi (2016) melalui hasil penelitiannya yang berjudul Efektivitas dan Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau di Pulau Pasaran, Teluk Betung, Bandar Lampung, menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap masyarakat nelayan kerang hijau cukup efektif. Artinya bahwa program tersebut berhasil menaikkan pendapatan nelayan kerang hijau, walaupun pada kenyataannya masih ditemukan nelayan di Pulau Pasaran yang minim pengetahuan dan pemahaman tentang program pemberdayaan tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa bantuan yang diberikan terhadap nelayan ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Berdampak positif dalam artian bantuan tersebut mampu meningkatkan penghasilan nelayan, sedangkan berdampak negatif menunjukkan bahwa bantuan tersebut belum atau tidak berhasil meningkatkan penghasilan nelayan. Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Nurfakhrana, 2016). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kabupaten Bintan

Mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan sudah dilakukan sejak lama dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Adapun yang termasuk kawasan minapolitan di Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan Bintan timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang. Hal ini mengacu pada Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 377/VIII/2010 dan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 245/V/2009.

Tabel 1.1 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2016

No	Tahun Produksi	Hasil Produksi Tangkap (Ton)		Jumlah Rumah Tangga Perikanan
		Volume	Nilai (Rp)	
1	2012	41.228,00	618.420.000.000	-
2	2013	49.339,00	740.088.000.000	-
3	2014	50.289,00	754.338.000.000	12.926
4	2015	52.469,25	770.000.000.000	12.585
5	2016	50.022,21	956.900.000.000	11.669

Sumber: RPJMD 2016-2021, BPS 2016, BPS 2017

Adapun ancaman dalam upaya meningkatkan produksi perikanan disebabkan oleh perilaku masyarakat nelayan itu sendiri dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah untuk keberlanjutan ekosistem laut seperti bom, racun, trawl. Aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah terhadap lingkungan alam tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan karang-karang dan mematikan karang-karang sehingga menyebabkan punahnya keberlangsungan ekosistem laut. Hal ini lambat laun akan berdampak pada produksi tangkap

ikan bagi nelayan. Selain itu, pencurian ikan oleh kapal asing juga turut mengancam produksi tangkap ikan nelayan di Kabupaten Bintan. Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap dan dari hasil budidaya, pemerintah kab. Bintan terus menerus melakukan pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberi bantuan berupa peralatan tangkap atau sarana tangkap kepada nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan baik tawar maupun di laut. Berikut ini adalah data bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah kab. Bintan kepada nelayan maupun pembudidaya ikan selama lima tahun terakhir.

Tabel 1 2 Data Pembudidya Perikanan Penerima Bantuan di Kab. Bintan Tahun 2013 -2017 Melalui Dana APBD

DATA PENERIMA BANTUAN BUDAYA PERIKANAN TAHUN 2013 S.D 2017 APBD KAB. BINTAN									
Kecamatan	Desa/Kel	Nama Kelompok / Penerima	Jenis Bantuan	Penerima					Total Penerima
				2013	2014	2015	2016	2017	
Bintan Pesisir	Air Gelubi	KERAPU JAYA	Keramba Jaring Apung					2	2
	Air Gelubi	KERISI	Keramba Jaring Apung					4	4
	Kelong	KELONG BARU	Bibit Ikan Kerapu		5				5
	Kelong	OCTOPUS	Bibit Ikan Kerapu		5				5
	Kelong	LOLIGO	Bibit Ikan Kerapu		5				5
Mantang	Mantang Baru	TIONG MAS	Bibit Ikan Kerapu		5				5
	Mantang Baru	MITRA MANDIRI	Bibit Ikan Kerapu		5				5
Bintan Timur	Kel. Sei Lekop	MUTIARA	Bibit Ikan Lele		6				6
	Kel. Sei Nam	MEKAR SARI	Bibit Ikan Lele		10				10
	Kel. Sei Lekop	BUDIDAYA IKAN	Bibit Ikan Lele		5				5
	Sungai Nam	RAZALI	Tidak ada data			1			1
	Kijang Kota	JAMIAN	Tidak ada data			1			1
	Kijang Kota	ANTON	Tidak ada data			1			1
	Kijang Kota	A. FAHRID	Tidak ada data			1			1
	Kel. Sei Nam	SUNARIO	Tidak ada data			1			1
	G. Lengkuas	YANTO	Tidak ada data			1			1
	G. Lengkuas	ZULPAN	30 Paket calon induk nila gesit (1 paket = 1 ekor jantan dan 3 ekor induk)			1			3
	G. Lengkuas	HENDRIK	40 Paket calon induk nila gesit (1 paket = 1 ekor jantan dan 3 ekor induk)			1			1
	G. Lengkuas	SAFRUDIN	40 Paket calon induk nila gesit (1 paket = 1 ekor jantan dan 3 ekor induk)			1			1
	G. Lengkuas	KARYA MANDIRI SEJATI	Spesifikasi tabung oksigen tinggi K/L== 140 cm, selinder= 28 cm, tekanan=150 kg =2000 ps,			5			5
Kp. Lengkuas	POKDAKAN GRIYA INDO	50.000 benih ikan lele, 100 kg pakan ikan (pelet) FF 999,3 400 kg, pakan ikan (pelet) 781.2 30 kg, Jaring PE (PE net) 5 rol, waring hitam (jaring waring) 3 roll, tali PE 3 mm 10 roll, benang ikat / nylon Twne 15 meter,					6	6	
Jl. Nusantara	MELATI SUMBER REZEKI	26.000 ekor benih ikan lele, 25.000 benih ikan nila, 220 kg pakan ikan (pelet) FF 999 3.400 pakan ika (pelet) 781-2, 720 kg, paka ikan (pelet) 782, 3 roll waring hitam (jaring waring), 4 roll tali PE 3 mm, 6 roll benang ikat nylon					10	10	
Kp. Nosari Barat	SUMBER MAKMUR	5.000 ekor benig ikan lele, 1 paket calon induk ikan lele, 2o kg pakan ikan (pelet) FF999, 330 kg pakan ikan (pelet) 781-2, 200 kg pakan ikan (pelet) 782, 1 roll shading net / argonet / paranet 70%, 18 buah terpal ukuran (4x6m), 1 gulung selang (benang) 1", 1 gulung selang benang 1 1/2", 15 meter selang (kawat) 2", 20 batang pipa					5	5	
Barat RT 004	KERAPU JAYA	sda					4	4	
TOTAL								91	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan 2018

Tabel 1 3 Data Nelayan Tangkap Penerima Bantuan Di Kab. Bintang Tahun 2013 -2017 Melalui Dana APBD

No	Jenis Bantuan	Sumber Dana	Kecamatan	Kuantitas (Unit,Gulung)	Jumlah Penerima bantuan berdasarkan Tahun					Jumlah Penerima
					2013	2014	2015	2016	2017	
1	Bubu Rajungan Oval 625 buah, Kawat Bubu No. 19 MZ 1 "25 Gulung	APBD	Bintang Pesisir	25	20	-	-	-	-	20
2	Perahu Fiber Bermotor	APBD		10	-	-	10	-	-	10
3	Kapal Motor Fiber 1 GT dan Kelengkapan berserta alat tangkap	APBD		10	-	-	-	-	10	10
4	Kapal Motor Fiber 3 GT / 24 HP	APBD - P	Bintang Timur	1	-	1	-	-	-	3
5	Perahu Fiber Bermotor	APBD		9	-	-	9	-	-	9
6	Kapal Kayu 1 GT	APBD		1	-	-	1	-	-	1
7	Kapal Motor Kayu 3 GT	APBD		1	-	-	-	-	1	3
8	Kawat Bubu 50 Gulung	APBD - P	Mantang	100	-	9	-	-	25	34
9	Perahu Fiber Bermotor	APBD		8	-	-	8	-	-	8
10	Kapal Penangkap Ikan Kayu 3 GT	APBD		1	-	-	1	-	-	4
11	Kapal Motor 1 GT	APBD		5	-	-	-	-	-	5
12	Kapal Motor Kayu 3 GT	APBD		2	-	-	-	-	2	6
13	Kapal Motor Fiber 1 GT dan Kelengkapan berserta alat tangkap	APBD		15	-	-	-	-	15	15
Total				188	20	10	29	0	53	123

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintang 2018

Selain itu, pemerintah Kabupaten Bintang juga mendistribusikan bantuan kapal motor dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 4 Sumber dan jenis bantuan nelayan di Kabupaten Bintang tahun 2017

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Unit
1	APBD	Kapal Motor	68
2	DAK	Kapal Motor Fiber GT 1 dan Alat Tangkap Nelayan	40

Sumber: Panama, N., (13 Desember 2017)

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi adalah Sepanjang tahun 2013 s.d tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bintan telah menyalurkan bantuan kepada sebanyak 91 orang pembudidaya dan namun sampai dengan saat ini belum pernah dilakukn evaluasi terhadap keberhasilan program tersebut

1.3 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi eksisting metode pemberian bantuan perikanan kepada nelayan di Kabupaten Bintan?
- b. Bagaimana permasalahan yang ada di lapangan terkait pemberian bantuan?
- c. Bagaimana pembinaan pasca pemberian bantuan nelayan?
- d. Bagaimana dampak pemberian bantuan Terhadap pendapatan nelayan/pembudidaya di Kabupaten Bintan?
- e. Apa jenis bantuan yang memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan nelayan?

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi eksisting metode pemberian bantuan perikanan kepada nelayan di Kabupaten Bintan

- b. Untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan terkait pemberian bantuan
- c. Untuk mengetahui pembinaan pasca pemberian bantuan nelayan
- d. Untuk mengetahui dampak pemberian bantuan Terhadap pendapatan nelayan/pembudidaya di Kabupaten Bintan
- e. Untuk mengetahui jenis bantuan yang memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan nelayan

1.5 SASARAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sasaran dari Penelitian Dampak Pemberian Bantuan terhadap Pendapatan Nelayan/Pembudidaya di Kabupaten Bintan adalah nelayan di Kabupaten Bintan. Sedangkan manfaat dari Penelitian Dampak Pemberian Bantuan terhadap Pendapatan Nelayan/Pembudidaya di Kabupaten Bintan tersusunnya rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dalam mendukung efektivitas bantuan perikanan.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 KEBIJAKAN PUBLIK

Sebelum lebih jauh membahas tentang konsep teoritis kebijakan publik sebaiknya terlebih dahulu memahami pengertian dari kebijakan itu sendiri. Menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2007:17) mengatakan definisi kebijakan publik adalah “hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya”.

Konsep yang ditawarkan oleh Eyestone tersebut mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal, Winarno (2007). Tetapi batasan lain mengenai kebijakan publik diberikan oleh Dye (2000 : 1) yang mengatakan bahwa: “*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do.* Kebijakan Publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Dye dalam Suharto (2005:72) juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, model kebijakan sosial dapat dibagi dua, yakni model imperatif dan model indikatif. Model kebijakan sosial imperatif adalah kebijakan sosial terpusat yakni, seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber, dan jumlah pelayanan sosial, seluruhnya telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan indikatif adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat.

Menurut Rose (Winarno 2007:17) mendefinisikan kebijakan publik adalah: “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Lasswell (1972 dalam Stewart *at al*

2008:6) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah program yang diproyeksikan untuk sebuah tujuan, nilai, dan praktek. Namun pada dasarnya banyak yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah proses-proses atau rangkaian-rangkaian pola dari aktifitas-aktifitas pemerintah atau keputusan-keputusan yang di disain untuk memperbaiki beberapa masalah-masalah publik, baik yang sedang dialami ataupun yang diperkirakan akan datang, Stewart *et al* (2008).

Didalam perkembangan studi kebijakan publik, ada beberapa model yang bisa digunakan dalam mempelajari atau menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Menurut Dye (2000 : 11) *A model is a simplified representation of some aspect of the real world*". Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penggunaan model didalam mempelajari kebijakan publik adalah untuk menjelaskan beberpa beberapa kata sebagai berikut:

- a. *Simplify and clarify our thinking about politics and public policy* (Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran kita mengenai politik dan kebijakan publik)
- b. *Identify important aspects of policy problems* (Mengidentifikasi aspek-aspek penting dari masalah kebijakan)
- c. *Help us communicate with each other by focusing on essential features of political life* (Membantu kita berkomunikasi dengan orang-orang lain melalui fokus pada fitur-fitur utama dari kehidupan politik)
- d. *Direct our efforts to understand public policy better by suggesting what is important and what is unimportant* (Melangsungkan usaha kita

untuk memahami kebijakan publik yang lebih baik melalui saran apa yang penting dan apa yang tidak penting)

- e. *Suggest explanations for public policy and predict its concept*
(Memberikan penjelasan untuk kebijakan publik dan prediksi konsep itu.

Sedangkan menurut Stewart at al (2008 : 53), model membantu kita untuk melihat gambaran dari kenyataan melalui pemberian tanda hubungan-hubungan antara sejumlah faktor yang diduga menyebabkan beberapa fenomena. Menurutnya ada beberapa jenis model yang biasa digunakan untuk membantu kita melihat gambaran dari kenyataan yaitu *descriptive models, normative model* dan *hard and sof model*.

Pertama, tujuan dari model deskriptif adalah untuk menjelaskan atau memprediksi penyebab dan dampak-dampak dari pemilihan kebijakan. Kedua, Model normatif tidak hanya untuk menjelaskan atau memprediksi tetapi juga memberikan aturan-aturan dan saran bagi mengoptimalkan pencapaian dari sebuah nilai. Ketiga, model keras digunakan untuk fenomena actual yang sedang dilambangkan, sedangkan model lembut mewakili dari teoretis murni dan masalah konseptual hipotesis dari karakteristik yang dibayangkan bagi peristiwa yang menjadi perhatian kita.

Menurut Dye (2000 : 11) model-model yang dikembangkan didalam membantu kita memahami kehidupan politik meliputi:

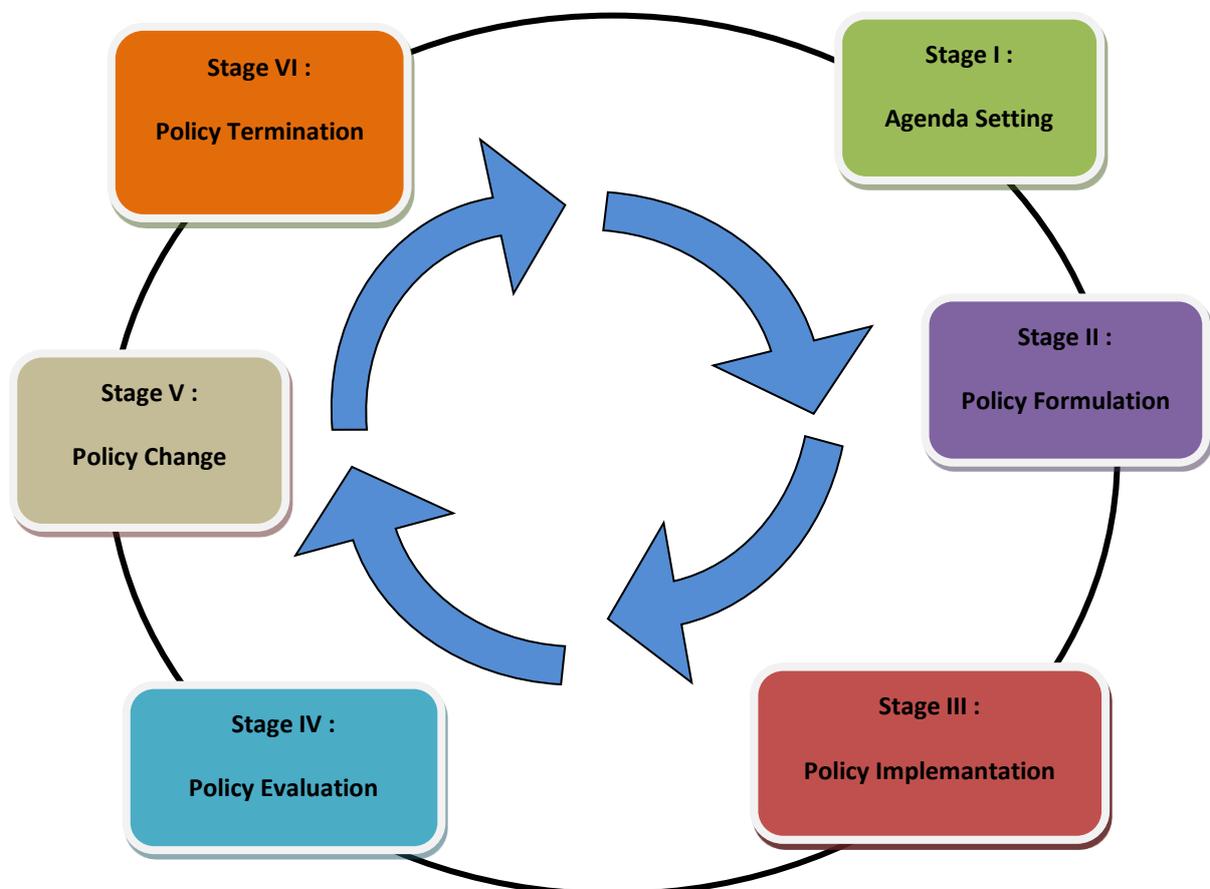
- a. Model institusional
- b. Model proses

- c. Model rasional
- d. Model incremental
- e. Model elite
- f. model pilihan publik
- g. Model teori permainan

2.2 PROSES KEBIJAKAN

Menurut Stewart *et al* ada enam tahap dalam perputaran kebijakan (*The Policy Cycle*):

Gambar 2 1 The Policy Cycle (A problem For Government)



Sumber : Stewart *et al* (2008)

Agenda setting menurut Kingdon adalah “The list of subjects or problems to which government officials....are paying some serious attention at any given

time". Secara singkat dapat dikatakan bahwa agenda setting merupakan tahap dimana sebuah masalah mulai diperhatikan secara serius oleh pemerintah, baik oleh pihak eksekutif maupun pihak legislatif. *Policy formulation* adalah "*Passage of legislation designed to remedy some past problem or prevent some future public policy problem*". Sedangkan *Policy Implementation* sering digambarkan sebagai "*What Happens after a bill becomes a law*", namun dapat didefinisikan sebagai "*a series of governmental decisions and actions directed toward putting an already decided mandate into effect*". *Policy Evaluation* adalah "*Concerned with what happens as a result of the public policy-that is, what happens after a policy is implemented*". Lebih jauh Stewart et al (2008:11) menjelaskan bahwa tahap kelima dalam perputaran kebijakan adalah *Policy Change*. Perubahan kebijakan merupakan konsep terbaru yang dikembangkan oleh Sabatier dan *analytical concept, policy change refers to the point at which a policy is evaluated, and redesigned so that the entire policy process begins anew*. Satu tahap yang terakhir dalam proses-proses ini adalah *Policy Termination* yang mana diartikan sebagai "*Ending outdated or inadequate policies*", yang bisa dicerna sebagai proses mengakhiri kebijakan-kebijakan usang atau yang tidak memadai.

Mengacu pada pendapat Bonser et al (1999 : 75) mengatakan bahwa ada beberapa alternative cara-cara didalam menganalisis pemilihan kebijakan dan membuat keputusan yang rasional. Cara-cara yang ada memang agak mirip, tetapi mereka memiliki perbedaan kata kunci untuk menggambarkan kerangka kerja tertentu yang mereka punya dan ini

membuat kerangka kerja mereka memiliki variasi nilai-nilai yang detail. Kerangka kerja yang dibuat oleh Bonser et al merupakan hasil cangkakan, dibentuk dari beberapa pendekatan didalam satu cara, beberapa mungkin menempatkan perbedaan penekanan pada beberapa kategori-kategori dan usaha untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tetapi meghubungkan konsep-konsep tersebut. Menurut Bonser et al ada 7 tahap yang dijalankan untuk membuat pilihan kebijakan:

- a. *Establish the context. Assemble data, information, and evidence* (Membangun kontek. Mengumpulkan data, informasi dan bukti)
- b. *Formulate the problem* (Menyimpulkan Masalah)
- c. *Set project objectives* (Mengatur tujuan Proyek)
- d. *Analyze alternative solutions* (Menganalisa alternative-alternatif jalan keluar)
- e. *Choose an alternative (s) and set the policy* (Memilih sebuah alternative dan membuat kebijakan)
- f. *Implement the policy* (Melaksanakan Kebijakan)
- g. *Monitor dan evaluate the policy* (Memonitor dan mengevaluasi kebijakan)

Dalam penelitian tingkah laku kehidupan politik yang tradisional yang secara gamblang berkaitan dengan sistem politik telah dicirikan dalam berbagai cara (Easton 1984 : 73). Easton berpendapat bahwa kehidupan politik telah digambarkan sebagai penelitian terhadap tata tertib kekuasaan, Negara, kebijaksanaan umum, pembuatan keputusan, atau memonopoli penggunaan kekuatan yang sah.

Berdasarkan pendapat Easton tersebut, dapat dipahami bahwa proses pengambilan keputusan publik (Kebijakan Publik) sangat terkait dengan proses dari sebuah sistem politik. Dalam hal ini kehidupan politik akan diinterpretasikan sebagai sistem yang secara konseptual berbeda dari sistem-sistem lainnya didalam masyarakat. Lebih lanjut Easton menjelaskan, penelitian-penelitian terhadap badan pembuat undang-undang, eksekutif, partai-partai, organisasi-organisasi administratif, pengadilan-pengadilan dan kelompok-kelompok kepentingan, tetap menguasai pendekatan awal dimana para ahli politik secara khusus mengumpulkan datanya (Easton, 1984 : 74).

Selanjutnya Easton mengatakan bahwa factor yang membedakan antara interaksi politik dengan interaksi social lainnya adalah bahwa seluruh rangkaian interaksi politik secara dominan berorientasi ke arah alokasi nilai-nilai otoritatif bagi sebuah masyarakat. Alokasi-alokasi otoritatif mendistribusikan berbagai hal penting diantara orang-orang atau sejumlah kelompok lewat satu atau tiga cara yang tersedia, yaitu:

- a. Menghilangkan suatu nilai yang sudah dipunyai oleh seseorang
- b. Menghalangi proses pencapaian nilai-nilai lain yang akan diperoleh
- c. Memberikan kepada sejumlah orang peluang untuk menggunakan nilai-nilai sembari menghujat yang lain.

Suatu alokasi dikatakan otoritatif bila orang-orang yang berorientasi padanya memang merasa bahwa mereka terikat dengannya. Ada sejumlah alasan mengapa para anggota suatu sistem beranggapan bahwa mereka terikat. Pemahaman mengenai hal-hal ini akan membantu kita memahami

berbagai variasi dalam proses-proses sistem yang berbeda. Ciri-ciri penting dapat dihubungkan dengan penerimaan alokasi-alokasi sebagai ikatan pada alasan-alasan kekhawatiran akan penggunaan kekerasan atau beberapa sanksi psikologis yang berat, seperti misalnya kutukan-kutukan dalam sistem-sistem primitif atau kekejaman masyarakat dalam membentuk sanksi yang lebih kompleks. Kepentingan pribadi, tradisi, kesetiaan, perasaan legalitas, atau perasaan legitimasi merupakan variable-variabel penting tambahan dalam menerangkan perasaan kewajiban menerima keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif (Easton 1984 : 76).

Dalam proses perumusan kebijakan publik, pilihan mengenai kebijakan baru akan ditentukan setelah alternatif-alternatif solusi kebijakan yang baru di analisis. Dalam proses penyusunan dan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan daerah maka tidak akan terlepas dari sistem dan pendekatan perencanaan pembangunan yang digunakan. Pada dasarnya proses penyusunan perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi dua sistem yaitu perencanaan dari atas ke bawah (*Top Down Planning*) dan dari bawah ke atas (*Bottom Up Planning*).

Kedua bentuk perencanaan tersebut menurut Kartasasmita 1997 : 114 – 115) termasuk kelompok perencanaan menurut proses / hirarki penyusunan. Lebih lanjut Kartasasmita menjelaskan, perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk kedalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada dibawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. Sedangkan

perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan perencanaan dari bawah ke atas ini.

2.3 EVALUASI KEBIJAKAN DAN EVALUASI PROGRAM

Penelitian Evaluasi kebijakan fokus pada dampak-dampak dari kebijakan publik. Pertama, evaluasi kebijakan fokus pada menguji dampak kebijakan seperti pekerjaan-pekerjaan, material yang diproduksi dan pelaksanaan pelayanan publik. kedua, melihat dampak kebijakan pada target kelompok-kelompok yang spesifik atau dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai usaha untuk fokus pada kinerja kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan fokus pada kemampuan kebijakan untuk meningkatkan beberapa kondisi masyarakat seperti mengurangi polusi lingkungan atau mengurangi kriminalitas.

Menurut Stewart at al 2008 mengatakan ada empat (4) tipe evaluasi kebijakan. Pertama, ada sebuah proses evaluasi yang diketahui. Proses evaluasi fokus pada pengertian bahwa sebuah kebijakan atau program yang diperuntukan kepada masyarakat atau langkah-langkah dalam melaksanakan kebijakan atau program. Tipe evaluasi ini fokus dalam

mengukur kegiatan-kegiatan yang telah diprogram dan kepuasan masyarakat melalui program itu sendiri.

Tipe kedua adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak fokus dengan hasil-hasil akhir sebuah program tertentu. Seperti evaluasi-evaluasi yang fokus pada apakah program-program atau tujuan-tujuan kebijakan telah tercapai sebagaimana yang diinginkan. Contohnya seperti seberapa banyak masyarakat yang terlayani melalui program tersebut? Seberapa banyak pekerja yang telah dilatih? Tipe evaluasi ini lebih mudah untuk dilaksanakan.

Tipe ketiga fokus pada dampak kebijakan atau program pada masalah utama yang akan diselesaikan seperti kemiskinan, buta huruf, dan polusi serta apakah masalah-masalah tersebut telah berkurang sebagai akibat adanya program atau kebijakan yang dibuat. Sedangkan tipe yang keempat adalah *meta - Evaluations*. Secara sederhana, meta evaluations dapat diartikan sebagai evaluasi konseptual. Tipe Evaluasi ini merupakan perpaduan antara temuan-temuan penelitian dan persamaan diantara hasil-hasil, pengukuran-pengukuran, dan trend-trend didalam literatur akademik. Meta - evaluation sangat mirip dengan literatur review didalam fokusnya untuk melihat pola-pola dalam temuan-temuan dari serangkaian evaluasi.

2.3.1 Evaluasi Context

Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (rationale) dalam penentuan tujuan (Worthern & James R Sanders :1979) Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan

gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (goal). Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Stufflebeam menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan (1983). Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan (discrepancy view) kondisi nyata (reality) dengan kondisi yang diharapkan (ideality).

Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan on going. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak menimbulkan kerugian jangka panjang (Isaac and Michael:1981).

2.3.2 Evaluasi Input

Evaluasi input (input evaluation) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang

harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam menspesifikasikan rancangan prosedural. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien.

2.3.3 Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan disebut dengan evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut dinamakan evaluasi proses. Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas dimonitor secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian penting dilakukan karena berguna pada pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan dan menentukan kekuatan dan kelemahan program. Stufflebeam juga mengatakan bahwa evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi perencanaan (Stufflebeam & Shienfield, 1985:175 dalam Badrujaman, 2009:66).

Tujuan evaluasi proses yaitu untuk mengidentifikasi atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti cacat dalam disain prosedur atau implementasinya (Badrujaman, 2009). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa evaluasi proses juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program, serta untuk mencatat, dan menilai prosedur kegiatan dan peristiwa. Selain itu, tujuan utama evaluasi proses dikemukakan oleh Worthen and Sanders (1973) dalam Fuddin Van Batavia under Uncategorized (2008), yaitu:

1. Mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan,
2. Memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, dan
3. Memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan.

Memonitor kegiatan, berinteraksi terus menerus, serta dengan mengobservasi kegiatan, dan staf merupakan hal-hal yang dilakukan dalam evaluasi proses. Dalam melakukannya, dinyatakan dalam Badrujaman (2009:66) bahwa hal tersebut dapat melibatkan pengukuran *pre-test* dan *pos-test* terhadap pengetahuan dan keterampilan, mengobservasi perilaku tertentu pada siswa, *self-report* mengenai perbaikan tingkah laku, penilaian performance rutin (tingkat, tes terstandar, portofolio), *self-studi* yang terus menerus, studi kasus individual, kehadiran dan data kedisiplinan, kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, keterlaksanaan program, pengukuran sosiometri, serta hambatan-hambatan yang ditemui

2.3.4 Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan dan menilai pencapaian program (Stufflebeam & Shienfield, 1985:176). Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi dapat juga bertujuan mengumpulkan deskripsi dan penilaian terhadap iuran (outcome) dan menghubungkan itu semua dengan objektif, konteks, input, dan informasi.proses, serta untuk menginterpretasikan kelayakan dan keberhargaan program.

Evaluasi produk dapat dilakukan dengan membuat definisi operasional dan mengukur kriteria pengukuran yang telah dicapai (objektif), melalui pengumpulan nilai dari stakeholder, dengan unjuk rasa (performing) baik dengan menggunakan analisis secara kuantitatif, maupun kualitatif (Trotter et al., 1998:136).

Analisis produk ini diperlukan pembandingan antara tujuan, yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, prosentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitanya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu.

2.3.5 Implikasi Hasil Evaluasi Terhadap Program atau Kebijakan

Mengacu pada pendapat Weis (Anggara, 2014) bahwa hasil kajian evaluasi atas sebuah program atau kebijakan akan berimplikasi pada keberlangsungan program atau kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a. Meneruskan atau mengakhiri program.
- b. Memperbaiki praktek dan prosedur administrasinya.
- c. Menambah dan mengurangi strategi dan teknik implementasinya.
- d. Melembagakan program ke tempat lain.
- e. Mengalokasikan sumber daya ke program lain.
- f. Menolak atau menerima pendekatan atau teori yang digunakan oleh program atau kebijakan sebagai asumsi.

Secara umum bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan kinerja yang telah dilakukan atau diimplementasikan melalui program atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi terhadap suatu program atau sebuah kebijakan sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hasil evaluasi kebijakan tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan nantinya yang mana hasil tersebut menjadi bahan masukan dan pertimbangan pada tahapan input dalam menyusun dan menetapkan program atau kebijakan yang dibutuhkan masa mendatang.

2.4 KONSEP PEMBANGUNAN

Pada umumnya, pembangunan identik terhadap proses rencana perubahan atau perbaikan kondisi untuk menuju ke arah yang lebih baik yang meliputi pembangunan aspek kehidupan fisik dan non fisik dalam rangka untuk mencapai atau meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan aspek fisik bisa berupa pembangunan gedung-gedung, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain. Sementara pembangunan non fisik adalah pembangunan Sumber Daya Manusia untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang seperti mental, moral, tingkat kecerdasan, kondisi kesehatan, tatanan nilai budaya dan norma-norma dan sebagainya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih berkualitas. Jika ditinjau dalam bahasa Inggris bahwa kata “pembangunan” selaras dengan kata “*development*” yang berasal dari kata kerja “*to develop*” yang memiliki arti “menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan, atau mengubah secara bertahap (*to change gradually*)” (Huraerah, 2011).

Merujuk pada perpustakaan ekonomi pembangunan maka pembangunan seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya (Mardikanto dan Soebiato, 2013). Pandangan ini mengarahkan bahwa konsep pembangunan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pembangunan bukan hanya menguraikan tentang aspek pertumbuhan ekonomi melainkan dari segala aspek seperti, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan nilai-nilai

kehidupan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya baik pada aspek fisik maupun aspek non fisik yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam memenuhi standar hidup dan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2010; Huraerah, 2011; Mardikanto dan Soebiato, 2013; Anwas, 2014, Theresia dkk, 2015). Pembangunan merupakan suatu konsep yang berdimensi luas dan senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat (Huraerah, 2011). Kemajuan perkembangan teknologi, kondisi geografis, kondisi SDM tentunya akan mempengaruhi pendekatan-pendekatan dalam merumuskan pembangunan yang akan direncanakan untuk dilaksanakan.

2.4.1 Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan pernyataan Huraerah (2011) terkait dengan kesejahteraan sosial bahwa dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan permasalahan sosial yang semakin kompleks yaitu:

- a. Besarnya jumlah penduduk miskin.
- b. Tingginya angka pengangguran.
- c. Besarnya jumlah anak penderita gizi buruk, busung lapar, dan anak putus sekolah.
- d. Menurunnya kesetiakawanan social, solidaritas social, kasih saying terhadap sesame dan empati.
- e. Meningkatnya jumlah penderita trauma psikologik dan gangguan mental.

f. Dan lain-lain.

Permasalahan-permasalahan itu memerlukan kehadiran pemerintah untuk mengatasinya melalui penetapan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dengan kondisi kehidupan yang semakin sulit bisa menyebabkan masyarakat semakin tidak berdaya. Masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sulit untuk mencapai kehidupan yang berkualitas.

2.4.2 Pelaku-Pelaku Pembangunan

Rahim (Mardikato & Soebiato, 2013) menyampaikan bahwa pada intinya untuk setiap proses pembangunan memiliki dua kelompok atau “sub-sistem” pelaku-pelaku pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerak warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apa yang dimaksud dengan merumuskan perencanaan pembangunan tersebut, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok tersebut melainkan mereka hanya sekedar merumuskan semua ide-ide atau gagasan-gagasan atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui mekanisme yang telah disepakati. Sedang perencanaan pembangunan di arus yang paling bawah, disalurkan melalui pertemuan kelompok atau

permusyawaratan pada lembaga yang terendah atau terbawah baik secara formal maupun informal.

2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya tenaga dan lain-lain), pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Pada kenyataannya adalah pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini, sedangkan kelompok elite masyarakat hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan perencanaan pembangunan” sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, sub-sistem terdiri dari sub-sistem “pemerintah dan Penggerak dan sub-sistem “masyarakat dan pengikut”.

1. Sub-sistem pemerintah dan penggerak adalah semua aparat pemerintahan, penyuluh (agent of change), pekerja-sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM yang terlibat dan berkewajiban untuk:
 - a. Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan member legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan.
 - b. Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.
 - c. Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

- d. Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sebagai sasaran utama pembangunan secara adil.
2. Sus-sistem masyarakat dan pengikut adalah sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem pemerintah dan penggerak dan berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.
 - b. Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan.
 - c. Memberikan masukan dan umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
 - d. Menerima dan menfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kedua pelaku pembangunan agar bisa mencapai keberhasilan pembangunan sebagai berikut seperti menjalin hubungan psikologi yang akrab. Hal

ini perlu dilakukan dengan tujuan terjalinnya komunikasi dan interaksi yang lebih efektif diantara kedua pelaku pembangunan tersebut. Selain itu, para pelaku pembangun juga perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Theresia *et.al*, 2015):

1. Aparat pemerintah atau penguasa.

Didalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan harus senantiasa mau: mendengarkan, memahami dan menhayati aspirasi masyarakat, memahami kondisi dan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakat.oleh karena itu, Sutrisno & Dove (Theresia *et.al*, 2015) menyampaikan bahwa terdapat tiga pokok penting yang harus diingat yaitu:

- a. Adanya keterlibatan anggota-anggota masyarakat untuk memberitahukan kepada penguasa tentang apa dan bagaimana dengan sebaik-baiknya pembangunan direncanakan harus mampu menolong mereka, dan sebaliknya bahwa penguasa tidak boleh hanya percaya terhadap hasil-hasil konsultasi antar jenjang birokrasi pemerintah.
- b. Adanya hak “tawar-menawar” (bargaining power) yang dimiliki oleh sub-sistem pengikut atau masyarakat. Artinya, masyarakat harus diberi kesempatan untuk atau bila perlu menolak kebijakan atau program-program dan proyek pembangunan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat atau kegiatan pembangunan yang akan terlalu banyak menuntut

pengorbanan masyarakat tanpa imbalan manfaat yang layak yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang akan diwajibkan untuk member pengorbanan tersebut.

- c. Setiap perencanaan harus selalu merupakan “proses belajar” (learning process) yang memerlukan adanya keinginan para perumus kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk belajar dari pengalaman masyarakat dan menggunakannya sebagai acuan sebelum pengambilan keputusan.
2. Masyarakat harus selalu diberitahu tentang apa yang sedang dan telah direncanakan oleh penguasa serta memberitahu cara-cara yang telah dipilih untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan tersebut. Selanjutnya, masyarakat itu sendiri harus aktif untuk mempersiapkan diri agar berpartisipasi dalam melaksanakan proses pembangunan tersebut.
3. Masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pembangunan mulai dari tahapan proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

2.5 KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan bukan merupakan sebuah konsep yang baru dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Pemberdayaan atau “*empowerment*” jika ditinjau secara konseptual atau secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberkuasaan yang berasal dari kata “*power*” yang memiliki arti kekuasaan atau keberdayaan, pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang tidak mampu, tidak berdaya atau masyarakat yang lemah atau masyarakat yang tidak beruntung (Suharto, 2010., Huraerah, 2011., Hikmat, 2013). Konsep pemberdayaan ini lebih menekankan pada pemberian kekuasaan, peningkatan kekuasaan kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi dan menguasai kehidupannya dan kehidupan orang lain ke arah yang lebih baik (Suharto, 2010., Huraerah, 2011). Konsep pemberdayaan memerlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Hal ini mengacu pada pendapat Soetarso (Huraerah, 2011) yang menjelaskan bahwa pengertian pemberdayaan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsure masyarakat agar dapat menjadi sumber langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan social.
2. Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, mitovasi dan perannya melalui pemahaman lingkungan, pemberian informasi, dramatisasi masalah, penggalangan dukungan,

pengembangan momentum, penyediaan tempat atau lahan pengabdian, serta pelatihan dan pengembangan.

Selanjutnya, Ite (Suharto, 2010., Huraerah, 2011) menyampaikan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud pada pengertian tersebut bukanlah kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerja.
- b. Pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Lembaga-lembaga yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan social, pendidikan dan kesehatan.
- d. Ide atau gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
- e. Sumber-sumber yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan (Suharto, 2010). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Proses pemberdayaan tersebut cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) sosial ekonomi dan politik untuk mencapai tujuan pengembangan diri atau "*self-development*" (Hurerah, 2011). Berikutnya, Saraswati (Huraerah, 2011) mengatakan bahwa pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

- a. *Learning by doing*. Ini dimaksudkan bahwa pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrret yang terus menerus dan dampaknya dapat di lihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- c. *Self-evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- d. *Self development and coordination*. Pemberdayaan mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- e. *Self-selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan peneilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.

- f. *Self-decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-decisim*).

Keseluruhan unsur diatas merupakan pembiasaan untuk menjadikan masyarakat agar berdaya, sebagai penguat dan pengait dalam pemberdayaan. Jika keenam unsur tersebut dpaat dilakukan secara berkelanjutan maka dampak yang ditimbulkan semakin lama akan menjadi semakin kuat sehingga dapat mempengaruhi dan mengembangkan kehidupan yang lainnya secara menggelinding.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Ciri-ciri orang yang berdaya menurut Kit Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Ditjen Dikmas, Kemendiknas (Amanah dan Farmayanti, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Mengenali kekuatan dan kekurangan
2. Memiliki komitmen dan tanggungjawab
3. Memiliki kemandirian dan inisiatif untuk memulai

4. Dapat mengendalikan diri dan tidak menyalahkan individu atau pihak lain
5. Melaksanakan kerja atau kegiatan secara professional
6. Dapat membina hubungan interpersonal yang baik
7. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan
8. Dapat menghargai diri sendiri dan orang lain

Setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini tentunya akan memberikan masukan dalam memilih pendekatan-pendekatan yang cocok dalam melaksanakan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat tersebut. Sebagai mana dinyatakan oleh Amanah dan Farmayanti (2014) bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berhasil memiliki ciri-ciri seperti masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang yang tinggi, mampu menggalang kerjasama, dan mampu menentukan keputusan dari berbagai pilihan yang ada (sumber daya yang tersedia).

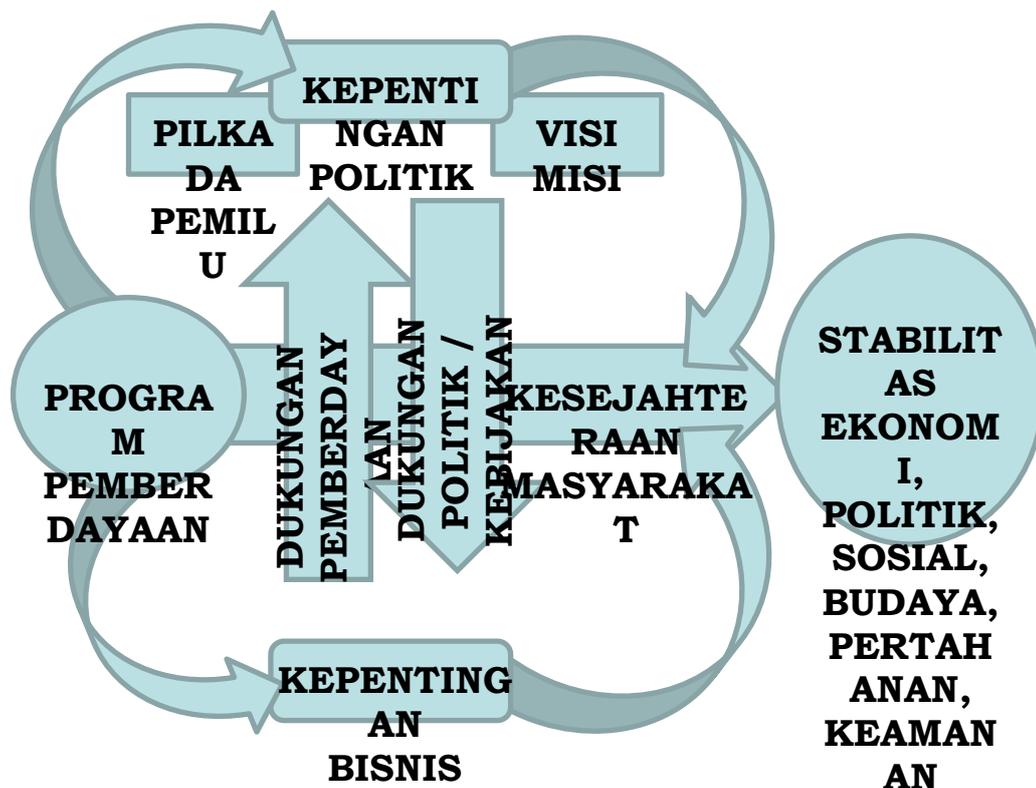
2.5.2 Penerima Manfaat

2.5.2.1 Pengertian Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya penerima manfaat dalam konteks pemberdayaan masyarakat yaitu adanya kelompok sasaran atau objek yang akan menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Theresia dkk (2015) mengatakan bahwa kelompok sasaran tersebut adalah masyarakat, utamanya masyarakat kelas bawah (kelompok *grassroots*, masyarakat yang termarjinalkan). Pengertian tersebut telah menempatkan masyarakat dalam

kedudukan “yang lebih rendah” dibanding para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesan merendahkan kelompok sasaran (sasaran penyuluhan) maka digunakan istilah penerima manfaat (*beneficiaries*).

Gambar 2 2 Karakteristik Program Pemberdayaan



Sumber: Theresia et.al (2015)

Berdasarkan pengertian “penerima manfaat” tersebut terkandung makna sebagai berikut (Theresia et.al, 2015):

1. Berbeda dengan kedudukan sebagai “sasaran”, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu

kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.

2. Penerima manfaat bukanlah obyek atau sasaran tembak yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan fasilitator, melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan.
3. Berbeda dengan kedudukan sebagai “sasaran” yang tidak punya pilihan atau kesempatan untuk menawar setiap materi yang disampaikan, selain harus menerima atau mengikutinya, penerima manfaat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan oleh fasilitatornya.
4. Penerima manfaat tidak berada dalam posisi dibawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan yang setara dan bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya.
5. Yang berlangsung antara penyuluh dan penerima manfaatnya bukanlah bersifat vertical (penyuluh menggurui penerima manfaatnya), melainkan bersama yang partisipatif.

2.5.2.2 Ragam Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya akan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan kegiatan tersebut. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat tersebut ditujukan atau diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak berdaya atau masyarakat kelas bawah. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut tidak hanya bergantung pada efektivitas komunikasi antara fasilitator dengan masyarakat atau kelompok sasaran melainkan adanya faktor perilaku atau kegiatan yang direncanakan oleh pemangku kepentingan pembangunan yang lainnya seperti: produsen sarana produksi, penyalur kredit atau lembaga keuangan, peneliti, akademisi, aktivis LSM dan lain-lain yang merupakan sebagai *agent of development* dan sekaligus sebagai penerima manfaat.

Di sisi lain, keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku, kebijakan dan komitmen kelompok lapis atas (pemangku kebijakan/kaum elit) untuk benar-benar dapat membantu dan melayani masyarakat agar masyarakat kelas bawah (*grassroots*) bisa menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan uraian kenyataan dari perilaku kelompok kelas bawah atau akar rumput (*grassroots*) dan kelompok kelas atas (pemangku kebijakan) tersebut, maka Theresia *et.al*, (2015) membedakan penerima manfaat pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pelaku Utama.

Penerima manfaat ini terdiri dari warga masyarakat dan keluarganya. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat dan keluarganya yang merupakan penerima manfaat dan juga sebagai pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan

memanfaatkan sumber daya yang ada (factor-faktor produksi) demi tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi , efisiensi usaha tani serta perlindungan dan pelestarian sumber daya alam berikut lingkungan hidup yang terkandung didalamnya.

2. Penentu Kebijakan

Kelompok ini terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kebijakan pembangunan. Selain itu kelompok tersebut, elit masyarakat yang paling bawah (desa) yang secara aktif terlibat atau dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan merupakan kelompok penentu kebijakan.

3. Pemangku Kepentingan Yang Lain

Kelompok ini merupakan kelompok yang mendukung atau memperlancar kegiatan pembangunan. Kelompok ini terdiri dari:

- a. Peneliti dan atau akademisi yang berperan dalam penemuan, pengujian, dan pengembangan inovasi yang diperlukan oleh pelaku utama.
- b. Produsen sarana produksi dan peralatan atau mesin-mesin yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi yang dihasilkan para peneliti.
- c. Pelaku bisnis seperti distributor, penyalur atau pengecer sarana produksi dan peralatan atau mesin-mesin yang diperlukan dalam jumlah, mutu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau oleh pelaku utama.

- d. Pers, media massa dan pusat-pusat informasi yang menyebarluaskan informasi pasar (permintaan dan penawaran serta harga produk yang dihasilkan dan dibutuhkan), inovasi yang dihasilkan para peneliti serta jasa lain yang diperlukan pelaku utama.
- e. Aktivistis LSM, tokoh masyarakat dan lain-lain yang berperan sebagai organisator, fasilitator, dan penasehat pelaku utama.
- f. Budayawan, artis, dan sebagainya yang berperan dalam diseminasi inovasi serta promosi produk yang dihasilkan maupun yang dibutuhkan pelaku utama.

2.5.2.3 Karakteristik Penerima Manfaat

Keberagaman suku dan budaya suatu bangsa sangat mempengaruhi karakteristik kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, karakteristik dari setiap kelompok masyarakat atau penerima manfaat perlu mendapatkan perhatian untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menentukan pemilihan dan penetapan langkah-langkah seperti materi, metode, waktu, tempat dan perlengkapan penyuluhan serta pelaksanaan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Menurut Theresia *et.al*, (2015) terdapat beberapa karakteristik penerima manfaat yang perlu dipahami sebagai berikut:

1. Karakteristik pribadi yang terdiri dari jenis kelamin, umur, etnis/ suku agama dan sebagainya

2. Status social ekonomi yang terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan keterlibatannya dalam kelompok atau organisasi kemasyarakatan
3. Perilaku keinovatifan yang terdiri dari perintis (*innovator*), pelopor (*early adopter*), penganut dini (*early majority*), penganut lambat (*late majority*) dan kelompok yang tidak bersedia berubah (*laggards*).
4. Moral ekonomi masyarakat terdiri dari moral subsistensi dan moral rasionalitas. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok diantara kedua moral ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Wharton (Theresia *et.al*, 2015) bahwa adanya kontinum perilaku ekonomi yang bergerak dari moral subsisten yang pada umumnya tidak responsive terhadap inovasi yang ditawarkan melalui upaya pemberdayaan ke arah moral ekonomi rasional yang sangat responsive terhadap perubahan. Kelompok subsisten akan sulit untuk menerima pertimbangan-pertimbangan yang rasional sedangkan kelompok rasional juga akan sulit untuk menerima pertimbangan-pertimbangan subsisten. Artinya, kedua kelompok tersebut tetap dengan pendiriannya masing-masing yang sangat sulit untuk menerima atau untuk menjadi kelompok yang lainnya.

Selanjutnya Scott (Theresia *et.al*, 2015) menegaskan bahwa terdapat karakteristik khusus yang dimiliki oleh moral ekonomi subsisten yaitu:

- a. Mengutamakan selamat dan tidak mudah menerima inovasi yang belum teruji. Kelompok ini lebih menyukai untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan, warisan tradisi yang benar-benar telah teruji oleh waktu.

- b. Tidak menyukai atau menolak pasar. Dalam konteks ini kelompok hanya melakukan kegiatan yang terbatas pada rutinitas kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- c. Hubungan patron-client. Pola hubungan yang dibangun tidak lebih antara bapak dan anak yang saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi. Hubungan ini untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan juga untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bersama.

Di lain pihak, Dixon (Theresia *et.al*, 2015) menggambarkan secara terperinci karakteristik dari kelompok moral subsistensi sebagai berikut:

- a. Tidak mudah percaya dengan orang lain.
- b. Cukup dalam keterbatasannya atau lebih suka dengan apa adanya.
- c. Membenci kekuasaan pemerintah atau orang luar.
- d. Memiliki sifat kekeluargaan yang berarti bahwa kepentingan pribadi selalu dikalahkan oleh kepentingan keluarga atau kerabat.
- e. Tidak inovatif (tidak mudah menerima perubahan).
- f. Fatalistic yaitu sudah jemu dan tidak memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu untuk memperbaiki kehidupannya.
- g. Aspirasinya terbatas. Tidak punya daya upaya untuk memikirkan peluang-peluang demi perbaikan kehidupannya atau upaya untuk memperbaiki kualitas hidupnya.
- h. Tidak mampu mengantisipasi masa depan.

- i. Dunianya sempit. Tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang terjadi diluar masyarakatnya sendiri
- j. Kurang mampu berempati atau tidak mampu memahami apa yang dipikirkan orang lain.
- k. Kurang kritis. Hal ini terjadi dikarenakan kepemilikan pengetahuan yang terbatas (dunia yang sempit) menyebabkan merak menjadi kurang kritis dalam merespon berbagai informasi yang disampaikan dan bahkan memiliki persepsi yang berbeda terhadap upaya-upaya pemberdayaan.

Pada umumnya, pada era modern saat ini sangat jarang bisa jumpai masyarakat dengan kondisi subsisten tersebut melainkan terjadinya peralihan dari masyarakat subsisten yang mandiri menuju masyarakat komersial yang rasional. Seyogyanya masyarakat selalu ingin memperbaiki kehidupannya untuk menjadi lebih berkualitas dengan meninjau dan memilih peluang-peluang yang ada dan memungkinkan untuk dilakukan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik masyarakat rasional yang di kemukakan Popkin (Theresia *et.al*, 2015) sebagai berikut:

- a. Menyukai perubahan

Masyarakat rasional selalu mencari atau memburu inovasi demi terjadinya perubahan, peningkatan produksi dan sebagainya. Pandangan mereka perubahan bukan sebagai ancaman melainkan peluang menuju perbaikan masyarakat dan kehidupannya.

- b. Memerlukan pasar

Selalu berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya sehingga mereka sangat membutuhkan pasar sebagai wadah untuk menjual hasil produksi.

c. Hubungan eksploitatif

Bentuk hubungan patron-client sudah tidak dijumpai lagi melainkan hubungan bisnis atau untung rugi atau bahkan saling mengeksploitasi demi peningkatan efisiensi dan pendapatan (keuntungan). Orientasi pada masyarakat rasional berupaya untuk memperoleh manfaat yang setinggi-tingginya dari setiap upaya yang telah dilakukannya.

2.6 DISAIN PENELITIAN DALAM PENELITIAN EVALUASI

Evaluasi yang sistematis melibatkan perbandingan-perbandingan desain penelitian untuk memperkirakan apakah perubahan-perubahan di masyarakat bisa dikaitkan kepada kebijakan atau program yang telah diimplementasikan. Seorang evaluator secara simpel menginginkan untuk mengetahui apakah perubahan didalam prilaku-prilaku individu atau sosial yang dapat diidentifikasi seperti peningkatan prestasi belajar atau tingkat kriminalitas yang terjadi, serta apakah program atau kebijakan itu sendiri menghasilkan perubahan dalam prilaku atau kondisi sesungguhnya dari keadaan lain atau yang terpengaruh. Antara lain desain penelitian dalam penelitian evaluasi dapat menggunakan *Pre-Experimental Design (The one-shot case study)*, *Before And After Studies (Before and After Studies)*, *True Experiments (The pretest-posttest control group design)*, *Quasi-Experimentals Design (The nonequivalent control group design)*

2.7 KONSEP PERIKANAN

2.7.1 Definisi Perikanan

Sebagaimana kita ketahui bahwa perikanan memegang peranan yang sangat penting dalam peradaban manusia mulai dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Istilah perikanan itu sendiri bukanlah sesuatu yang hal yang baru. Untuk itu, diperlukan untuk mengulas apa yang dimaksud dengan perikanan. Merujuk pada pendapat ahli yang dikutip oleh Fauzi (2010) melalui karyanya yang berjudul “Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan dan Pengelolaan” maka perikanan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Perikanan sebagai kegiatan, industry atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya (Merriam – Webster Dictionary)
2. Perikanan sebagai pemanenan ikan, kerang-kerangan (*shellfish*) dan mamalia laut (encyclopedia Britannia)
3. Perikanan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dilaut (Hempel & Pauly)
4. Perikanan sebagai suatu system yang terdiri dari tiga komponen yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut (Lackey) yang selanjutnya membagi perikanan yang terdiri atas beberapa kelompok atau tipe berdasarkan sifat antara lain:
 - a. Jenis lingkungan, contoh: perikanan air tawar, laut, danau, sungai dan bendungan

- b. Metode pemanenan, contoh: perikanan trawl, purse seine, dipnet dan sebagainya
- c. Jenis akses yang diizinkan, contoh: perikanan akses terbuka (*Open Access*), perikanan akses terbuka dengan regulasi, perikanan dengan akses terbatas.
- d. *Concern organism*, contoh: perikanan salmon, tuna, udang, kepiting dan lain-lain
- e. Berdasarkan tujuan penangkapan, contoh: perikanan komersial, subsisten, perikanan rekreasi
- f. Derajat kealaman dari hewan target yaitu total dari alam, semi budidaya atau total budidaya

Berdasarkan Permen-KP nomor 16 Tahun 2016 maka definisi Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Berdasarkan beberapa definisi perikanan diatas dapat disimpulkan bahwa perikanan merupakan kegiatan yang melibatkan manusia dalam mengelola sumber daya perikanan baik air laut, air tawar, dan air payau berdasarkan kebutuhan atau kepentingan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2.8 KONSEP NELAYAN

Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut (Satria, 2015). Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, definisi nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan PERMEN-KP (2016) bahwa nelayan terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

1. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
2. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya Ditjen Perikanan (Satria, 2015) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan sebagai berikut:

1. *Nelayan atau petani ikan penuh* yaitu nelayan atau petani ikan yang **seluruh waktu kerjanya** digunakan untuk melakukan pekerjaan

operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.

2. *Nelayan atau petani ikan sambilan utama* yaitu nelayan atau petani ikan yang **sebagian besar waktu kerjanya** digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.
3. *Nelayan atau petani ikan sambilan tambahan* yaitu nelayan atau petani ikan yang **sebagian kecil waktu kerjanya** digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.

Seiring berkembangnya prospek ekonomi usaha perikanan maka semakin memberikan peluang ke setiap orang untuk membuka usaha perikanan. Hal ini mendorong nelayan atau bukan nelayan untuk terjun di dunia perikanan. Istilah juragan atau nelayan pemilik juga masih menjadi polemik dalam menetapkan status pekerjaannya sebagai nelayan. Satria (2015) membagi kategori juragan atau nelayan pemilik menjadi dua yaitu juragan darat dan juragan laut. Juragan darat lebih identik pada pemilik modal dalam usaha perikanan yang tidak lagi melaut dan bahkan belum pernah melaut. Sedangkan juragan laut lebih cenderung bermakna sebagai nakhoda atau juru mudi. Secara tradisional istilah nelayan pemilik lebih mengacu kepada pemilik modal (perahu) yang benar-benar atau masih ikut dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Selain klasifikasi sebagai juragan, klasifikasi nelayan buruh juga menjadi sorotan apakah benar-benar nelayan yang menjalani aktivitas melakukan penangkapan ikan atau hanya

sebagai nelayan buruh yang hanya melayani nelayan lainnya. Misalnya juru masak yang hanya melayani kebutuhan persediaan makan dan minum bagi nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dalam sebuah armada.

Keragaman status nelayan tersebut muncul disebabkan terjadinya perkembangan usaha perikanan. Pollnac (Satria, 2015) membedakan nelayan menjadi dua kelompok nelayan yaitu nelayan besar (*large scala fisherman*) dan nelayan kecil (*small scala fisherman*) yang menitikberatkan perbedaan diantara kedua kelompok tersebut berdasarkan respon dalam mengantisipasi tingginya resiko dan ketidakpastian. Lebih lanjut, Satria (2015) menggolongkan kelompok nelayan menjadi 4 tingkatan berdasarkan tinjauan dari sisi kapasitas teknologi yang digunakan nelayan (armada dan alat tangkap perikanan), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi sebagai berikut:

1. *Peasant Fisher* (Nelayan Tradisional)

Pada kelompok ini nelayan biasanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Hasil tangkapan nelayan pada kelompok ini hanya dijual untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari (basic need) dan tidak memiliki target yang lebih besar seperti melakukan investasi untuk pengembangan usaha perikanan tangkap nelayan tersebut. Selain itu, armada perikanan tangkap yang digunakan hanyalah menggunakan sampan dayung (tidak bermotor) dan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.

2. *Post Peasant Fisher*

Kelompok nelayan ini telah menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti telah menggunakan motor temple atau kapal motor. Dengan armada yang menggunakan kapal motor tentunya memberikan peluang bagi nelayan untuk bisa menjangkau area atau titik ikan yang lebih jauh yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih besar. Pada umumnya tenaga kerja nelayan pada kelompok ini sudah meluas tanpa bergantung kepada anggota keluarga dan juga sudah mulai berorientasi pasar

3. Commercial Fisher

Pada kelompok ini, nelayan sudah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah membesar yang bercirikan jumlah tenaga kerja yang semakin besar dan memiliki status yang berbeda mulai dari buruh nelayan hingga manajemen. Teknologi yang digunakan nelayan kelompok ini juga sudah jauh lebih modern jika dibandingkan dengan *Post Peasant Fisher* dimana nelayan yang dimiliki membutuhkan keahlian yang baik untuk mengoperasikan kapal dan maupun teknologi alat tangkap yang digunakan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

4. Industrial Fisher

Pada kelompok ini Pollnac (Satria, 2015) menjelaskan bahwa

- a. Diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di Negara-negara maju;
- b. Secara relative lebih padat modal atau memiliki sumber modal yang banyak;

- c. Memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana baik untuk pemilik modal maupun awak kapal motor; dan
- d. Menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi atau memiliki kelas untuk di ekspor.

Tabel 2 1 Penggolongan Nelayan Berdasarkan Karakteristik Usaha

Jenis	Orientasi Ekonomi dan Pasar	Tingkat Teknologi	Hubungan Produksi
Usaha Tradisional	Subsistensi, Rumah Tangga	Rendah	Tidak Hierarki, Status terdiri dari ABK yang Homogen
Usaha Post Tradisional	Subsistensim, Surplus, Rumah Tangga, Pasar Domestik	Rendah	Tidak Hierarki, Status terdiri dari ABK yang Homogen
Usaha Komersial	Surplus, Pasar Domestik, Ekspor	Menengah	Hierarki, Status terdiri dari Pemilik, Manajemen, ABK yang Keterogen
Usaha Industrial	Surplus, Ekspor	Tinggi	Hierarki, Status terdiri dari Pemilik, Manajemen, ABK yang Keterogen

Sumber: Satria (2015)

Selain pengelompokkan nelayan yang disampaikan oleh Pollnac dan Satria tersebut diatas, berikutnya Charles (Satria, 2015) mengungkapkan bahwa adanya hubungan human system dengan aktivitas perikanan yang mana keseluruhan dari hubungan tersebut dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapaun yang termasuk dalam faktor internal adalah aspek sosial dan aspek lingkungan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek kebijakan pasar dan regulasi perikanan.

Jika melihat tipologi nelayan yang mengacu pada unsur ekologi (lingkungan), pola hubungan human systems dan aktivitas perikanan ini maka Charles (Satria, 2015) menetapkan kategori nelayan terbagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Subsistence fishers

Yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

2. Native atau Indigenous atau aboriginal fishers

Yaitu kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsisten.

3. Recreational fishers

Yaitu nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja.

4. Commercial fishers

Yaitu nelayan yang menangkap komoditas perikanan dalam memenuhi pasar domestic maupun ekspor, yang tergolong menjadi dua kategori yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.

2.9 KONSEP PEMBUDIDAYA

2.9.1 Definisi Pembudidaya Ikan

Berdasarkan PERMEN-KP (2016) bahwa Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

2.9.2 Menjalिन kerja sama

Hal yang perlu dilakukan para pelaku budidaya dalam menjalankan usahanya adalah menjalin kerja sama yang antar sesama pelaku usaha dan pihak atau lembaga lainnya yang dapat menunjang keberlangsungan aktivitas budi daya ikan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan informasi terkait upaya budidaya, kebutuhan pemenuhan produk, maupun mencari pangsa pasar.

Menurut Saparinto (2012) terdapat beberapa unsure penggerak usaha budidaya antara lain sebagai berikut:

1. pembudidaya ikan yaitu mencakup semua pembudidaya ikan di tingkat pembenihan hingga pemsaran, baik pembudidaya besar dengan lahan yang luas dengan menggunakan metode yang modern ataupun pembudidaya skala rumah tangga dengan lahan terbatas yang menggunakan metode murah seperti kolam terpal.
2. Pedagang ikan, yaitu semua pihak yang terkait dengan pemasaran hasil dari budidaya ikan baik secara langsung maupun secara tidak

langsung termasuk diantaranya adalah pedagang pengumpul, pedagang pengepul, pedagang penghubung, dan pedagang pengecer.

3. Penyedia sarana budidaya yaitu pedagang yang menyediakan kebutuhan untuk menunjang kegiatan usaha budidaya seperti pedagang pakan yang tentunya sangat dibutuhkan pembudidaya dalam menjalankan usaha budidaya ikannya.
4. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh pembudidaya karena tidak semua pembudidaya memiliki dana pribadi, khususnya pembudidaya yang berskala kecil yang memiliki modal sangat terbatas dan membutuhkan kehadiran lembaga keuangan untuk memperoleh penambahan modal usahanya melalui pinjaman seperti lembaga perbankan atau non-perbankan.

Jalinan kerjasama tersebut dapat terbentuk secara alami seiring dengan bentuk usaha dan adanya keinginan bersama untuk membentuk kelompok usaha bersama. Selain itu, adanya kebutuhan antara satu pihak dengan pihak lainnya juga dapat membentuk jalinan kerjasama seperti antara pembudidaya dengan pedagang, pembudidaya dengan penyedia pakan, dan juga antara pembudidaya dengan lembaga keuangan.

BAB III METODE DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

3.1.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif tepat digunakan untuk mengungkapkan sebuah realitas sosial seperti fenomena pemberian bantuan kepada nelayan tertamanya jika ingin melihat dampak pemberin bantuan tersebut pada pendapatannya. Jenis penelitian deskriptif sangat cocok dipadukan dengan metode kualitatif yang mampu menghasilkan data secaa mendalam, sehingga dengan data yang mendalam dapat dikeahui informasi-informasi menyeluruh yang berguna dalam pembuatan rumusan rekomendasi tindakan atau kebijakan.

3.1.2 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kawasan minapolitian yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Kab. Bintan No. 377/VIII/2010 yang meliputi Kecamatan Bintan Timur, Bintan pesisir dan Kecamatan Mantang.

3.1.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang akan digunakan dalam penelittian ini meliputi data primer dan data skunder.

Data primer akan terdiri dari data:

1. Data wawancara dengan nelayan penerima bantuan

2. Data wawancara dengan Lokan asosiasi nelayan
3. Data wawancara dengan pendamping yang disiapkan oleh pemda (Jika ada) dalam rangka pemberian bantuan
4. Data survey pendapatan nelayan yang telah menerima bantuan dari pemkab

Data skunder akan terdiri dari data:

1. Data jumlah nelayan di kabupaten bintang berdasarkan aktivitas kerja (nelayan bubu ikan, ketam, gonggong dll, nelayan kerambah, nelayan laut dll)
2. Data nelayan penerima bantuan kabupaten bintang time series
3. Data jenis alat bantuan kepada nelayan di kab. Bintang
4. Data pendapatan nelayan di kab. Bintang
5. Data Dasar-dasar pelaksanaan program pemberian bantuan kepada nelayan (berupa kebijakan dan pertimbangan-pertimbangannya).
6. Data prosedur pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan

3.1.4 TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik:

1. Wawancara
2. Kuisisioner
3. Observasi
4. Focus Group Discussion (FGD)

Sedangkan alat pengumpulan data berupa:

1. Daftar pertanyaan
2. Angket
3. Catatan Harian
4. Recorder

3.1.5 POPULASI DAN SAMPEL / INFORMAN PENELITIAN

Adapun populasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 1 Populasi dan Sampel

No.	Kategori	Populasi
1	Nelayan Tangkap	123
2	Budidaya Perikanan	91
Total Populasi		217

Sedangkan dalam penelitian ini yang akan informannya adalah

1. Nelayan penerima bantuan
2. Ketua asosiasi-asosiasi nelayan (Jika Ada)

3. Dinas kelautan dan perikanan (pejabat yang membidangi) atau berkaitan dengan pembagian bantuan)
4. Kecamatan Bintan timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang (Jika berhubungan dan dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan)
5. Kelurahan atau desa dimana nelayan penerima bantuan berdomisili (Jika berhubungan dan dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan)
6. Pendamping atau penyuluh program (Jika ada)
7. Ahli perikanan (Jika diperlukan)

3.1.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dan teknik statistik deskriptif. Teknik analisa data kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif sehingga hasil akhir dari proses analisa ini akan menghasilkan informasi berupa penjelasan-penjelasan mengenai dampak pemberian bantuan bagi nelayan di kawasan minapolitan Kabupaten Bintan. Sedangkan analisa statistik deskriptif diperlukan untuk menggambarkan kondisi yang dialami nelayan pasca pemberian bantuan dengan menggunakan data-data sekunder. Untuk mendapatkan validasi data kuliitatif yang baik penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

3.2 JADUAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan jadwal berikut ini:

Tabel 3 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

N O	JENIS KEGIATAN	BULAN																			
		AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persiapan Penelitian	■	■																		
2	Laporan Pendahuluan			■																	
3	Persiapan Survey/Turun Lapangan				■	■															
4	Proses Pengumpulan Data					■	■	■	■	■											
5	Pengolahan Data dan Analisa Data										■	■	■	■							
6	Laporan Antara															■					
7	Masa Revisi/Perbaikan																■	■		■	
8	Laporan Akhir																		■	■	

3.3 TENAGA AHLI

Penelitian ini dilaksanakan oleh tim kerja yang berjumlah empat (4) orang sebagai berikut:

- **Rianto, S.Sos., MA.** Dosen program studi sosiologi STISIPOL Raja Haji. Bidang Keahlian rekayasa sosial, Sosiologi Masyarakat Kepulauan dan pesisir.
- **Ferizone, S.Sos., MPM.** Dosen program studi administrasi publik STISIPOL Raja Haji. Bidang keahlian manajemen sosial dan kebijakan publik.
- **Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM.** Dosen program studi administrasi publik STISIPOL Raja Haji. Bidang keahlian Manajemen Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Keuangan Publik.
- **Junriana, S.Sos., MPM.** Dosen program studi ilmu pemerintahan STISIPOL Raja Haji. Bidang keahlian pemberdayaan masyarakat desa dan politik lokal.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan dahulunya merupakan sebuah wilayah yang dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan Riau pada saat wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih berada di naungan Provinsi Riau. Berdasarkan Undang-Undang No.53 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur. Pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak ditetapkannya peraturan perundangan ini, maka secara resmi wilayah Kepulauan Riau terpisah dari Provinsi Riau.

Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 6 Kecamatan, yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong, dan Tambelan. Berdasarkan PP No.5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan terletak antara $0^{\circ}6'17''$ Lintang Utara – $1^{\circ}34'52''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}12'47''$ Bujur Timur di sebelah Barat – $108^{\circ}2'27''$

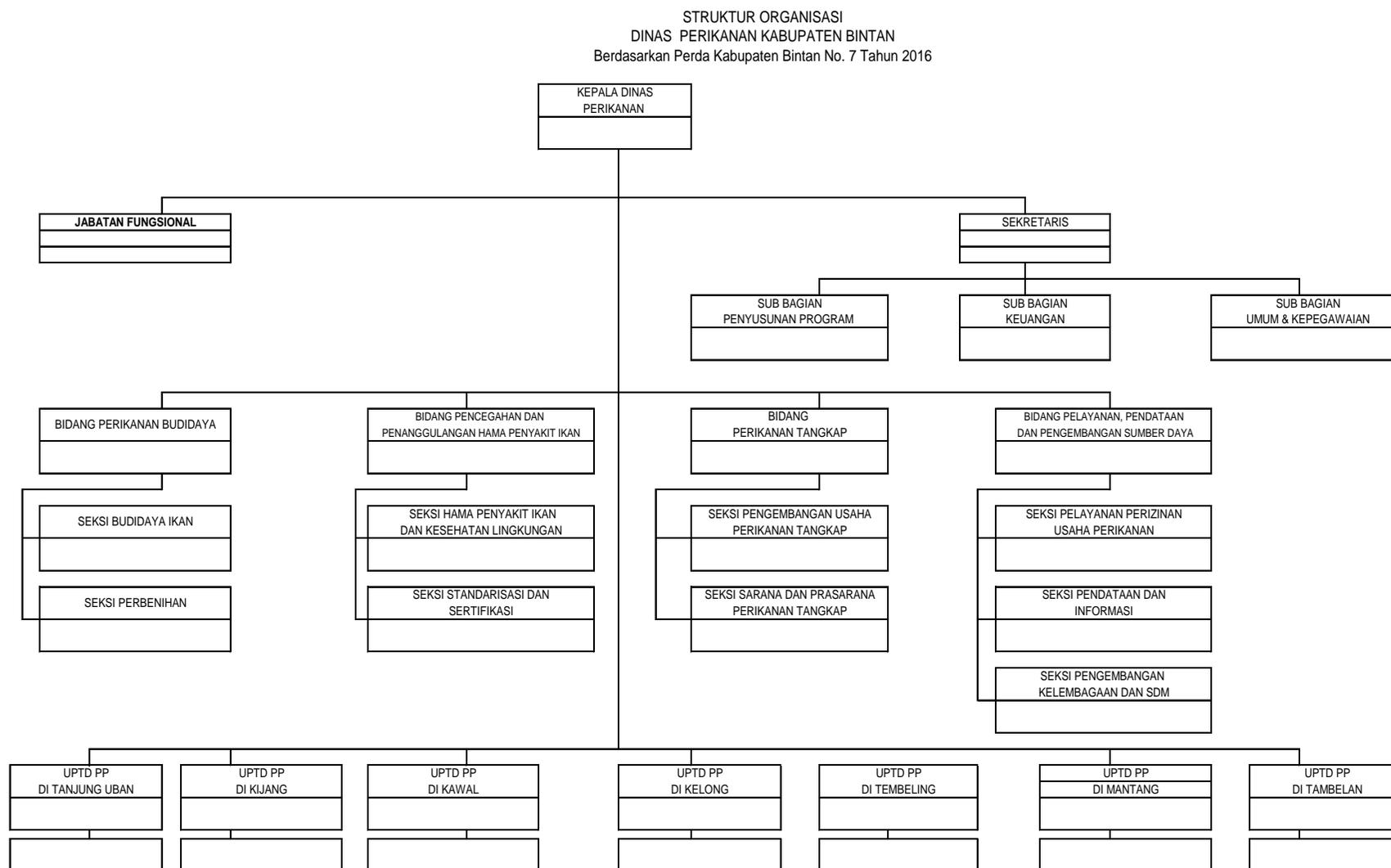
Bujur Timur sebelah Timur. Kabupaten Bintan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut, *sebelah utara*, berbatasan dengan Kabupaten Natuna, *sebelah selatan*, berbatasan dengan Kabupaten Lingga, *sebelah barat*, berbatasan dengan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, *sebelah timur*, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 km² saja. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 503,12 Km², dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tambelan yaitu 169,42 km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian khususnya perkebunan.

Bandar Seri Bentan merupakan Ibu Kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan. Saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan yaitu, Kecamatan Teluk Bintan, Seri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, dan Tambelan. Tambelan merupakan ibu kota Kecamatan Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 337 mil, sedangkan Tembeling yang terletak di satu kecamatan dengan Ibu Kota kabupaten Bintan yaitu di Kecamatan Teluk Bintan memiliki jarak yang paling dekat yaitu 1 km.

Pada tahun 2014 penduduk Bintan tercatat 151.123 jiwa dengan kepadatan 78 jiwa per km². Dibandingkan dengan tahun 2013 penduduk bertambah sebanyak 2.003 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 1,34 persen. Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap

Gambar 4 2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabuoaten Bintan



Perda Kab. Bintan No.7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah di undangkan oleh pt. Sekretaris Daerah Kab. Bintan tanggal 25 Nopember 2016.

Adapun tugas, pokok dan fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

4.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta perumusan kebijakan daeran di bidang perikanan. Adapun fungsi Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Perikanan Budidaya, Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan, Perikanan Tangkap, Pelayanan dan Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perikanan Budidaya, Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan, Perikanan Tangkap, Pelayanan dan Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Pelaksanaan adminsitration Dinas Perikanan.
- d. Pelaksanaan fasilitasi urusan kelautan yang berada diwilayah Kabupaten Bintan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perikanan Budidaya, Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan, Perikanan Tangkap, Pelayanan Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang dilingkungan Dinas. Adapun fungsi Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah.
- c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, kehumasan/keprotokolan serta barang milik daerah pada Dinas serta UPTD.
- d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran.
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4.2.3 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan.
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.4 Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi di bidang Perikanan Budidaya. Adapun fungsi Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya.
- b. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan penyiapan pengembangan usaha Perikanan Budidaya dan Pembenihan.
- d. Penyelenggaraan pengembangan usaha Perikanan Budidaya.
- e. Penyelenggaraan pengembangan Pembenihan.

- f. Penyusun petunjuk teknis terkait dengan bantuan hibah barang kepada kelompok / masyarakat di bidang budidaya.
- g. Pelaksanaan analisa usaha pembudidaya ikan, bimbingan permodalan, pembinaan pengembangan pemasaran perikanan.
- h. Pelaksanaan inventarisasi, analisis produksi perikanan, pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya.
- i. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi, pengujian lapangan atas sarana produksi serta menyusun pola pengembangan produksi perikanan budidaya.
- j. Pengelolaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran bidang Perikanan Budidaya.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Perikanan Budidaya, sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.4.1 Kepala Seksi Budidaya Ikan

Kepala Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan usahan budidaya ikan.
- b. Menyusun program kerja dan kebijakan teknis budidaya ikan.
- c. Menyiapkan bahan kerja pengembangan budidaya ikan.

- d. Melaksanakan kebijakan teknis pembudidayaan ikan.
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
- f. Melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- g. Memberikan bimbingan, pemantauan, dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
- i. Menerapkan standarisasi dan sertifikasi kelayakan usaha budidaya.
- j. Melaksanakan kebijakan penataan keramba jaring apung dan tancap di perairan umum dan wilayah laut.
- k. Memberikan rekomendasi / pertimbangan teknis tentang penerbitan izin pengembangan usaha budidaya perikanan.
- l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- m. Menyusun bahan informasi teknologi pengembangan budidaya ikan.
- n. Melaksanakan bimbingan teknologi perikanan budidaya ikan.
- o. Melaksanakan bimbingan teknologi perikanan budidaya, mengatur dan menyiapkan pola budidaya ikan yang baik.
- p. Penyebarluasan bahan informasi teknologi perikanan budidaya ikan.
- q. Melaksanakan pembinaan tatalahan dan kawasan perairan pembudidayaan ikan.

- r. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.4.2 Kepala Seksi Pembenihan

Kepala Seksi Pembenihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pembenihan.
- b. Menyusun program kerja dan kebijakan teknis pembenihan.
- c. Menyiapkan bahan kerja pengembangan pembenihan.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis pembenihan.
- e. Melaksanakan kebijakan mutu benih / induk ikan.
- f. Melaksanakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar dan laut.
- g. Melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan.
- h. Melaksanakan teknik perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
- i. Melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi
- j. Melaksanakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk / benih ikan.
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UPR dan HSRT.
- l. Memberikan rekomendasi / pertimbangan teknis pembenihan.

- m. Melaksanakan bimbingan teknologi pembenihan.
- n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- o. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undang sesuai bidang tugasnya.
- p. Melaksanakan perencanaan kebutuhan fisik, sarana dan prasarana budidaya perikanan.
- q. Melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan prasarana pembudidayaan ikan.
- r. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung / penunjang perikanan budidaya.
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Seksi Pembenihan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.5 Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit

Ikan

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan Hama Penyakit Ikan. Adapun fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan.
- b. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Pengelolaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan.
- d. Penyusunan konsep naskah dinas yang menyangkut urusan bidang pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan.
- e. Pelaksanaan analisa pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit ikan serta kesehatan lingkungan perikanan budidaya.
- f. Pelaksanaan inventarisasi hama dan penyakit ikan dilingkungan perikanan budidaya.
- g. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana penanggulangan hama dan penyakit ikan, kesehatan lingkungan perikanan budidaya serta menyusun pola pencegahannya.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan bidang pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.5.1 Kepala Seksi Hama Penyakit Ikan Dan Kesehatan Lingkungan

Kepala Seksi Hama Penyakit Ikan Dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan kegiatan Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan.
- b. Menyusun program kerja dan kebijakan teknis hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan.
- c. Menetapkan criteria hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan.
- d. Menyusun SOP penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta melakukan sosialisasi kepada pembudidaya ikan.
- e. Menyusun daftar dan kegunaan obat ikan sesuai standar KKP dan didistribusikan ke pmebudidaya ikan.
- f. Menyusun daftar pakan ikan sesuai daftar KKP dan didistribusikan ke pmebudidaya ikan.
- g. Memberikan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan diagnosis atau identifikasi pathogen penyebab wabah penyakit ikan dan bila memungkinkan dengan disertai tanda-tanda klinis atau informasi lain yang mendukung diagnosis / idnetifikasi.
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pemantauan perkembangan wabah dan pengambilan sampel ikan sakit atau diduga terinfeksi penyakit didaerah sentra budidaya ikan.

- j. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan / atau pengadaan infrastruktur (sarana dan prasarana) pengendalian, penanganan dan penanggulangan hama dan wabah penyakit ikan.
- k. Melaksanakan koordinasi dalam sosialisasi petunjuk teknis dan penyuluhan pengendalian dan penanggulangan hama dan wabah penyakit ikan.
- l. Melaksanakan perumusan usulan rekomendasi kebijakan penetapan daerah wabah penyakit ikan yang terjadi lintas kabupaten/kota berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring perkembangan wabah penyakit ikan.
- m. Melaksanakan koordinasi dan penyeliaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan wabah penyakit ikan serta menumbuhkan jaringan kerja dengan instansi terkait.
- n. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pengendalian, penanggulangan dan pencegahan serta evaluasi hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan.
- o. Melaksanakan pencatatan dan pemetaan sebaran hama dan penyakit ikan.
- p. Mendorong pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelompok pembudidaya ikan (pelaku usaha budidaya ikan) di sentra-sentra budidaya untuk mewujudkan pengendalian dan penanggulangan hama dan wabah penyakit ikan berbasis masyarakat.
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan seksi kesehatan ikan dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.

- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.5.2 Kepala seksi standarisasi dan sertifikasi

Kepala seksi standarisasi dan sertifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi.
- b. Menyusun program kerja dan kebijakan teknis Standarisasi dan Sertifikasi.
- c. Melaksanakan perencanaan kebutuhan fisik, sarana dan prasarana untuk Standarisasi dan Sertifikasi.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran seksi Standarisasi dan Sertifikasi.
- e. Menyiapkan bahan kerja Standarisasi dan Sertifikasi.
- f. Melaksanakan kebijakan teknis Standarisasi dan Sertifikasi.
- g. Melaksanakan kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi.
- h. Menyusun standar operasional prosedur budidaya pembesaran ikan dan pembenihan.
- i. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi usaha budidaya pembesaran dan pembenihan kelompok/perorangan yang telah / belum sesuai dengan standar operasional prosedur.
- j. Mengusulkan kelompok usaha pembudidaya pembesaran dan pembenihan untuk disertifikasi.

- k. Melaksanakan penelaahan terhadap aturan yang terkait dengan teknis budidaya ikan dan pembenihan.
- l. Melaksanakan pelatihan Standarisasi dan Sertifikasi.
- m. Menyusun rencana target perolehan sertifikasi terhadap pelaku usaha budidaya pembesaran dan pembenihan.
- n. Menyusun dan mendistribusikan informasi Standarisasi dan Sertifikasi budidaya pembesaran ikan dan pembenihan.
- o. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap Standarisasi dan Sertifikasi kepada masyarakat pelaku usaha budidaya ikan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan seksi Standarisasi dan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- r. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai dengan tugasnya.
- s. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan seksi Standarisasi dan Sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.6 Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi di bidang Perikanan Tangkap. Adapun fungsi Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap.
- b. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan usaha perikanan tangkap, sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap serta pengendalian perikanan tangkap.
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi bidang perikanan tangkap.
- e. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.
- f. Penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- g. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang perikanan tangkap.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.6.1 Kepala seksi pengembangan usaha perikanan tangkap

Kepala seksi pengembangan usaha perikanan tangkap mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap.
- b. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengembangan usaha perikanan tangkap.
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan usaha perikanan tangkap.
- d. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan.
- e. Melaksanakan penyusunan bahan standarisasi registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum.
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan logistic penangkapan.
- g. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan nelayan kecil di wilayah laut dan perairan umum.

- h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut.
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran fisik kapal dan izin perikanan ukuran di bawah 5 GT.
- j. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan usaha perikanan tangkap di wilayah laut dan perairan umum.
- k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- l. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana penangkapan.
- m. Melaksanakan pelaporan dan kegiatan evaluasi seksi pengembangan usaha perikanan tangkap.
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.6.2 Kepala Seksi Sarana Dan Prasara Perikanan Tangkap

Kepala Seksi Sarana dan Prasara Perikanan Tangkap mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan perencanaan kegiatan Sarana dan Prasara Perikanan Tangkap.
- b. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Sarana dan Prasara Produksi Perikanan Tangkap.

- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan system informasi potensi sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan).
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap.
- e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan.
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi teknis prasarana penangkapan di wilayah laut dan perairan umum.
- g. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tata operasional pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan dan koordinasi kesyahbandaran.
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan jasa-jasa pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan.
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi teknis pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- k. Melaksanakan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.7 Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Kepala Bidang Pelayanan Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsi di bidang Pelayanan Pendataan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Pelayanan Pendataan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Penyelenggaraan bimbingan, dan fasilitasi pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Penyelenggaraan dan penguatan data dan informasi perikanan.
- e. Penyelenggaraan bimbingan, pengembangan dan fasilitasi kemitraan dan kelembagaan.
- f. Penyelenggraan pengembangan sumber daya masyarakat perikanan.

- g. Penyelenggaraan koordinasi terkait bidang pelayanan dan pengembangan sumber daya masyarakat dengan pihak-pihak terkait.
- h. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dan pengembangan sumber daya masyarakat.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.7.1 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan.
- b. Melaksanakan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis pelayanan rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan.
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis pelayanan investasi sector perikanan.
- d. Melaksanakan penyusunan dan saran pertimbangan teknis pelaksanaan pengutan/retribusi hasil perikanan.
- e. Melaksanakan penyusunan dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan terkait perizinan, rekomendasi izin dan investasi sector perikanan.

- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta pelaporan kegiatan pelayanan perizinan usaha perikanan, rekomendasi izin usaha perikanan dan pelayanan investasi sector perikanan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.7.2 Kepala Seksi Pendataan dan Informasi

Kepala Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan perikanan.
- b. Melaksanakan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis desiminasi informasi perikanan.
- c. Melaksanakan penyusunan dan kebijakan pendataan perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan system informasi unit usaha perikanan skala kecil, menengah, besar, eksportir dan industry perikanan, potensi pasar local dan ekspor baik manual maupun digital.
- d. Melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan data dan informasi sector perikanan.
- e. Melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan data dan informasi dan peluang investasi dan pasar hasil perikanan.

- f. Melaksanakan promosi usaha perikanan melalui pameran, bazar, expo, festival, demo, temu usaha, dan lainnya.
- g. Melaksanakan penyusunan dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pendataan dan informasi.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.2.7.3 Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan masyarakat perikanan.
- b. Melaksanakan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya masyarakat perikanan.
- c. Melaksanakan kegiatan dan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan kemitraan kelembagaan usaha perikanan kecil, menengah, besar, eksportir dan industri perikanan, termasuk usaha konservasi dan pengawasan.

- d. Melaksanakan penyusunan dan fasilitas permodalan, manajemen usaha, koperasi dan perusahaan perikanan, teknis kerjasama dan atau kemitraan usaha
- e. Melaksanakan penyusunan dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

4.3 Kawasan Minapolitan

Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan minapolitan yang mencakup wilayah kecamatan Bintan Pesisir, kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Mantang. Berikut profil dari kecamatan-kecamatan tersebut:

4.3.1 Kecamatan Bintan Pesisir

4.3.1.1 Topografi dan Wilayah administrasi

Wilayah Kecamatan Bintan Pesisir terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai di bagian pantai. Kecamatan Bintan Pesisir memiliki Topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar 0 – 3 % hingga diatas 40 % pada wilayah pegunungan. Sedangkan ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kecamatan Bintan Pesisir antara 0 – 50 meter diatas

permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400 an meter diatas permukaan laut.

Luas Wilayah Kecamatan Bintan Pesisir \pm 2.174 Km terdiri dari daratan \pm 234 Km² dan Lautan \pm 1.940 Km². Luas daratan dari Kecamatan Bintan Pesisir hanya 11 % dari total luas wilayah seluruhnya. Jumlah Pulau-pulau yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir berjumlah 54 Pulau yang menyebar pada wilayah Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan dengan jumlah pulau yang banyak ini terdiri dari pulau-pulau yang berpenghuni maupun masih kosong. Adapun pulau yang sudah dihuni berjumlah 15 pulau , sedangkan pulau yang belum dihuni berjumlah 39 pulau. Sedangkan jumlah kampung yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir sebanyak 20 Kampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2007, maka wilayah Kecamatan Bintan Pesisir terdiri dari 4 (empat) Desa. Ibukota Kecamatan Binatan Pesisir terletak di Desa Kelong. Empat Desa yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir yaitu :

- Desa Kelong
- Desa Mapur
- Desa Numbing
- Desa Air Glubi

4.3.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan jumlah penduduk Kecamatan Bintan Pesisir sampai dengan Bulan Mei 2018 sebesar 7.581 Jiwa. Penduduk tersebar di 4 (empat) kelurahan/desa dengan jumlah penduduk paling banyak terdapat di desa Numbing yaitu 2.644 jiwa atau sekitar 35 persen dari keseluruhan jumlah penduduk kecamatan Bintan Pesisir.

Tabel. 4.1
Jumlah Pendudukan di Kecamatan Bintan Pesisir
Berdasarkan Desa / Kelurahan di Kecamatan Bintan Pesisir

Desa/Kelurahan	Luas Darat (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin
(1)		(2)	(3)
01. Mapur	44	33,29	199
02. Numbing	53	49,87	115
03. Kelong	57	42,60	103
04. Air Glubi	80	13,05	112

Tabel. 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Bintan Pesisir Berdasarkan jenis
Desa / Kelurahan dan jenis kelamin

Desa / Kelurahan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Mapur	975	490	1465
02. Numbing	1.413	1.231	2.644
03. Kelong	1.232	1.196	2.428
04. Air Glubi	551	493	1044
J u m l a h	4.171	3.410	7.581

4.3.1.3 Perikanan

Karena letak geografis yang berupa kepulauan dan pesisir, Kecamatan Bintan Pesisir berpotensi menjadi daerah penangkapan ikan. Dapat dilihat dari adanya rumah tangga perikanan dan volume produksi perikanan di kecamatan Bintan Pesisir.

Tabel. 4.3
Rumah tangga perikanan di kecamatan Bintan Pesisir

Jenis Produksi	Jumlah Rumah Tangga Perikanan
(1)	(2)
Penangkapan	1.698
Budidaya Laut	202
Budidaya Air Payau	-
Budidaya Air Tawar	-
Total	1.891

Tabel. 4.4
Potensi Budidaya Perikanan di Kecamatan Bintan Pesisir

Jenis Produksi	Luas Lahan Potensi (Ha)
(1)	(2)
Budidaya Laut (Keramba)	2.987
Budidaya Laut (Rumput Laut)	1.205,65
Budidaya Air Tawar	-
Total	4.192.65

4.3.2 Bintang Timur

4.3.2.1 Topografi dan Wilayah administrasi

Total luas wilayah Kecamatan Bintang Timur mencapai luas daratan Km² 239,41. Luas wilayah ini dibagi menjadi 4 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Gunung Lengkuas dan Kelurahan Sungai Lekop yaitu sebesar 81,50 Km², sedangkan kelurahan yang paling kecil adalah Kelurahan Kijang Kota yaitu sebesar 23,91 Km². Kelurahan Kijang Kota merupakan wilayah yang paling dekat dengan Kantor Kecamatan karena jaraknya kurang dari 1 Km.

Kijang merupakan Ibukota Kecamatan Bintang Timur yang berjarak ± 49 Km ke Ibukota Kabupaten Bintang Buyu, Adapun Kelurahan Gunung Lengkuas yang terjauh dari Ibukota kecamatan dan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Kecamatan Bintang Timur merupakan salah satu kecamatan dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintang. Sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Bintang, Kecamatan Bintang Timur memiliki dukungan dan andil yang besar bagi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintang. Keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di daerah ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pendayagunaan yang tepat dengan memperhitungkan potensi sumber daya manusia. Kecamatan Bintang Timur terdiri dari 4 (empat) kelurahan, adapun pemerintahan di tingkat terendah yaitu RT berjumlah 139 kemudian di ikuti RW sejumlah 38.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lur yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati / walikota. Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui camat.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Lembaga lain yang dimaksudkan adalah lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Di kecamatan Bintang Timur terdapat 4 (empat) LPM yang berkedudukan di kelurahan. LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Tabel. 4.5
Luas wilayah Kecamatan Bintang Timur

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	
	Daratan	Lautan
(1)	(2)	(3)
01. Kijang Kota	23,91	-
02. Gunung Lengkuas	81,50	-
03. Sungai Lekop	81,50	-
04. Sungai Enam	52,50	-
J u m l a h	239,41	-

4.3.2.2 Kependudukan

Berdasarkan data kelurahan yang ada di Kecamatan Bintan Timur, diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bintan Timur per 1 Januari 2018 tercatat sebanyak 47.763 jiwa yang terdiri dari 24.926 jiwa laki-laki dan 22.837 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 109 yang berarti diantara 109 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga sebesar 13.178 KK, yang berarti rata-rata per KK terdiri dari 3,6 jiwa.

Tabel. 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kecamatan Bintan Timur

Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Ratio
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1 Kijang Kota	15.231	13.862	29.093	110
2 Gunung Lengkuas	3.613	3.203	6.816	113
3 Sungai Lekop	4.711	4.452	9.163	106
4 Sungai Enam	1.371	1.320	2.691	104
Total	24.926	22.837	47.763	109

Jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diimbangi dengan sebaran penduduk. Berdasarkan data kelurahan yang ada di Kecamatan Bintan Timur, jumlah penduduk terpadat tercatat di Kelurahan Kijang Kota yaitu 1.217 jiwa per km², dan Kelurahan Sungai Enam memiliki sebaran penduduk terkecil yaitu 51 jiwa per km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kijang Kota yaitu sebesar 26.093 jiwa diantaranya

15.231 jiwa laki-laki dan 13.862 jiwa perempuan. Terbanyak kedua adalah Kelurahan Sungai Lekop sebanyak 9.163 jiwa, Kelurahan Gunung Lengkuas sebesar 6.816 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Sungai Enam yaitu sebesar 2.691 jiwa.

4.3.2.3 Pertanian

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor tersebut mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas dan kacang tanah. Secara keseluruhan tanaman bahan makanan di kecamatan Bintan Timur mengalami penurunan baik dari segi luas tanam, luas panen maupun produksi tanaman pangan itu sendiri. Jika dilihat pada tahun 2017 luas tanam ubi kayu lebih besar dari pada luas tanam jagung, akan tetapi hasil jagung lebih banyak di banding ubi kayu.

Tabel. 4.7
Luas tanaman, panen dan produksi pertanian di Kecamatan Bintan Timur

Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Padi	-	-	-
2. Jagung	30	24	504
3. Ubi Kayu	30	16	3.360
4. Ubi Jalar	-	-	-
5. Talas	-	-	-
6. Kacang Tanah	-	-	-
2017	60	40	3.864

Luas lahan potensi untuk tanaman hortikultura di kecamatan Bintan Timur seluas 624 Ha terdiri dari 253 Ha untuk tanaman sayur-sayuran dan 371 untuk tanaman buah-buahan. Dari luas 624 Ha tersebut tanaman yang luas panen sekitar 228 Ha untuk tanaman sayuran dan 160 Ha untuk tanaman buah-buahan.

Tabel. 4.8
Luas tanam sayur-sayuran di Kecamatan Bintan Timur Berdasarkan Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi

Jenis Sayuran	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kacang Panjang	66	66	2.358
2. Cabe Besar	24	18	557
3. Cabe Rawit	12	8	106
4. Terung	2	2	65
5. Ketimun	36	43	3.300
6. Kangkung	54	35	4.000
7. Bayam	40	39	8.500
8. Sawi	5	5	150
9. Buncis	5	7	80
10. Seledri	-	-	-
11. Petai	9	5	24
2017	253	228	19.140

4.3.2.4 Perikanan

Rumah tangga perikanan dan produksi perikanan di kecamatan Bintan Timur mengalami kenaikan sebesar 25,87 persen dan 44,5 persen. Pengurusan izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam tahun 2017 untuk usaha penangkapan sebanyak 183 surat izin, pengumpul 22 surat izin,

pengangkutan 7 surat izin dan budidaya 7 surat izinan 147 surat izin penangkapan. Kelembagaan sebanyak 21 beranggotakan 180 orang, dan jenis kelembagaan 2 unit Koperasi Unit Desa (KUD) yang beranggotakan 91 orang.

Tabel. 4.9

Rumah tangga perikanan, potensi lahan dan volume produksi perikanan menurut jenis usaha perikanan di kecamatan Bintan Timur tahun 2017

Jenis Usaha Perikanan	Ruta Perikanan		Potensi Lahan (Ha)		Produksi (ton)	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Penangkapan	1.860	2.572	0	0	7.227	13.044
2 Budidaya Air Laut	40	88	237,65	238	19,89	22,63
3 Budidaya Air Tawar	186	154	91,18	91,18	70,35	981,14
Jumlah	2.086	2.814	328,18	329,18	7.317,24	14.047,77

Tabel. 4.10

Nilai Produksi Perikanan, Pendapatan Perikanan menurut Jenis Usaha Perikanan di Kecamatan Bintan Timur, Tahun 2017

Jenis Usaha Perikanan	Nilai Produksi (Juta)		Pendapatan (Juta)	
	2012	2017	2012	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Penangkapan	66,390	189,090	3.376	3.807.580
2 Budidaya Air Laut	1,673.10	3.562,45	6.639	6.639.286
3 Budidaya Air Tawar	1183.5	5.287,83	2.817	4.670.000
Jumlah	69,246.12	9,039,37	12.832	15.116.866

Tabel. 4.11
Volume Pemasaran dan Nilai Pemasaran Perikanan menurut Jenis Pemasaran Perikanan di Kecamatan Bintan Timur Tahun 2017

Uraian	Jenis Pemasaran					
	Ekspor		Antar Pulau		Jumlah	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017
(1)	(2)	(3)		(4)		
Vol. Pemasaran (Ton)	3.264,68	11.243,24	3.245,01	1.210,50	6.509,6	12.453,3
Nilai Pemasaran (Juta)	13.944,67	12.172,63	17.263,7	14.268,13	31.208,52	14.268,14

4.3.3 Kecamatan Mantang

4.3.3.1 Topografi dan Wilayah administrasi

Kecamatan Mantang merupakan salah satu kecamatan termuda di Kabupaten Bintan. Kecamatan ini hasil pemekaran dari wilayah kecamatan Bintan Timur yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Bintan (Peraturan Daerah No.12/2007). Kecamatan Mantang bertekad membangun daerahnya dengan Visi dan Misi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu. Kecamatan Mantang berusaha menciptakan iklim investasi dengan memberdayakan berbagai potensi yang dapat menggambarkan kondisi sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh pihak Kecamatan Mantang dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

Kecamatan Mantang terdiri dari 4 Desa yaitu:

- Desa Mantang Lama
- Desa Mantang Besar
- Desa Mantang Baru
- Desa Dendun

Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Mantang dari permukaan laut yaitu : $\pm 0 - 200$ m² dengan luas $\pm 1.223,10$ Km² dengan curah hujan pertahunnya 1.500 dengan kecepatan angin rata-rata 1.200 Ms dengan maksimum 360C dengan suhu minimum 240C.

Kecamatan Mantang sebagian besar terletak di PulauMantang. Pulau-pulau yang ada di Kecamatan Mantang saat initerdiri dari 39 pulau, dimana 14 diantaranya sudah dihuni dan 25yang lain merupakan pulau-pulau kecil yang masih kosong belumdihuni. Wilayah Kecamatan Mantang merupakan wilayahkelautan sehingga luas laut lebih besar dibandingkan dengan luasdaratan. Luas daratan Kecamatan Mantang adalah + 114,00 Km², sedangkan luas laut jauh lebih besar dibandingkan luas daratanyaitu sebesar +1.109,10 Km² sehingga total luas Kecamatan Mantang sebesar +1.223,10 Km².

Mantang Lama merupakan Ibu Kota Kecamatan Mantang yang terletak di Desa Mantang Lama . Desa terdekat ke ibukotakecamatan adalah desa Mantang Lama yang berjarak ± 1 km, desaMantang Besar dan desa mantang baru juga berjarak + 1 Km, sedangkan Desa Dendun berjarak lurus + 2 Km. Jarak dari Ibu kota Kecamatan mantang ke Ibukota kabupaten + 60 Km.

Tabel. 4.12
Jumlah Pulau yang Ada di Kecamatan Mantang Dirinci menurut
Desa/kelurahan, Tahun 2017

Desa/Kelurahan	Jumlah Pulau	
	Berpendhuni	Tak Berpendhuni
(1)	(2)	(3)
01. Mantang Lama	8*	10
02. Mantang Besar	4*	4
03. Mantang Baru	0*	2
04. Dendun	2	9
J u m l a h	14	25

Sumber : Kantor Camat Mantang

*) termasuk Pulau Mantang

4.3.3.2 Kependudukan

Data statistik kependudukan diambil dari Hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2017 yang merupakan hasil rekapan masing-masing Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk seperti yang tersaji dibawah ini. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan masih belum lancarnya kegiatan registrasi penduduk, sebagai akibat banyaknya hambatan dalam pelaksanaan. Oleh sebab itu upaya untuk mengembangkan sistem registrasi penduduk yang lebih baik lagi di Kecamatan Mantang perlu dilakukan demi terlaksananya tertib pencatatan penduduk. Disamping itu kegiatan pengecekan data dan sekaligus pembinaan pelaksanaan kegiatan registrasi penduduk sampai ke tingkat Desa/Kelurahan serta kedisiplinan penduduk

sendirisangat diperlukan dalam menunjang usaha guna mendapatkandata kependudukan yang lengkap dan terpercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Tabel. 4.13
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Akhir Tahun, Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mantang, Tahun 2017

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Mantang Lama	37,00	930	25
02 Mantang Besar	48,00	1400	29
03 Mantang Baru	11,00	1007	91
04 Dendun	18,00	1062	59
2017	114,00	4.399	38
2016	114,00	4.453	39
2015	114,00	4.335	38
2014	114,00	4.323	37

4.3.3.3 *Pertanian*

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor tersebut mencakup tanaman :

- Padi
- Jagung
- Ubi kayu
- Ubi jalar
- Talas

- Kacang tanah

Pada tahun 2017 Kecamatan Mantang tidak memiliki luas lahan potensi padi, Kecamatan ini hanya mempunyai luas lahan potensi palawija dan luas lahan yang di usahakan seluas 5 Ha.

Kecamatan Mantang memiliki luas lahan potensi hortikultura sayur-sayuran 13 Ha, dari seluruh lahan potensi kesemuanya diusahakan untuk penanaman tanaman hortikultura. Untuk hortikultura buah-buahan yang diusahakan sebesar 5 Ha.

4.3.3.4 Perikanan

Karena letak geografis yang berupa kepulauan dan pesisir daerah ini juga berpotensi menjadi daerah penangkapan ikan. Seiring dengan kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan yang menggalakkan usaha budidaya maka di Kecamatan Mantang telah bermunculan usaha-usaha pembudidayaan ikan di dalam keramba salah satunya terpusat di pulau Sirai desa mantang besar yang dikelola oleh beberapa kelompok usaha bersama maupun perorangan.

Tabel. 4.14
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenis Produksi di
Kecamatan Mantang, Tahun 2017

Jenis Produksi	Jumlah Rumah Tangga Perikanan
(1)	(2)
01 Penangkapan	1.571
02 Budidaya Laut	286
03 Budidaya Air Payau	-
04 Budidaya Air Tawar	-
2017	1.857
2016	1.678
2015	1.431
2014	1.457

Tabel. 4.15
Volume Produksi Perikanan Menurut Jenis Produksi di Kecamatan
Mantang, Tahun 2017

Jenis Produksi	Volume Produksi Perikanan (Ton)
(1)	(2)
01 Penangkapan	6.957,19
02 Budidaya Laut	207,18
03 Budidaya Air Payau	-
04 Budidaya Air Tawar	-
2017	7.164.37
2016	7.070.74
2015	6.278.93
2014	5.818.44

Tabel. 4.16
Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Produksi di Kecamatan
Mantang, Tahun 2017

Jenis Produksi	Nilai Produksi Perikanan (Juta Rp)
(1)	(2)
01 Penangkapan	6.858.220,00
02 Budidaya Laut	25.221,60
03 Budidaya Air Payau	-
04 Budidaya Air Tawar	-
2017	6.883.441,60
2016	150.329,00
2015	115.343,48
2014	104.325,87

Tabel. 4.17
Jumlah Izin Perikanan yang dikeluarkan Kecamatan Mantang, Tahun
2017

Jenis Izin	Jumlah Izin yang di keluarkan
(1)	(2)
01 Penangkapan	55
02 Pengumpul	-
03 Pengangkutan	-
04 Budidaya	3
2017	58
2016	51
2015	80
2014	59

Tabel. 4.18
Potensi Lahan Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan Mantang,
Tahun 2017

Luas Lahan	Potensi Area (Ha)
(1)	(2)
01 Budidaya Laut (Keramba)	1.727.00
02 Budidaya Laut (Rumput Laut)	525.00
03 Budidaya Tawar	-
2017	2.252.00
2016	1.727.42
2015	2.252.42
2014	2.252.42

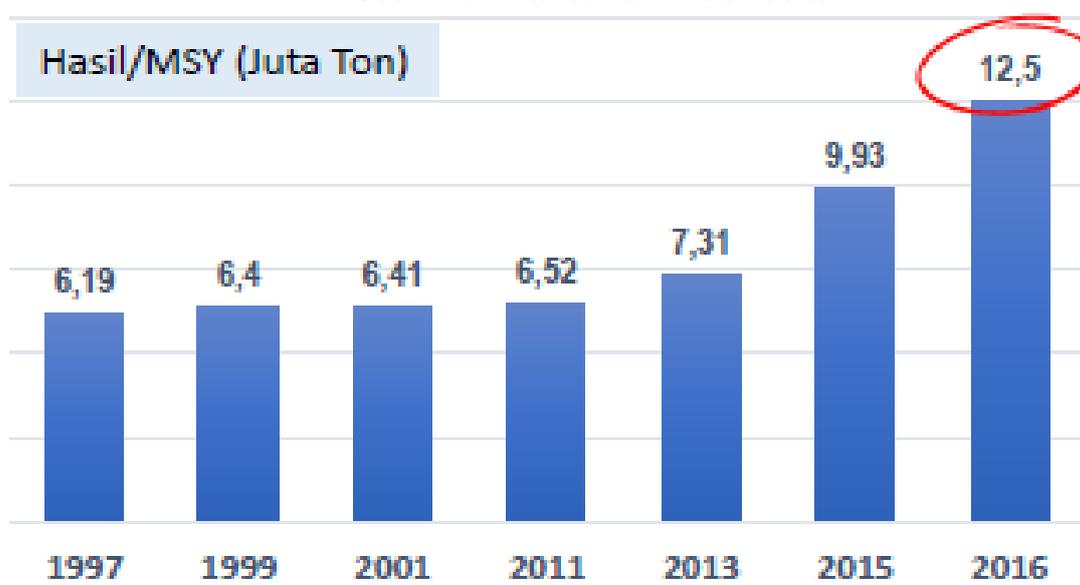
4.4 Peningkatan Stok Perikanan, Capaian dan Target Volume Produksi

4.4.1 Peningkatan Stok Perikanan, Capaian dan Target Volume Produksi di Perairan Indonesia

Sumber Daya Perikanan merupakan salah sumber daya alam yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat terutama bagi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang notabeneanya menggantungkan mata pencahariannya pada sumber sektor perikanan. Menurut Fauzi (2010) Sumber Daya Perikanan dapat didefinisikan sebagai aset yang dapat bertambah ataupun berkurang, baik secara alamiah maupun dengan adanya intervensi manusia. Berdasarkan dinamika alam dan intervensi manusia ini dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap Sumber Daya Perikanan tersebut sepanjang waktu.

Sifat sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang *open access* yang dapat dimaknai sebagai barang yang dieksploitasi atau dimanfaatkan secara terbuka oleh siapa saja yang mengaksesnya (Satria, 2015., Reressy, *et.al*, 2016). Selain itu, sumber daya perikanan juga merupakan salah satu sumber daya yang terbarukan (*renewable*). Oleh karena keunikan sumber daya perikanan ini maka perlu dilakukan penataan yang ramah lingkungan dalam mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam tersebut. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan alat penangkapan ikan yang bersifat untuk menjaga keberlangsungan jumlah stok ikan agar tidak terjadi *over fishing*, *illegal fishing* dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Reressy *et.al* (2016) bahwa Sumber Daya Perikanan dan Kelautan perlu untuk dimanfaatkan tetapi juga perlu untuk dilestarikan, sehingga pemenuhannya selalu berkelanjutan.

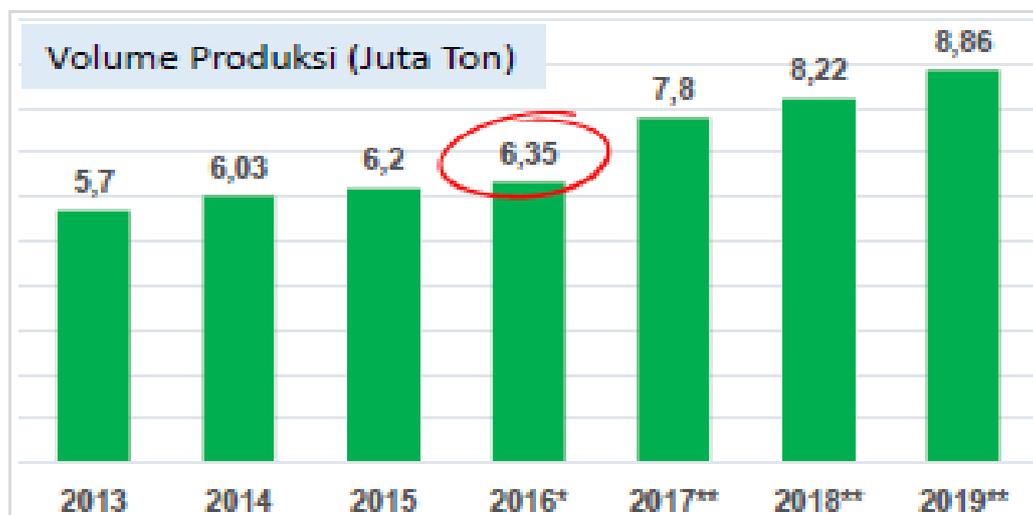
Gambar. 4.3
Stok Perikanan di Indonesia



Sumber: KOMNAS KAJISKAN & BRSDM-KP (Kasubbag Perencanaan Dan Anggaran DJPT, 2018)

Kenaikan jumlah ikan berdasarkan grafik diatas tidak terlepas dari reformasi kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia seperti kebijakan dalam penindakan illegal fishing, larangan menggunakan alata tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yang bisa menyebabkan rusaknya dan berkurangnya populasi ikan (misalnya menggunakan alat tangkap cantrang), hingga kebijakan penenggelaman kapal asing yang beroperasi untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Hartik, A., 14 Agustus 2018) bahwa kapal yang sudah ditenggelamkan pemerintah Indonesia sudah mencapai 383 unit terhitung sejak November 2014 hingga November 2017. Ini adalah bukti nyata pemerintah sangat serius untuk menjaga kedaulatan agar dapat mengelola sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia dengan sendiri.

Gambar. 4.4
Capaian dan Target Volume Produksi di Perairan Indonesia



* Tahun 2016 merupakan angka sementara
 ** Tahun 2017, 2018, 2019 merupakan angka target

Sumber: KOMNAS KAJISKAN & BRSDM-KP (Kasubbag
 Perencanaan Dan Anggaran DJPT, 2018)

Kenaikan jumlah stok ikan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KOMNAS KAJISKAN & BRSDM-KP (Kasubbag Perencanaan Dan Anggaran DJPT, 2018) menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 hingga 2016. Selanjutnya, jika melihat hasil capaian produksi perikanan di perairan di Indonesia juga mengalami kenaikan sejak tahun 2013 hingga 2016 (perhitungan sementara) walaupun kenaikan produksinya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan jumlah stok ikan yang ada di perairan Indonesia.

Jika melihat jumlah stok ikan yang begitu besar jumlah sementara jumlah produksi hanya mampu mencapai 50 % dari sumber daya perikanan yang tersedia maka sangat memungkinkan pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan dan meningkatkan produksi sumber daya perikanan tersebut. Hal dapat dilihat pada grafik diatas dimana pemerintah telah memasang target produksi yang selalu meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi pencapaian target yang telah ditetapkan maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata yang dapat mendorong nelayan untuk bisa memproduksi sesuai dengan target tersebut. Program dan kegiatan yang tepat dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini perlu didorong untuk dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai target tersebut.

4.4.2 Peningkatan Capaian dan Target Volume Produksi di Kabupaten Bintan

Tabel. 4.
Peningkatan Capaian dan Target Volume Produksi di Kabupaten Bintan

No	BIDANG PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	CAPAIAN	49,348	50,287	50,606	48,313.80	53,338.45	-	-	-	-
		TARGET				51,870.00	53,167.00	54,680	55,536	56,315	56,801
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	CAPAIAN	896.92	1,337.81	1,421.09	1,708.41	1,661.68	-	-	-	-
		TARGET				1,798.43	1,832.82	1,920.71	2,011.96	2,132.96	2,240.70

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan, 2018

Seiring dengan meningkatnya pencapaian dan target yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam memproduksi sumber daya perikanan dimasa mendatang hingga 2019 (masa kepemimpinan pemerintahan presiden Joko Widodo) maka Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah mensinergikan dan mengintegrasikan pencapaian dan target yang telah ditetapkan hingga 2021 sesuai dengan Visi **Bintan Gemilang 2025** Gerakan Melangkah Maju di Bidang **(1). Kelautan**, (2). Pariwisata dan (3). Kebudayaan.

Selanjutnya,

Table.4.
Jumlah Armada Perikanan di Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Jenis Kapal																		
		2017						JUMLAH	2016					JUMLAH	2015					JUMLAH
		KM (GT)			MT	PTM	KM (GT)		MT	PTM	KM (GT)	MT	PTM							
		1-5	6-10	>10											1-5	6-10	>10	1-5	6-10	
1	Tambelan	387	17	20	6	95	525	387	17	20	4	90	518	387	17	20	4	90	518	
2	Bintan Utara	176	5	-	24	120	325	176	3	0	20	115	314	176	3	-	20	115	314	
3	Bintan Pesisir	46	132	88	20	110	396	314	238	82	17	100	751	314	238	82	17	100	751	
4	Mantang	36	1	5	22	50	114	477	46	14	22	50	609	477	46	14	22	50	609	
5	Seri Koala Lobam	142	-	-	12	300	454	142	0	0	9	290	441	142	-	-	9	290	441	
6	Teluk Sebong	233	8	-	30	180	451	233	8	0	29	176	446	233	8	-	29	176	446	
7	Teluk Bintan	792	2	-	20	340	1154	792	1	0	19	331	1143	792	1	-	19	331	1,143	
8	Gunung Kijang	128	33	17	66	148	392	328	3	26	66	148	571	328	3	26	66	148	571	
9	Bintan Timur	94	161	191	36	85	567	187	63	197	36	85	568	187	63	197	36	85	568	
10	Toapaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah (Unit)		2,034	359	321	236	1,428	4,378	3,036	379	339	222	1,385	5,361	3,036	379	339	222	1,385	5,361	

Keterangan :

* MT : Motor Tempel

** PTM : Perahu Tanpa Motor

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan, 2018

Table.4.
Jumlah RTP Bidang Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TAMBELAN	969	1,031	1,023	1,617	1,649
2	BINTAN UTARA	1,881	507	477	385	393
3	BINTAN PESISIR	1,860	2,028	1,994	1,656	1,689
4	MANTANG	1,235	1,261	1,235	1,540	1,571
5	SERI KUALA LOBAM	666	585	563	426	435
6	TELUK SEBONG	563	685	666	683	697
7	TELUK BINTAN	1,994	1,895	1,881	594	606
8	GUNUNG KIJANG	477	991	969	1,486	1,516
9	BINTAN TIMUR	1,023	1,926	1,860	2,522	2,572
10	TOAPAYA	-	-	-	-	-
JUMLAH (RTP)		10,668	10,909	10,668	10,909	11,128

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan, 2018

Table.4.
Jumlah RTP Bidang Budidaya di Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TAMBELAN	27	80	66	96	98
2	BINTAN UTARA	319	200	186	212	217
3	BINTAN PESISIR	185	146	143	198	202
4	MANTANG	40	196	142	280	286
5	SERI KUALA LOBAM	195	135	239	301	307
6	TELUK SEBONG	234	165	190	230	234
7	TELUK BINTAN	390	365	415	237	241
8	GUNUNG KIJANG	59	210	84	124	127
9	BINTAN TIMUR	230	180	252	237	242
10	TOAPAYA	190	130	200	274	279
JUMLAH (RTP)		1,869	1,807	1,917	2,189	2,233

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan, 2018

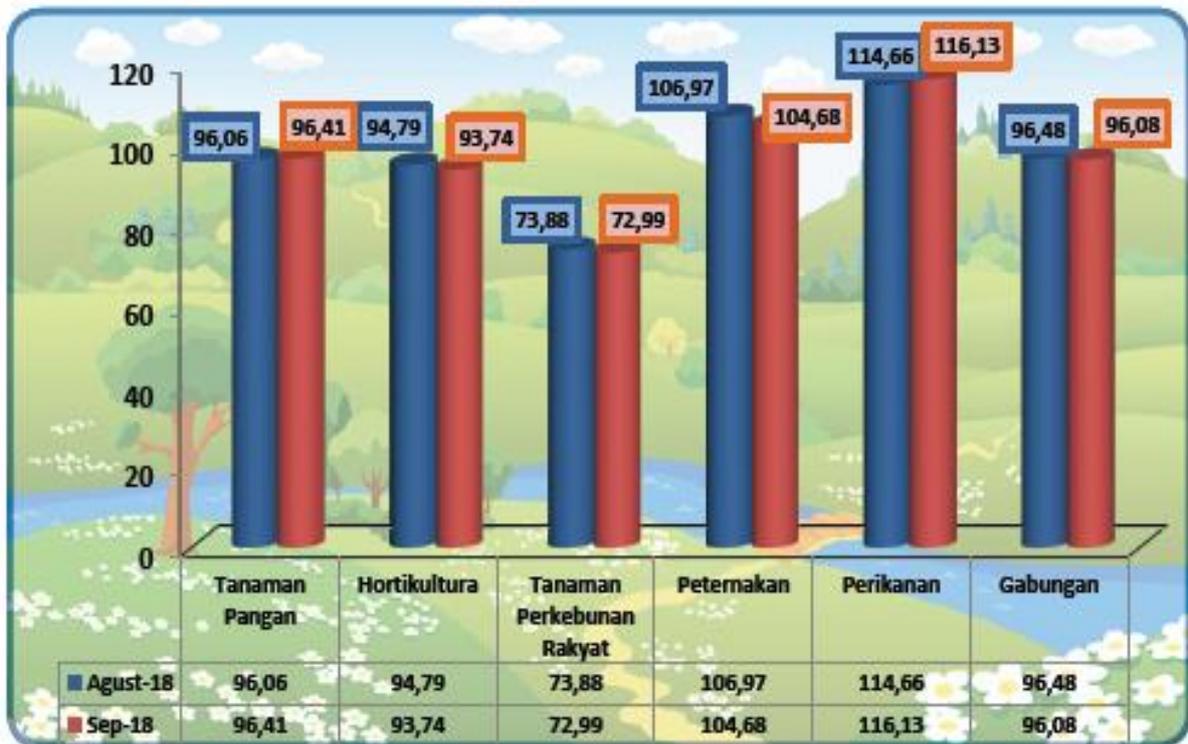
4.5 Sub-Sektor Perikanan (NTP-Pi) Provinsi Kepulauan Riau

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani (Satria, 2015). NTP ini sendiri sudah dikembangkan oleh BPS sejak tahun 1983. NTP merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani (Ib). Perhitungan indeks harga yang digunakan didasarkan pada indeks harga Laypayres, yang merupakan penggunaan kuantitas barang pada tahun dasar sebagai dasar perhitungan. BPS telah mengembangkan komoditas pada NTP sebagai dasar perhitungan tersebut sebagai berikut:

1. Komoditas tanaman pangan
2. Hortikultura
3. Perkebunan
4. Peternakan
5. Perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat

Selanjutnya, BPS telah menegaskan bahwa nelayan ditetapkan atau dikategorikan sebagai petani. Adapun kondisi terkini terkait dengan NTP Provinsi Kepulauan Riau yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam dua bulan terakhir sebagai berikut:

Gambar. 4.5
Sub-Sektor Perikanan (NTP-Pi) Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: BPS Prov. Kepri, 2018

Berdasarkan data grafik diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadinya Kenaikan Nilai Tukar Petani sebesar 1,28 persen
2. Naiknya Indeks yang Diterima Nelayan (It) sebesar 1,06 persen
3. Turunnya Indeks yang Dibayar nelayan (Ib) sebesar 0,21 persen
4. Perikanan Tangkap mengalami kenaikan Nilai Tukar Petani sebesar 0,60 persen atau naik dari 116,32 menjadi 118,19 (It naik sebesar 1,36 persen Ib menurun sebesar 0,24 persen.
5. Perikanan Budidaya mengalami penurunan Nilai Tukar Petani sebesar 0,27 persen atau turun dari 107,32 menjadi 107,03. (It mengalami penurunan sebesar -0,39 persen lebih kecil daripada penurunan (Ib) sebesar -0,21 persen)

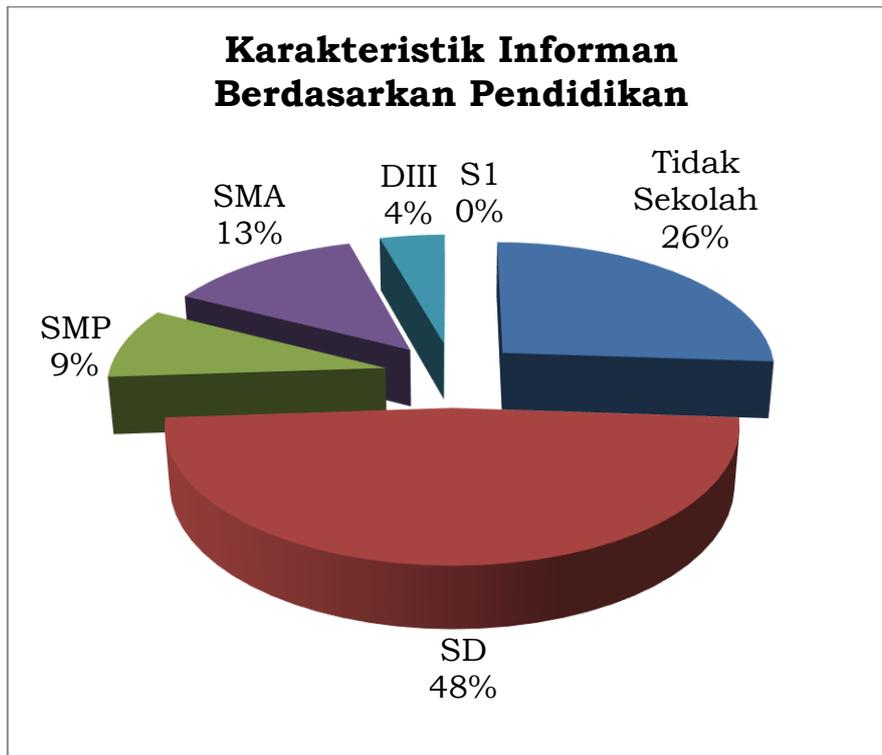
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Informan

Focus pada kajian ini adalah untuk melihat dampak bantuan yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap pendapatan nelayan dan pembudidaya di kawasan Minapolitan. Adapaun kawasan Minapolitan yang terdapat di Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir. Total populasi atau penerima bantuan baik sector perikanan tangkap maupun sector budidaya yang didapatkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan berjumlah 213. Teknik sampling yang dilakukan adalah dengan cara *purposive sampling*, sehingga keseluruhan sampel pada penelitian ini berjumlah 23 sampel yang tersebar di ketiga kecamatan kawasan minapolitan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan informasi-informasi yang telah didapatkan dari informan penerima bantuan. Adapun karakteristik informan pada penelitian ini dapat dilihat melalui karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan, Lama bekerja atau masa kerja, kategori nelayan, pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan

5.1.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Garfik 5 1 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

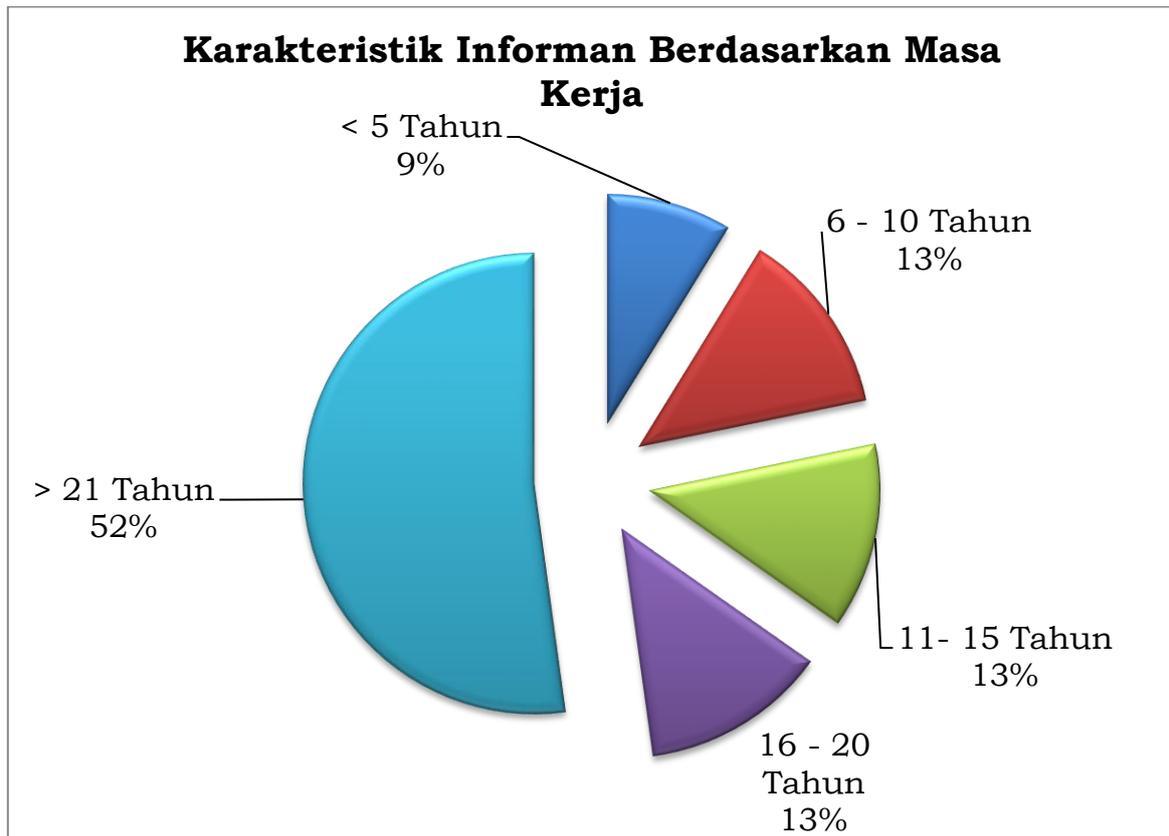
Jika melihat karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan maka kondisi nelayan dan pembudidaya di kawasan minapolitan didominasi lulusan SD yang menyumbang sebesar 48 % dan disusul 26 % yang tidak sekolah. Tingkat pendidikan ini dapat membentuk dan menentukan pola atau cara berpikir dan menganalisis berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dan pembudidaya.

Tingkat pendidikan yang rendah dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi yang terjadi dimasyarakat nelayan, kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan disebabkan oleh penghasilan yang tidak menentu dan tidak mampu menghadapi tantangan alam dengan peralatan alat tangkap ikan yang sederhana (Budiono, M. W., Wiyono, E.S., & Sudarmo, P.S., (2017).

Berikutnya, mengacu pada hasil penelitian Arnawa et.al. (2016) mengatakan bahwa rendahnya Sumber Daya Masyarakat Nelayan ini tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap meningkat atau tidaknya pendapatan nelayan dan pembudidaya secara signifikan. Namun demikian, terdapat kecenderungan dimana semakin tinggi pendidikan nelayan dan pembudidaya maka pendapatannya akan menjadi semakin tinggi. Hal ini dimaksudkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka ada kecendrungan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pembudidaya akan semakin tinggi pula, sehingga kemampuan nelayan dan pembudidaya dalam mengelola kegiatan penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan laut dan tawar juga semakin tinggi. Selain itu, kondisi sumber daya yang rendah ini juga akan memiliki pengaruh terkait dengan program pemberdayaan dan kegiatan pelatihan yang akan diberikan oleh pihak penyelenggara baik pemerintah maupun swasta dalam menentukan teknik dan metode yang tepat untuk memberikan program pemberdayaan dan kegiatan pelatihan yang dibutuhkan para nelayan dan pembudidaya.

5.1.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Masa Kerja

Garfik 5 2 Karakteristik Informan Berdasarkan Masa Kerja

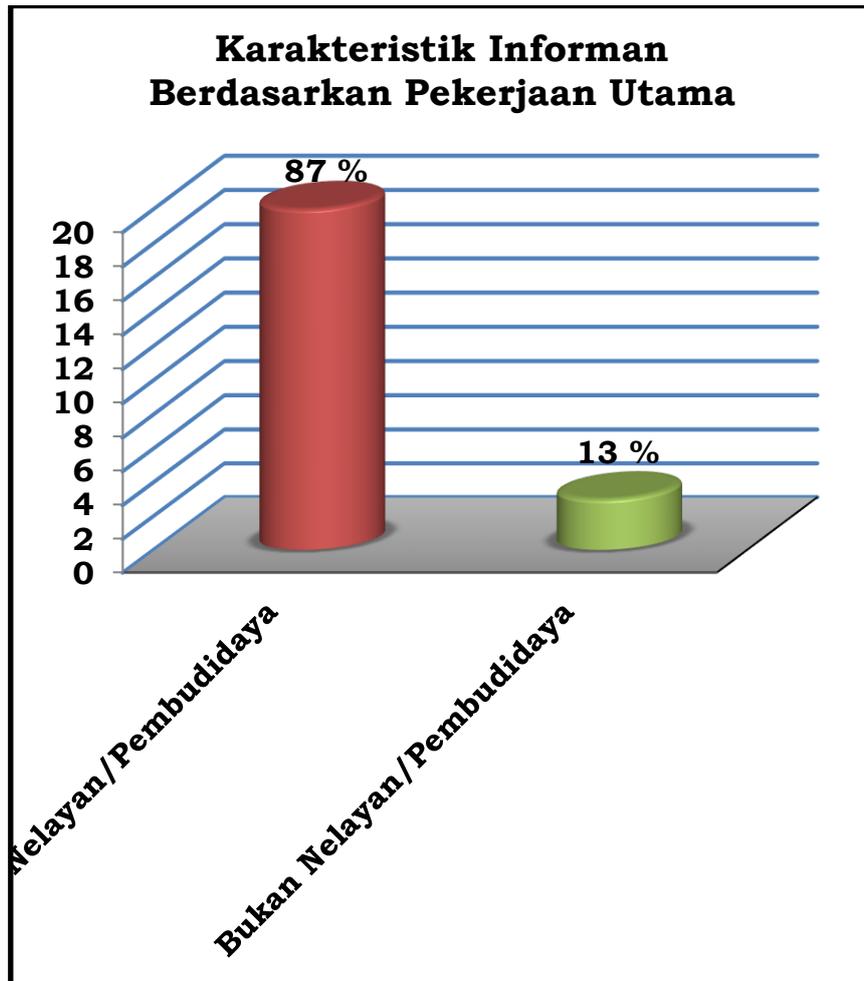


Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Masa kerja merupakan salah satu karakter yang perlu untuk ditinjau pada penelitian ini mengingat bahwa semakin lama masa kerja maka secara rasional juga akan semakin meningkatkan pengalaman dalam menekuni bidang pekerjaannya masing-masing. berdasarkan data pie chart diatas bahwa masa kerja diatas 21 tahun menyumbangkan persentase tertinggi sebesar 52 % dan diikuti 13 % untuk masa kerja 6-10 tahun, 11-15 tahun dan 16-20 tahun. Sementara karakteristik dengan masa kerja terendah sebesar 9 % yang merupakan masa kerja di bawah 5 tahun.

5.1.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Utama

Garfik 5 3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Utama



Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan data grafik diatas dapat kita ketahui bahwa karakteristik informan (penerima bantuan) berdasarkan pekerjaan utama di dominasi oleh nelayan dan pembudidaya dengan persentase mencapai 87 %. Ini dimaksudkan adalah ketepatan sasaran pemerintah dalam menetapkan calon penerima bantuan dan mendistribusikan bantuan tepat pada sasarannya yang diinginkan. Namun demikian, terdapat 13 % penerima yang merupakan nelayan dan pembudidaya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima bantuan. Pekerjaan utama sebagai nelayan dan

pembudidaya harusnya menjadi prioritas pemerintah sebagai penerima bantuan baik pada sector perikanan tangkap maupun budidaya perikanan.

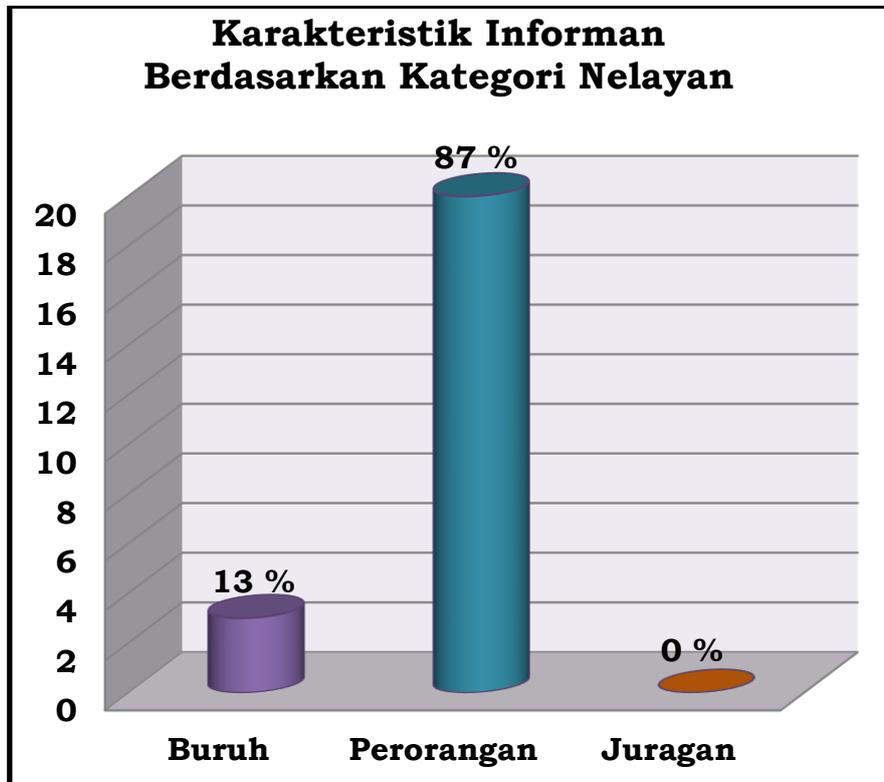
Pada sector perikanan tangkap untuk kategori pekerjaan utama bukan nelayan berjumlah 3 orang atau 13% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Satu orang penerima bantuan pada sector perikanan tangkap sudah beralih profesi pekerjaan utama. Sebelumnya, nelayan merupakan pekerjaan utama penerima bantuan tersebut. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan pekerjaan utama dari nelayan menjadi honorer di sebuah OPD yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Walaupun demikian, kegiatan sebagai nelayan tetap dilakukan oleh penerima bantuan dan telah menjadi pekerjaan sampingan baginya.
2. Dua orang penerima bantuan pada sector perikanan tangkap baik sebelum menerima bantuan maupun setelah menerima bantuan didapati bahwa profesi sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan melainkan bekerja pada sector swasta sebagai buruh pada perusahaan yang terdapat di kabupaten Bintan. Secara administrative penerima bantuan mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pelaksana program bantuan misalnya status pekerjaan yang tercantum sebagai nelayan, mampu menyediakan surat keterangan sebagai nelayan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dan sebagainya. Fenomena ini akan menjadi catatan bagi pelaksana kegiatan atau program bantuan agar dapat untuk lebih selektif dalam menetapkan calon

penerima bantuan agar lebih tepat sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dari kegiatan atau program pemberdayaan tersebut.

5.1.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Kategori Nelayan

Garfik 5 4 Karakteristik Informan Berdasarkan Kategori Nelayan



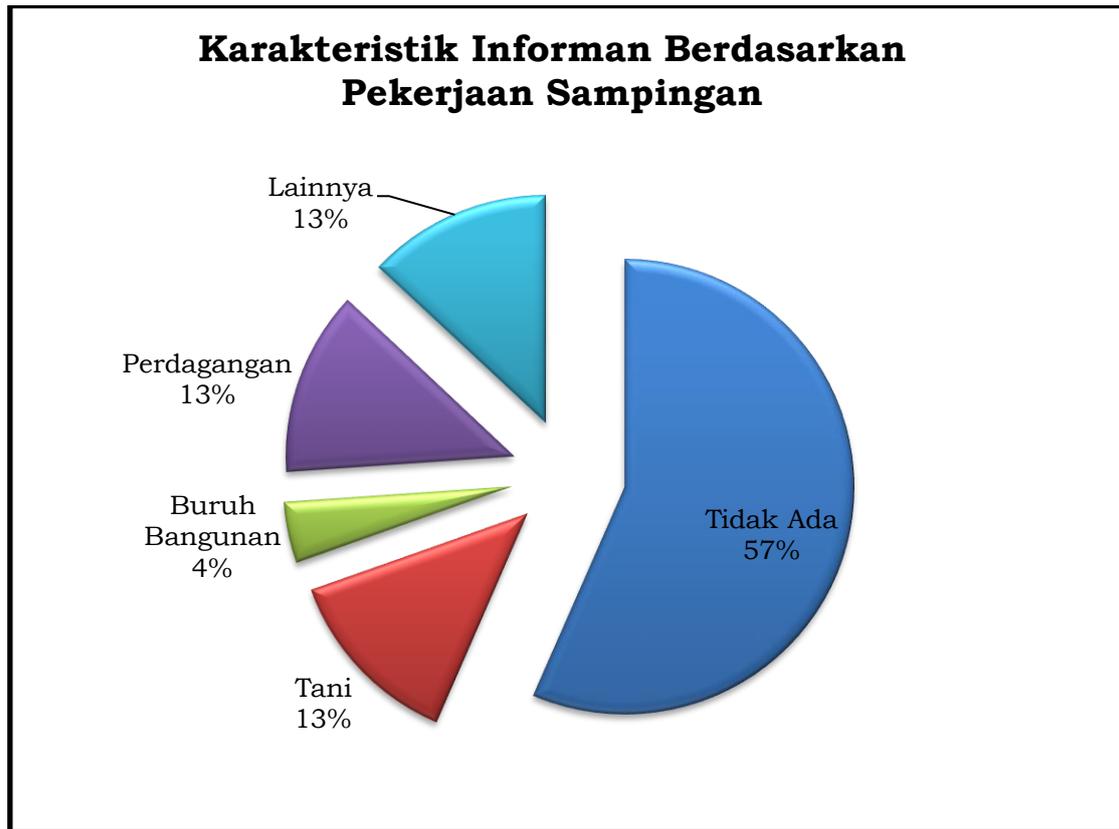
Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan data grafik diatas bahwa karakteristik informan berdasarkan ketegori nelayan dan pembudidaya di dominasi oleh ketegori nelayan dan pembudidaya perorangan dengan persentase mencapai 87 %. Sedangkan untuk kategori nelayan buruh berada pada peringkat kedua dengan persentase sebesar 13 % dan kategori nelayan dan pembudidaya juragan dengan persentase 0 %.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan bahwa tingginya persentase kategori nelayan dan pembudidaya perorangan disebabkan oleh: pertama, pembudidaya penerima bantuan memang sudah memiliki dan menjalankan usaha sendiri dari setiap kelompoknya masing-masing. Kedua, beberapa nelayan memang sebelumnya merupakan nelayan perorangan. Ketiga, terjadinya perpindahan dari kategori nelayan buruh yang sebelumnya merupakan nelayan buruh dari Tauke (patron-Client) menjadi nelayan perorangan setelah menerima bantuan berupa jenis kapal motor fiber 1 GT dan Kapal motor kayu 3 GT. Selain itu, untuk kategori nelayan buruh merupakan nelayan penerima bantuan berkelompok seperti bantuan kapal motor kayu 3 GT dan penerima bantuan Keramba Jaring Apung dan Bibit Kerapu. Selanjutnya, untuk kategori nelayan juragan ini sejak tahun 2013 hingga 2017 pemerintah Kabupaten Bintan belum melaksanakan penyaluran bantuan kepada nelayan dan pembudidaya sebagai penerima program bantuan perikanan tangkap dan budidaya.

5.1.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Sampingan

Garfik 5 5 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Sampingan



Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Selain sebagai nelayan yang menjadi sumber utama pendapatan nelayan dan pembudidaya, ada sumber-sumber pendapatan lainnya atau pekerjaan sampingan yang bisa didapatkan untuk membantu dan menopang perekonomian rumah tangga nelayan dan dan pembudidaya. Pekerjaan sampingan nelayan dan pembudidaya di kawasan Minapolitan terdiri dari sector perdagangan, tani, buruh bangunan dan lainnya (misalnya jasa ternasportasi laut). Berdasarkan data pie chart diatas, pekerjaan sampingan nelayan dan pembudidaya masih masih didominasi tidak memiliki pekerjaan sampingan yang mencapai 57 %. Sumber pendapatan nelayan dan pembudidaya hanya didapatkan dari kegiatan atau pekerjaan utama saja. Berikutnya, terdapat sebesar 13 % sudah memiliki pendapatan tambahan

melalui pekerjaan sampingan masing-masing pada sector perdagangan, tani dan lainnya (jasa transportasi laut) dan 4 % mendapatkan tambahan pendapatan menjadi buruh bangunan.

5.2 Melakukan identifikasi terhadap kondisi eksisting metode pemberian bantuan kepada nelayan di Kabupaten Bintan.

5.2.1 Regulasi Pemberian Bantuan

5.2.2 SOP

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP dapat dimaknai juga sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan pekerjaan atau tugas sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Keberadaan SOP dimaksudkan guna menjaga konsistensi, mengetahui peran dan fungsi masing-masing petugas, memperjelas alur tugas, dan menghindari kegagalan atau kesalahan.

Terkait SOP untuk saat ini pemberian bantuan kepada nelayan tangkap belum memiliki SOP khusus. Akibatnya tidak ada petunjuk pasti tentang tata cara dan alur pemberian bantuan. Sebagai dasar dan panduan pemberian bantuan kepada nelayan tangkap langsung dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan. Dimana peraturan tersebut tidak secara

spesifik mengatur tentang pemberian bantuan terhadap nelayan, melainkan mengatur tentang pemberian secara umum. Dalam artian tidak terbatas hanya pada bantuan untuk nelayan.

Berbeda dengan bantuan kepada nelayan tangkap, untuk bantuan kepada nelayan budi daya terdapat SOP berupa petunjuk teknis. Untuk tahun anggaran 2018 petunjuk teknis yang digunakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Nomor : 023/Diskan/2018, tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Bagi Pembudidaya Ikan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Budidaya, dan Pembuatan Tambak Ikan Air Payau, Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. Di dalam petunjuk teknis tersebut jelas termuat tujuan, sasaran, dasar pelaksanaan, kriteria dan persyaratan kelompok calon penerima, serta tugas dan wewenang pihak-pihak terkait.

5.2.3 Pengusulan

Pengusulan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses atau cara nelayan mendapatkan bantuan. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian bantuan terhadap nelayan diberikan kepada mereka yang membutuhkan tetapi dengan ketentuan yang berlaku, yaitu adanya usulan dari yang bersangkutan.

Proses pengusulan bantuan dilakukan oleh yang bersangkutan, yakni nelayan yang membutuhkan bantuan dengan mengajukan proposal ke Bupati dan disampaikan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Pengusul adalah mereka yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan. Dalam artian adalah nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Sebagaimana Ditjen Perikanan (2002) dalam Satria (2015:27) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan, yaitu :

1. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Berikutnya, untuk bantuan alat tangkap, berupa perahu motor, maka pengusulan diajukan secara perorangan maupun kelompok. Untuk bantuan perahu motor 1 GT (gross tone) diajukan secara perorangan, sementara untuk perahu motor 3 GT atau lebih, pengusulan bantuan diajukan secara berkelompok yang terdiri dari 3 orang untuk masing-masing kelompok.

Bantuan untuk nelayan tangkap selain perahu motor, juga ada bantuan lainnya, yaitu alat tangkap bubu. Bantuan bubu diberikan secara perorangan dengan ketentuan sama seperti bantuan perahu motor, setiap nelayan yang menginginkan bantuan itu harus mengajukan permohonan dengan membuat proposal.

Selanjutnya, selain bantuan untuk nelayan tangkap, juga terdapat bantuan untuk nelayan budi daya. Ketentuan pengusulan bantuan hampir sama dengan nelayan tangkap, hanya saja harus dalam bentuk kelompok. Dalam artian, tidak ada bantuan untuk perorangan. Jumlah anggota kelompok 5 sampai 10 orang yang berdomisili saling berdekatan.

5.2.4 Penyaluran

Bagi nelayan yang dianggap layak secara administratif selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Perikanan. Setelah proses verifikasi selesai maka akan ditentukan siapa-siapa nelayan yang berhak mendapatkan bantuan. Selanjutnya bantuan akan diberikan dalam suatu upacara penyerahan yang disampaikan langsung oleh Bupati Bintan kepada nelayan yang berhak menerima.

Dalam penyerahan bantuan langsung diterima oleh mereka yang namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan. Bagi yang berkelompok, juga dihadiri dan disaksikan oleh anggota kelompok. Seandainya nelayan yang penerima berhalangan hadir, maka penyerahan bantuan utk yang bersangkutan tidak dapat diwakili. Sehingga penyerahan bantuan untuk yang bersangkutan akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Bintan pada kesempatan pertama.

5.2.5 Pemeliharaan Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga

non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya nelayan yang menerima bantuan maka ditunjuk pihak ketiga sebagai pendamping. Pada nelayan penerima bantuan terdapat pendamping yang ditunjuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan pendamping yang ditunjuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu tidak ada pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Disebabkan pendamping yang ada merupakan pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maka mereka tidak punya kewajiban untuk berkoordinasi atau melaporkan setiap kerjanya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. Akibatnya, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan harus melakukan pembinaan terhadap nelayan-nelayan yang menerima bantuan secara langsung.

5.3 Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada di lapangan terkait pemberian bantuan.

5.3.1 Masalah Data Penerima Bantuan

Masalah pendataan terkait nelayan, khususnya nelayan tangkap termasuk hal utama yang harus dibenahi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan

pendataan nelayan merupakan salah satu input penting dalam menentukan pengambilan kebijakan yang akan dilakukan terkait keberadaan nelayan. Saat ini pencatatan data tentang nelayan tangkap belum tepat dan akurat. Hal ini dikarenakan belum adanya data pasti yang mampu mengklasifikasikan tentang status nelayan tangkap tersebut.

Sebagaimana Ditjen Perikanan (2002) dalam Satria (2015:27) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan, yaitu :

1. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Dalam kajian dampak ini juga ditemukan adanya status nelayan sebagaimana diklasifikasikan Ditjen Perikanan tersebut. Perbedaan status tersebut membawa dampak pada pemanfaatan bantuan yang diberikan. Bagi yang merupakan nelayan penuh, sangat merasakan manfaat bantuan yang diberikan. Hal ini tidak demikian bagi nelayan sambilan.

5.3.2 Masalah Ketepatan Sasaran (Penerima Bukan Orang yang Tepat)

Ketepatan sasaran bantuan merupakan salah satu penunjang keberhasilan suatu program bantuan. Ketidaktepatan sasaran akan bisa berakibat tujuan dari pemberian bantuan tidak tercapai. Pada program bantuan bagi nelayan tangkap masih didapati adanya sasaran yang tidak

tepat. Dimana pihak penerima ternyata tidak berprofesi sebagai nelayan. Hal ini terjadi dikarenakan bukan yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, adanya kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, dan kelemahan dalam melakukan verifikasi data.

5.3.3 Masalah Ketidaksesuaian Barang yang Diterima

Terkait dengan ketidaksesuaian barang yang diterima pada umumnya dikarenakan nelayan tidak mengajukan sendiri kebutuhan yang diinginkan. Nelayan tidak memahami sifat dari bantuan yang berikan, sehingga menganggap bantuan yang diberikan tidak memenuhi harapan. Misalnya, ada bantuan bubu, nelayan menganggap bantuan yang akan diterima adalah bubu jadi, tetapi yang didapat adalah bahan bubu. Sehingga nelayan ada yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut karena bantuan yang diberikan hanya kawat bubu, sementara kelengkapan yang lain tidak diberikan. Akibatnya, kawat bubu tersebut tidak dimanfaatkan oleh nelayan penerima bantuan. Sementara berdasarkan data bantuan yang disalurkan ke masyarakat nelayan penerima bantuan sudah sesuai. Dalam artian, bahwa bantuan sudah tersalurkan dan sudah diterima sesuai dengan nama dan identitas yang ada.

5.3.4 Mekanisme Pengusulan

Mekanisme pengusulan bantuan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu dibenahi dalam mekanisme pemberian bantuan. Selama ini yang terjadi adalah adanya beberapa cara dalam nelayan mengusulkan bantuan. Hal ini tidak hanya terhadap nelayan tangkap, tapi

juga terhadap nelayan budi daya. Adapun mekanisme yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Nelayan tahu dan mengusulkan sendiri.

Dalam hal ini nelayan mengetahui adanya program bantuan bagi nelayan tangkap dan nelayan budi daya. Tidak hanya tahu, tetapi mereka juga paham dengan mekanisme pengusulannya. Untuk itu mereka mengusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan dengan membuat proposal sendiri dan mengurusnya juga sendiri. Kalaupun ada yang membantu, biasanya hanya terkait dengan penulisan proposal permohonan bantuan dikarenakan nelayan tidak memahami cara pembuatan proposal dan tidak memiliki fasilitasnya.

2. Nelayan tahu dan diusulkan oleh pihak lain.

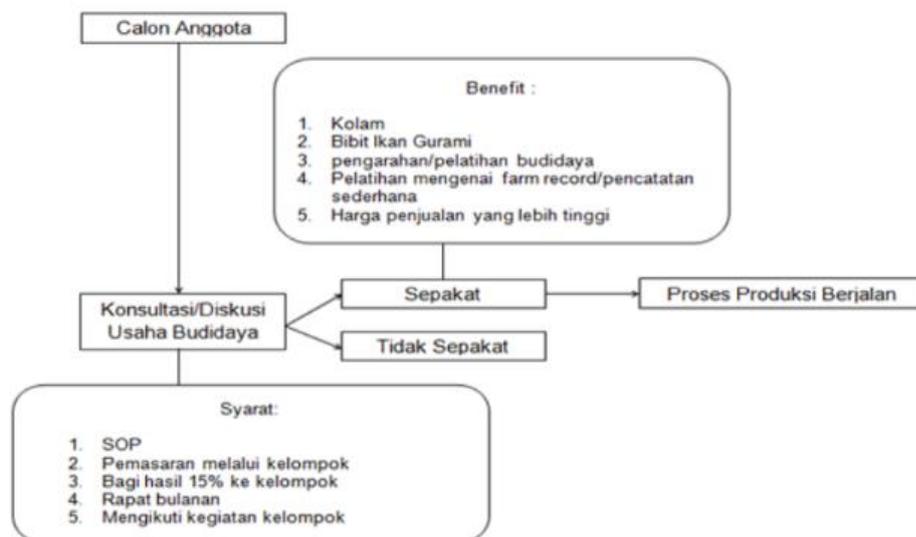
Untuk kasus yang kedua ini, nelayan mengetahui adanya program bantuan terhadap mereka, akan tetapi nelayan tidak mengetahui mekanisme pengusulannya sehingga meminta bantuan kepada pihak-pihak lain. Biasanya bantuan dimohonkan kepada pendamping/penyuluh, seperti membuat proposal dan menyampaikannya kepada pihak terkait.

3. Nelayan tidak tahu, tapi diusulkan oleh pihak lain.

Untuk kasus yang ketiga ini nelayan tidak tahu bila ada bantuan namun dia tahu kalau namanya diusulkan oleh pihak lain. Hal ini terjadi biasanya karena antara nelayan dengan pihak yang mengusulkan ada keterkaitan hubungan tertentu seperti hubungan

keluarga, dulunya tim sukses, dan lain-lain. Selain itu mekanisme pembentukan kelompok yang ada tidaklah ideal karena hanya mendasarkan atas kepentingan administrasi, bukan atas prakarsa kesamaan pandangan dan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penangkapan, pembudidayaan dan penjualan. Pembentukan kelompok yang baik sebagaimana disampaikan oleh Fathurrohman 2016 sebagai berikut:

Bagan Mekanisme dan Struktur Kerja Kelompok Pembudiaya Ikan Gurami Di Kab. Banyumas



Sumber: Fathurrohman 2016

Menurut Fathurrohman (2016) berdasarkan model yang diambil dari studi pada POKDAKAN Ulam Sari di Banyumas proses awal terjalannya kerjasama dimulai dari kemauan seseorang untuk melakukan budidaya pembesaran ikan gurame namun terhalang permodalan dan pemasaran. Dengan adanya kelompok permasalahan permodalan dan pemasaran dapat diatasi. Namun sebelum menerima orang yang akan bergabung menjadi anggota kelompok ada persyaratan yang harus dipatuhi oleh calon pembudidaya seperti:

1. Mengikuti anjuran dalam teknis budidaya agar sesuai dengan *standar operation procedure (SOP)*
2. Pemasaran hasil budidaya harus melalui kelompok
3. Hasil pemasaran harus dibagi kepada kelompok sebesar 15T% dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya permodalan selama enam bulan (2,5% perbulan)
4. Mengikuti rapat rutin setiap bulan
5. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kelompok

Setelah calon pembudidaya setuju untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud, maka calon pembudidaya akan memperoleh:

1. Kolam budidaya
2. Bibit ikan gurami
3. Pengarahan/pelatihan terkait budidaya pembesaran gurami melalui penyuluhan
4. Pelatihan mengenai farm record / pencatatan sederhana terkait biaya yang dikeluarkan selama proses budidaya
5. Harga penjualan yang stabil.

Untuk pemasaran sendiri dilakukan sesuai schedule panen yang telah diatur pada setiap kolamnya agar tidak terjadi *Over Production*.

5.4 Melakukan identifikasi terhadap metode pembinaan pasca pemberian bantuan nelayan

Adapun hasil temuan dilapangan dalam mengidentifikasi metode pembinaan pasca pemberian bantuan nelayan sebagai berikut:

5.4.1 Belum ada prosedur sistematis

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa proses pembinaan pasca pemberian bantuan tidak dilakukan kepada penerima bantuan dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Hal ini terjadi karena memang dinas perikanan Kab. Bintan (DPB) belum memiliki sebuah sistem dan instrumen yang jelas dalam rangka pembinaan dan pemantauan pasca pemberian bantuan yang disebabkan karena belum jelasnya sasaran capaian program pemberian bantuan ini sendiri. Namun demikian kenyataan di lapangan memang tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh penerima bantuan terhadap bantuan yang diterima seperti penjualan barang untuk memperoleh uang dengan cara mudah namun tidak berkelanjutan.

Dampak yang muncul akibat tidak dilakukannya program pembinaan pasca pemberian bantuan adalah, penerima bantuan dengan jenis bantuan berupa bibit ikan tidak memaksimalkan keuntungan yang seharusnya bisa didapat oleh pembudidaya ikan. Ada beberapa pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan bibit ikan serta pakannya diketahui memiliki kecenderungan menjual ikan budidaya yang bibitnya berasal dari bantuan dengan harga dibawah harga pasaran, sehingga hal ini memicu terjadinya ketidakstabilan harga pasaran yang tidak stabil dan tidak maksimalnya keuntungan yang didapat pembudidaya. Ketidaksatbilan harga jual ikan ini dimungkinkan terjadi karena tidak ada sebuah aturan harga standar yang jelas. Setiap pembudidaya dapat menentukan sendiri harga jualnya bahkan jauh dibawah harga pasaran karena penjual yang menerima bibit ikan dari bantuan pemerintah tidak

merasa bahwa mereka mengeluarkan modal yang besar untuk ikan yang akan dijualnya pada saat itu karena ikan tersebut bibitnya berasal dari bantuan dan bahkan makanan untuk pembesaran juga berasal dari bantuan pemerintah.

Upaya pemerintah kabupaten bintang dalam memaksimalkan *output* bantuan yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya yang bisa diidentifikasi adalah pada jenis bantuan berupa perahu motor 1 GT. Berdasarkan informasi dari penerima bantuan perahu motor 1 GT diketahui bahwa sebelum penyerahan bantuan kepada penerima dilaksanakan, para penerima terlebih dahulu diundang untuk mengikuti kegiatan pelatihan.

Pelatihan yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada para penerima perahu motor 1 GT agar mampu mengoperasikan dan mereawat perahu motornya sendiri. Materi pelatihan antara lain mengenai bagaimana cara mengoperasikan mesin kapal motor, memperbaiki kerusakan mesin dan cara memperbaiki kerusakan pada bodi perahu motor yang terbuat dari fiber. Selain itu penerima perahu motor 1 GT diberikan buku panduan yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan bulanan, sehingga akhirnya melalui buku tersebut dapat diketahui peningkatan ataupun pendapatan yang dimiliki oleh setiap nelayan dalam satu bulan. Namun kenyataannya, nelayan tidak melakukan pengisian buku tersebut karena menurut mereka tidak terlalu penting. Anggapan tidak terlalu penting ini sebenarnya disebabkan oleh karena tidak ada pembinaan berkala yang dilakukn oleh dinas, sehingga mereka tidak terlatih dalam mengelola

keuangan. Padahal jika ada pendampingan yang maksimal pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan akan dapat diarahkan lebih baik dan berujung kepada peningkatan kesejahteraan nelayan.

5.4.2 Belum ada koordinasi yang jelas antar satuan tugas yang ada dilapangan terhadap pembinaan kepada penerima bantuan.

Berikut ini adalah unit kerja yang diidentifikasi terlibat secara teknis struktural dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kepada nelayan tangkap dan pembudidaya:

1. Bidang perikanan tangkap Dinas Perikanan Kab. Bintan
2. Bidang perikanan budidaya Dinas Perikanan Kab. Bintan
3. Bidang pelayanan pendataan dan pengembangan SDM (P3SDM) Dinas Perikanan Kab. Bintan
4. UPT Dinas Perikanan Kecamatan Bintan Timur
5. UPT Dinas Perikanan Kecamatan Mantang
6. UPT Dinas Perikanan Kecamatan Bintan Pesisir

Menurut informan berinisial HFR, untuk pelaksanaan pembinaan pada nelayan yang pada umumnya dan juga yang menerima bantuan dari penda melalui Dinas Perikanan Kab. Bintan dilaksanakan oleh bidang P3SDM. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan selain petugas yang secara struktural berada dibawah kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan ada juga petugas dari institusi pemerintah lainnya yang tugasnya melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan

dan pembudidaya ikan, yaitu petugas pendamping (Petugas Kontrak) nelayan dan pembudiaya ikan yang ditempatkan oleh Kementerian Kelautan perikanan RI beserta Petugas yang ditempatkan oleh DKP Provinsi Kepri. Namun demikian, walaupun petugas dari KKP RI dan DKP Provinsi Kepri yang bekerja dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Bintan secara struktural mereka tetap dibawah komando dari indtitusi masing-masing. Hal demikian tentunya tidak baik bagi pencapaian tujuan organisasi. Seharusnya ada koordinasi yang baik secara keorganisasian antara KKP RI dengan Dinas Perikanan Kab. Bintan mengenai penempatan petugas mereka.

Penempatan tugas dari KKP RI dan DKP Provinsi Kepri merupakan hal yang baik, karena itu merupakan perwujudan tanggung jawab masing-masing institusi terhadap pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan di Kab. Bintan. Untuk meningkatkan sinergi pencapaian tujuan program pemerintah sebaiknya petugas lapangan yang ditempatkan oleh KKP RI dan DKP Provinsi Kepri dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perikanan Kab. Bintan secara struktural untuk membantu Pemda Kab. Bintan dalam membina nelayan dan pembudidaya yang menerima bantuan dari pemda Kab. Bintan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan HFR, bahwa Pemda Kabupaten Bintan dalam hal pembinaan, tidak membuat penganggaran khusus lagi untuk program pembinaan bagi nelayan dan pembudidaya yang menerima bantuan, kaeran hal tersebut dianggap pemborosan sebab sudah ada petugas yang disediakan oleh DKP Provinsi Kepri dalam hal

melakukan pendampingan kepada nelayan. Hanya saja nyatanya, pemda Kab. Bintan tidak mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada KKP RI dan DKP Prov. Kepri sebagai pihak yang menempatkan petugas lapangan di Kab. Bintan untuk mensinergikan pekerjaan pendamping dari provinsi dan KKP RI dengan program yang dibuat oleh dinas perikanan pemerintah daerah Kab. Bintan.

- 5.5 Melakukan identifikasi terhadap dampak pemberian bantuan Terhadap pendapatan nelayan/pembudidaya di Kabupaten Bintan.

5.5.1 Bantuan Perikanan Tangkap

5.5.1.1 *Penerima bantuan Kapal Motor Kayu 3 GT*

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara penelitian ini menemukan bahwa nelayan tangkap yang menerima bantuan kapal motor kayu 3 GT mampu meningkatkan pendapatan mereka hingga 100 % hal ini terungkap dari informasi informan berinisial AD dan SM yang diwawancarai oleh tim peneliti pada hari minggu tanggal 30 bulan Sembilan jam 09.30 di kijang. Menurut AD sebelum mendapatkan bantuan kapal motor 3 GT dari pemerintah daerah dia adalah nelayan buruh yang ikut melaut menggunakan kapal motor milik salah satu toke yang ada di kijang. Sistem kerja nelayan buruh yang dirancang oleh toke-toke kapal ikan di kijang pada umumnya membuat posisi nelayan buruh cukup sulit untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan yang layak. Hal ini dimungkinkan karena sistem perhitungan keuangan yang diterapkan

sangat menguntungkan toke, namun dalam kondisi nelayan yang tidak banyak pilihan untuk mendapatkan pekerjaan maka mau tidak mau atau suka tidak suka nelayan buruh harus mengikutinya karena harus menghidupi keluarga.

Pada dasarnya sistem perhitungan pembagian pendapatan nelayan buruh yang ikut melaut dengan kapal toke terbagi menjadi beberapa komponen sebagai berikut:

- (1) Komponen pertama adalah biaya sewa kapal motor kepada toke sebesar 20% dari total penjualan ikan dalam sekali melaut
- (2) Komponen kedua adalah upah nelayan tekong (kapten/ketua nelayan yang bertanggungjawab membawa ABK menuju lokasi-lokasi penangkapan ikan pada saat melaut) sebesar 5% dari total hasil penjualan ikan dalam sekali melaut
- (3) Komponen ketiga adalah biaya operasional selama melaut. Biaya operasional ini meliputi biaya solar, biaya pembelian bekal makan dan minum selama melaut serta rokok, biaya pembelian es balok, serta biaya-biaya lain.

Selain komponen yang telah disebutkan diatas ada satu aturan yang secara tidak tertulis harus mereka patuhi yaitu ikan hasil tangkapan nelayan dari laut tidak boleh dijual langsung kepasar atau dijual ke tempat-tempat lain selain kepada toke atau pemilik kapal yang digunakan nelayan untuk melaut. Namun sayangnya harga yang ditetapkan oleh toke jauh dibawah harga pasaran yang ada sehingga merugikan nelayan buruh. Kisaran perbedaan harga yang ditetapkan

oleh toke dengan harga pasaran berada pada rentang harga Rp. 4.000 s.d Rp. 6.000 per Kg. jadi dapat dibayangkan jika hasil tangkapan nelayan sebesar 200 kg maka kerugian nelayan dari hasil penjualan dalam sekali melaut sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah). Itu artinya setiap kali melaut nelayan kemungkinan akan rugi sekitar Rp. 800.000 untuk kapal ukuran 3 GT. Jika nelayan buruh tersebut ketahuan menjual hasil tangkapan kepada orang lain maka toke tidak akan memberikan kepercayaan kepada nelayan tersebut lagi.

Sebagai ilustrasi contoh:

Jika ada tiga orang nelayan yang melaut menangkap ikan dengan menggunakan kapal motor 3 GT milik toke maka nelayan-nelayan tersebut harus meminjam modal dari toke sebesar ± Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian solar, makan dan minum, rokok dan keperluan lain melaut selama 3 sampai dengan 4 hari dan tidak jarang juga barang-barang yang dibeli itu dijual oleh toke itu sendiri. Setelah melaut selama 3 sampai dengan 4 hari maka nelayan-nelayan ini akan pulang dengan asumsi berhasil membawa tangkapan ikan sebanyak 250 kg ikan tongkol dan atau ikan jenis lainnya. Kemudian ikan tersebut ditimbang dan dibeli oleh toke itu sendiri dengan harga yang telah ditetapkan. Setelah perhitungan hasil tangkapan didapatlah hasil penjualan sebesar Rp. 6.000.000.

Hasil penjualan ikan tersebut akan dipotong 25% sebagai biaya sewa kapal motor 3 GT 20% dan upah tekong 5%. Artinya sewa kapal dan upah untuk tekong dengan hasil penjualan Rp 6.000.000 sebesar

Rp 1.500.000 (Stau juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian setelah dipotong 25% dari hasil penjualan, nelayan harus mengganti biaya pinjaman operasional sebesar Rp 2.000.000. Jadi total potongan sebesar Rp 3.500.000. Hasil akhir pendapat nelayan setelah potongan-potongan tersebut sebesar Rp 2.500.000 dan uang inilah yang akan dibagi rata kepada nelayan. Artinya dalam sekali melaut nelayan buruh akan mendapatkan penghasilan sebesar **Rp. 833.333** (Delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Namun setelah mendapat bantuan, nelayan buruh yang sebelumnya selalu bergantung dengan toke atau menumpang dengan orang lain (teman) yang memiliki armada tangkap telah merasakan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mereka masing-masing. Hal ini dimungkinkan karena nelayan-nelayan ini telah lepas dari aturan-aturan toke yang sangat memberatkan bagi nelayan buruh.

Menurut pengakuan AD setelah yang bersangkutan mendapatkan bantuan kapal motor 3 GT pendapatannya meningkat 100% dari rata-rata pendapatan Rp 3.000.000 menjadi Rp 6.000.000 perbulannya. AD dan dua rekannya mendapatkan bantuan kapal motor 3 GT tahun 2017 setelah mengajukan proposal kepada pemda Kab. Bintan. Setelah kapal motor 3 GT diterimanya, AD dan dua rekannya mulai lepas dan tidak berhubungan dengan toke. Hasil pendapatannya bertambah karena yang bersangkutan dapat menentukan tempat penjualan ikan yang memiliki harga beli yang lebih baik, kadang-kadang dijual

langsung ke pasar di tempat pelelangan ikan ataupun ditempat-tempat penjualan perikanan lainnya. Dengan menggunakan kapal motor milik sendiri para nelayan tidak perlu membayar uang sewa kepada toke tetapi melainkan perlu menyisihkan uang pendapatan penjualan sebesar antara 5% sampai dengan 15% sebagai biaya perawatan dan perbaikan kapal motor agar selalu dalam kondisi baik.

Menurut AD, selaku ketua kelompok dia berdiskusi dengan anggota-anggotanya untuk menentukan besaran biaya perawatan kapal motor mereka. Setelah berdiskusi disepakatilah angka 15% sebagai angka biaya perawatan. Menurut PM saat ini mereka dalam satu bulan bisa turun melaut sebanyak 3 s.d 4 kali mengingat usianya telah mencapai 50 tahun. Dalam sekali melaut PM dan anggotanya pergi melaut selama kurang lebih 2 s.d 5 Hari. Setelah pulang melaut mereka memperoleh hasil tangkapan rata-rata 200 Kg ikan dengan berbagai jenis. Sebagai nelayan, sangat sulit untuk memprediksi jumlah hasil tangkapan karena kondisi laut sulit untuk dipastikan sehingga hasil tangkapan tidak dapat dipastikan. Namun demikian hasil tangkapan paling banyak dengan kapal motor 3 GT bantuan pemda ini pernah mencapai 600 Kg ikan tongkol dalam waktu 2 hari saja. Hasil penjualan 600 kg ikan tongkol tersebut sebanyak Rp 13.000.000. Tentu saja hasil itu bukan merupakan hasil yang sedikit atau buruk bagi tiga orang nelayan yang selama dua hari melaut. Namun tidak jarang juga hasil tangkapan nelayan dengan kapal motor 3 GT hanya sebanyak 180 kg.

Rata-rata hasil tangkapan dalam jangka waktu 4 hari berada pada jumlah 180 kg s.d 600 Kg. Dengan asumsi jumlah tangkapan 300 Kg setiap trip tersebut dapat diambil perhitungan untuk mengetahui pendapatan nelayan tradisional Kab. Bintan pasca mendapatkan bantuan kapal motor 3 GT dari pemerintah daerah. Komponen perhitungan sebagai berikut:

PN = Penghasilan nelayan per trip (Rp)

IPKM = Iuran pemeliharaan kapal motor 15% UPI

UPT = Upah tekong 5% UPI

TKPN = Tangkapan Nelayan (Kg)

JN = Jumlah nelayan (Org)

BO = Biaya Operasional (Rp)

HJI = Harga jual ikan (Rp)

UPI = Total uang penjualan ikan (Rp)

UPI = TKPN X HJI

Dengan komponen tersebut diperoleh angka ilustrasi sebagai berikut:

UPI = 300Kg X Rp18.000 = Rp. 5.400.000

IPKM = 15/100 X Rp. 5.400.000 = Rp. 810.000

UPT = 5 /100 X Rp. 5.400.000 = Rp. 270.000

PN = UPI – (IPKM+UPT + BO)/JN

$$= 5.400.000 - (810.000 + 270.000 + \text{Rp}2.000.000) / 2$$

$$= 5.400.000 - 3.080.000 / 2$$

PN = 1.160.000 (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Dalam satu kali turun ke laut penerima bantuan kapal motor sebenarnya memiliki perbedaan pendapatan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Hal ini disebabkan oleh karena lokasi penangkapan ikan dan lama waktu penangkapan ikan itu sendiri, oleh karenanya tidak ada rata-rata pendapatan yang pasti antara kelompok nelayan satu dengan yang lainnya, namun dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan dari hasil melaut ataupun kerja nelayan dengan memanfaatkan kapal motor 3 GT.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan SM 63 Tahun yang mengatakan bahwa mereka ketika pergi ke laut tidak melebihi waktu 2 hari, karena area operasi penangkapan ikan kelompoknya tidak terlalu jauh dari rumah. Namun yang pasti informan ini mengatakan telah merasakan peningkatan pendapatan yang cukup baik. Peneliti juga menanyakan kepada kedua orang ini mengenai tabungan. Ternyata kedua informan saat ini telah memiliki tabungan dari hasil pendapatan melaut. Jika sebelum ada perahu motor sendiri, mereka tidak bisa memiliki tabungan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kesulitan.

Selain menangkap ikan, perahu motor 3 GT yang mereka miliki akan digunakan untuk berbagai aktifitas yang dapat menghasilkan

uang. Hal ini dilakukan pada saat musim angin utara yang menyebabkan gelombang air laut menjadi tinggi dan berbahaya bagi aktivitas melaut yang jauh dari garis pantai. Informan SM dan AD mengatakan pada saat musim angin utara maka kapal 3 GT miliknya digunakan menjadi ojek laut untuk mengangkut barang-barang bahan bangunan, membawa semen, mencari pohon nibung untuk tiang pembuat jaring keramba apung atau kelong dan berbagai macam aktivitas lainnya.

5.5.1.2 *Penerima bantuan Kapal Motor Fiber 1 GT*

Pengumpulan informasi dilakukan terhadap 8 orang penerima bantuan perahu motor 1GT.

Berdasarkan informasi yang diberikan informan dapat diketahui bahwa penerima perahu motor 1GT merupakan nelayan yang aktivitas utamanya menangkap ketam (Kepiting) dengan menggunakan bubu. Pemberian bantuan berupa perahu motor 1GT berdasarkan temuan penelitian ini dinilai sebagai keputusan yang tepat untuk membantu nelayan dengan jenis ini meningkatkan pendapatan. Sebelum mendapatkan bantuan, nelayan penangkap ketam tidak memiliki perahu motor. Aktivitas mobilisasi alat tangkap dan hasil tangkapan utama mereka dalam menangkap ketam (kepiting) hanya ditunjang dengan sampan (Perahu) dayung. Selain menggunakan sampan, nelayan juga membutuhkan alat lain seperti bubu. Bubu dipergunakan sebagai sarana bagi nelayan sebagai media perangkap ketam. Jumlah bubu yang dipasang oleh nelayan sedikit banyak mempengaruhi hasil tangkap. Semakin banyak bubu maka semakin besar juga peluang bagi

nelayan untuk menghasilkan ketam. Bantuan perahu motor 1 GT ini, selain diberikan kepada nelayan penangkap ketam ada juga penerima perahu motor 1GT ini yang sebelumnya merupakan nelayan buruh dari kapal motor milik toke yang menangkap ikan di kawasan yang jauh dari garis pantai.

Informan dari salah satu nelayan yang berinisial SH mengatakan, bahwa sebelum mendapatkan bantuan perahu motor 1GT pendapatan harian berkisar antara Rp. 70.000 sampai dengan Rp. 100.000 perhari. Namun menurutnya pendapatan nelayan penangkap ketam tidak bisa diprediksi setiap harinya, hal itu sangat tergantung pada kondisi air laut. Jika kondisi air laut bagus maka biasanya pendapatan juga baik. Setiap hari paling tidak menurutnya dalam nelayan penangkap ketam dengan sampan bisa mendapatkan pendapatan bersih Rp 50.000. Sedangkan rata-rata pendapatan perbulan berkisar antara Rp 2.500.000.

Setelah mendapatkan bantuan perahu motor 1GT kehidupan nelayan penerima bantuan berangsur lebih baik penghasilan mulai mengalami peningkatan. Peningkatan penghasiln ini disebabkan oleh karena nelayan lebih mudah dalam kegiatan menangkap ketam. Nelayan dengan mudah mencapai lokasi atau titik titik tempat bubu diletakkan sehingga nelayan bisa memantau atau mengambil bubu untuk diperiksa apakah sudah berhasil mendapatkan ketam atau belum, bahkan meletakkan bubu di area yang lebih jauh dari sebelumnya. Jika dulu dengan sampan dayung, untuk berpindah-

pindah lokasi tempat meletakkan bubu memakan waktu yang cukup lama untuk sampai, karena kecepatan perahu yang tidak bermotor lambat sehingga membuat nelayan sulit dalam memeriksa bubu.

SH saat ini telah memiliki 2 buah perahu motor. Perahu motor yang kedua diperolehnya dengan cara membeli secara kredit. Perahu yang kedua itu dibeli pada tahun 2016 tepat setahun setelah SH menerima bantuan perahu motor 1GT dari pemda. Setelah menggunakan perahu motor 1GT pendapatan bersih SH bertambah 100 % yang awalnya satu hari paling tidak pendapatan bersihnya Rp. 50.000 sekarang telah berubah menjadi Rp 100.000. sedangkan dari sisi jumlah tangkapan sebelum menggunakan perahu motor 1GT sebanyak 5 kg s.d 6 kg ketam saat ini telah berhasil meningkatkan jumlah tangkapan menjadi 10 kg. SH mengakui bahwa dia mampu membeli perahu motor baru karena bisa menabung uang dari hasil bekerja sebagai nelayan ketam. Saat ini RM menjalankan 2 pekerjaan sekaligus. Sebagai nelayan penangkap ketam dan pengojek perahu motor. Turun ke laut memeriksa bubu hanya pada saat air laut kondisinya bagus pada pagi dan sore hari saja. Selebihnya memanfaatkan perahu yang baru untuk menjadi ojek laut.

Menurut informan SH, semua nelayan yang satu kelompok dengannya sebagai penerima bantuan perahu motor 1GT mendapatkan peningkatan pendapatan semua.

5.5.2 Bantuan budidaya Perikanan

5.5.2.1 *Penerima kawat bubu ranjungan*

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh tim dan hasil observasi lapangan pada dasarnya masyarakat yang menerima bantuan berupa kawat bubu ini sedikit sulit menghitung pendapatan antara sebelum diberikan bantuan dan paska pemberian bantuan. Secara operasional lapangan yang ditemukan dalam penelitian ini, dengan bertambahnya kawat bubu tidak serta merta langsung bisa mendapatkan peningkatan produksi perikanan yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan. Hal ini terjadi karena kawat bubu yang diberikan tidak bisa langsung dipakai untuk turun dilaut. Melainkan membutuhkan proses pembuatan/perakitan terlebih dahulu. Untuk proses perakitan memang tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi memerlukan peralatan tambahan seperti tali dan besi penyangga kawat bubu. Kenyataannya nelayan tidak memiliki besi tambahan untuk membuat bubu itu. Menurut keterangan dari informan (BNI) kebutuhan besi untuk membuat 1 buah tulang jaring kawat bubu membutuhkan kurang lebih satu batang besi utuh ukuran 4 inch. Setiap kawat bubu yang digunakan dilaut bisa bertahan kurang lebih dalam waktu 3 sampai dengan 4 bulan didalam air. Setelahnya kawat bubu mulai akan rusak serta patah dan akhirnya tidak dapat digunakan lagi karena kawatnya telah rapuh dan bolong.

Dikarenakan nelayan tidak mampu untuk membeli besi guna dipasangkan dengan kawat bubu baru, maka menyebabkan nelayan tidak langsung menggunakan kawat bubu tersebut melainkan menyimpannya terlebih dahulu. Kawat bubu yang baru hanya akan

digunakan sebagai pengganti kawat bubu lama yang sudah rusak karena terendam dalam laut. Mayoritas nelayan yang menangkap ikan dengan kawat bubu menggunakan metode bubu selam yang berarti kawat bubu yang dimiliki dijatuhkan didasar laut dan kemudian diatas kawat bubu tersebut diberi pemberat seperti batu.

Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sulit bagi nelayan yang menerima bantuan untuk merasakan peningkatan langsung pendapatan dari hasil tangkapan ikan. Target ikan yang dicari oleh nelayan penerima bantuan ini (Kelong) adalah ikan kerapu. Melihat dari pola penggunaan kawat bubu bantuan yang diterima oleh nelayan ini, peneliti berpendapat bahwa bantuan yang diberikan ini hanya berdampak meringankan beban nelayan dalam biaya operasional saja dan tidak sampai pada tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Namun demikian tetap saja bantuan kawat bubu ini merupakan modal tambahan yang berarti bagi nelayan dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan apabila mereka mampu mengelola keuangan hasil penjualan ikan dengan lebih baik.

Perhitungan modal tambahan dari bantuan kawat bubu tersebut dapat dihitung dengan mengalikan jumlah kawat bubu bantuan yang diterima dengan harga jual kawat bubu di pasaran. Jika seorang nelayan mendapat 5 gulung kawat bubu dan harga jual 1 gulung kawat bubu dijual dipasaran seharga Rp. 670.000 maka nelayan yang menerima kawat bubu diberi modal atau uang pasif (secara tidak langsung) sebesar **Rp. 3.350.000.** (untuk penerima kawat bubu tahun

2014. Sedangkan nelayan penerima kawat bubu tahun 2017 diberi modal sebesar **Rp 1.340.000**

5.5.2.2 *Penerima benih ikan Lele*

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, untuk pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan bibit dan indukan dapat dipastikan bahwa bantuan tersebut sudah diterima. Para penerima merupakan orang-orang yang tepat karena memang merupakan pembudidaya ikan yang sebelum mendapat bantuan dari pemerintah bintan memalui anggaran Dinas Perikanan merupakan pembudidaya aktif dan memiliki kolam dalam artian membudidayakan ikan merupakan pekerjaan utama mereka.

Bagi pembudidaya ikan terutama yang mendapatkan bantuan bibit (Bibit ikan lele) ketika mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah tentunya bantuan tersebut bisa langsung dimanfaatkan. Setelah mendapatkan bibit ikan maka langsung berdampak pada bertambahnya bibit ikan yang akan dipelihara oleh pembudidaya ikan. Artinya jika ada penambahan ikan yang dipelihara berarti akan ada penambahan ikan yang dijual. Penjualan ikan yang bertambah maka secara otomatis akan menambah pengasilan dari pembudidaya. Namun berdasarkan observasi, penelitian ini menemukan bahwa para pembudidaya tidak melakukan pemisahan antara hasil penjualan dari bibit ikan yang bersumber dari bantuan dan ikan yang memang dipelihara dengan modal mereka sendiri. Sehingga setelah satu kali panen maka ikan yang merupakan bantuan dari pemerintah hasil penjualannya tercampur

dengan hasil penjual ikan yang memang dimiliki oleh pembudidaya sebelumnya. Artinya pembudidaya tidak berminat untuk melakukan peningkatan investasi melalui peningkatan jumlah pembelian bibit ikan baru untuk dipelihara dan dibudidayakan. Hal ini memang bisa dibenarkan dengan argumentasi bahwa ketika pembudidaya ingin meningkatkan produksi perikanan tidak bisa hanya dicapai serta merta dengan meningkatkan jumlah benih, karena jika hanya benih yang ditingkatkan sementara kolam pembudidaya atau bak pemeliharaan tidak ada maka tidak dapat meningkatkan produksi perikanan. Setiap kolam atau bak telah memiliki kapasitas pemeliharaan masing-masing yang telah ditentukan oleh pembudidaya itu sendiri. Kolam ikan atau bak pemeliharaan yang terlalu padat akan menyebabkan ikan cepat mati. Artinya peningkatan pendapatan bagi pembudidaya yang diberikan bantuan bibit lele hanya terjadi sekali, yaitu pasca panen dari bibit yang diberikan itu sendiri.

Pola ini juga berlaku bagi pembudidaya yang mendapatkan bantuan indukan lele. Namun demikian bagi pembudidaya lele yang mendapat bantuan indukan secara tidak langsung merasakan manfaat yang lebih baik karena mereka tidak perlu membeli indukan untuk mendapatkan benih ikan lele karena paket induk ikan lele ini dapat digunakan selama dua tahun, tetapi lagi-lagi produksi tidak akan bertambah karena terbentur masalah kolam atau bak budidaya.

Berdasarkan pada fakta yang didapati dilapangan, penelitian ini melihat suatu pola tidak baik yang menunjukkan kelemahan komitmen

dalam pengelolaan keuangan dari para pembudidaya. Hal ini disebabkan pembudidaya telah merasa puas atau cukup dengan penghasilan yang mereka dapatkan sehingga mereka belum mau meningkatkan produksi mereka. Selain itu keterbatasan tenaga terampil menjadi salah satu penyebab yang menghambat. Keterbatasan ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan berinisial “AF” yang mengatakan bahwa jika tidak merawat sendiri kolam atau bak budidaya ikan maka hasil panen tidak akan berhasil karena untuk menghasilkan panen yang bagus maka ikan-ikan budidaya seperti lele harus melalui proses perawatan yang teliti dan telaten jika tidak maka bibit ikan akan mati.

5.5.2.3 *Penerima Indukan Nila*

Bagi pembudidaya yang mendapat indukan ikan nila mampu mendapatkan peningkatan pendapatan yang cukup baik. Hal ini bisa dilakukan oleh pembudidaya berinisial “ZF” yang mendapat paket bantuan 30 peket calon induk nila gesit. Pembudidaya ini mendapatkan bantuan dari pemerintah Kab. Bintan pada tahun 2015 dan bantuan tersebut masih ada sampai dengan saat ini. Penelitian ini mendapati bahwa bantuan paket calon indukan nila gesit sangat sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan, sebab yang bersangkutan merupakan pembudidaya penjual bibit ika nila. Namun, calon indukan yang masih ada saat ini sudah tidak produktif lagi karena terlalu tua. Keberhasilan pembudidaya dalam menghasilkan bibit ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan pakan yang juga diberikan oleh pemerintah. Menurut

ZF pendapatannya meningkat sekitar 25%. Peningkatan pendapatan juga mampu dilakukan oleh pembudidaya ikan jika yang bersangkutan mau terus menginvestasikan hasil pendapatan sedikit demi sedikit untuk menambah kolam dan peralatan pendukung lainnya.

5.5.2.4 *Penerima bibit ikan kerapu (Uang 42 juta)*

Berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan penerima bantuan bibit ikan pada awalnya diberikan bantuan berupa uang dan uang tersebut harus digunakan untuk membeli ikan. Para pembudidaya ikan ini membelanjakan sendiri uang ya diberikan oleh pemerintah daerah. pembudiaya membeli bibit ikan dari produsen lokal dan produsen dari pulau jawa. Rata-rata bibit ikan yang dibeli adalah jenis ikan kerapu sunu. Harga bibit ikan kerapu ini berkisar antara Rp 17.000 s.d 18.000 per ekor dengan ukuran 5-8 cm. Dalam waktu dua bulan pertama pembesaran, menurut MN adalah waktu yang paling kritis dalam tahap pembesaran. Jika tidak berhati-hati dalam pemeliharaan menyebabkan banyak ikan yang mati dalam fase tersebut karena berbagai macam sebab. Informan di wilayah Mantang mengatakan melalui program ini pada tiga tahun awal dia berhadil meningkatkan jumlah budidaya, dari awal mendapat bibit berjumlah 300 ekor dan kemudian 8 sampai 1 tahun kemudian setelah dipelihara berhasil menjualnya dengan hasil penjualan ± Rp. 17.000.000. dengan hasil tersebut yang bersangkutan meningkatkan jumlah ikan yang

dibudidaya menjadi 1000 ekor. Dan kemudian berhasil lagi membesarkannya. Kemudian setelah itu informan ini menambah kembali peliharaannya menjadi 1.500 ekor. Pada saat yang ketiga kalinya mencoba pembesaran bibit kerapau informan ini mengatakan bahwa ia mendapat kerugian besar karena hampir 80% dari total budidayanya mati dalam waktu 3 bulan saja.

Berbeda jalan dengan rekan satu kelompoknya berinisial AR yang mengatakan bahwa pada saat ini dia tidak memiliki keramba sebagai tempat untuk pemeliharaan ikan budidaya. AR mengatakan bahwa pada awalnya ia bukan merupakan pembudidaya ikan melainkan merupakan nelayan tangkap biasa. Namun karena menerima bantuan dari pemerintah AR mencoba untuk menekuni pekerjaan sebagai pembudidaya. Pada awal memperoleh bantuan AR mendapat ikan sebanyak 300 ekor dan juga mendapat jaring untuk budidaya sebagaimana rekan kelompok lainnya. Total pendapatan yang dihasilkan oleh AR pada hasil panen pertama kali ± Rp. 12.000.000. dari hasil panen tersebut AR membagi dua hasil penjualannya. Separuh digunakan untuk membuka usaha lain yaitu warung yang menjual barang dagangan kebutuhan rumah tangga. Sisanya digunakan untuk membeli bibit ikan kerapu lagi untuk di budidaya. Saat ini hasil dari budidayanya tidak terlalu banyak karena jumlah ikan budiayanya banyak yang mati.

Berbeda dengan informan yang berada di kecamatan Mantang, informan di Bintan pesisir Menurut penjelasan dari informan, mereka

berhasil membudidayakan ikan kerapu. Namun mereka mendapat kesulitan dalam membeli bibit ikan. Bibit ikan yang tersedia hanya bibit ikan yang disediakan oleh toke. Jika membeli bibit ikan dengan toke maka harga bibit lebih mahal walaupun dapat dibeli dengan cara mencicil. Jika membeli bibit dengan toke maka pembudiaya ketika menjual ikan hasil budidayanya juga harus dengan toke. Permasalahan muncul jika pembudidya berhubungan dengan toke. Pada saat membeli bibit pembudidaya dikenai harga tinggi sedangkan ketika menjual hasil budidayanya ikan yang dijual dihargai lebih murah oleh toke dibandingkan dengan harga dipasaran. Namun nelayan tidak dapat menolak, karena jika ketahun menjual ikan budidaya yang bibitnya dibeli dari toke setempat maka pembudiaya yang bersangkutan tidak akan diberi bibit lagi oleh toke. Artinya secara teknis budidaya pembudidaya di kecamatan bintang pesisir tidak memiliki masalah.

5.6 Mengidentifikasi jenis bantuan yang memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan nelayan.

Metode analisis data dalam mengidentifikasi jenis bantuan yang memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan nelayan atau besarnya pendapatan nelayan dan pembudidaya pada penelitian ini yaitu pendapatan bersih atau keuntungan merupakan selisih antara penerimaan atau pendapatan hasil produksi dan semua biaya yang dikeluarkan selama melakukan produksi (Pratama., Gumilar., & Maulina, 2012; Rahim &

Hastuti, 2016; Zuriat, 2016). Adapun rumus dalam menilai keuntungan pendapatan tersebut sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

$$\Pi = TR - TC$$

$$P = \text{Price (Rp/Kg)}$$

$$Q = \text{Quantity (Kg)}$$

$$\Pi = \text{Profit (Keuntungan)}$$

$$TR = \text{Total Revenue}$$

$$TC = \text{Total Cost}$$

Pada penelitian ini, data yang ditampilkan untuk melihat dampak terhadap pendapatan nelayan dan pembudidaya merupakan penghasilan bersih atau keuntungan (profit) sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan sebagai pembandingan besaran peningkatan pendapatan dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing dari kedua sektor perikanan tersebut.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan terkait dengan manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat dilihat dari sisi pendapatan secara umum bahwa pendapatan nelayan perikanan tangkap dan pembudidaya setelah menerima bantuan mengalami kenaikan sebesar 67 %. Rata-rata pendapatan penerima manfaat sebelum menerima bantuan adalah Rp 3.127.778,- dan pendapatan penerima manfaat setelah menerima bantuan meningkat menjadi Rp 5.219.444,-. Untuk mengetahui secara detail

terkait jenis bantuan yang memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan penerima manfaat diuraikan sebagai berikut.

5.6.1 Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagaimana telah disampaikan oleh Sjarief Widjaja selaku direktur DJPT bahwa Tujuan pemberian bantuan sarana penangkapan ikan yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan sumber daya perikanan tangkap (Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, 17 April 2017). Ansar Ahmad selaku Bupati Bintan (Warta Indonesia, 6 November 2014) menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan akan menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan tersebut sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan berdasarkan permintaan atau pengusulan yang disampaikan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Bintan. Pengambilan keputusan ini juga didukung berdasarkan hasil survey yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kebutuhan para nelayan baik itu Kapal Motor Kayu 3 GT dan Kpala Motor Fiber 1 GT. Secara umum pengusulan sarana penangkapan ikan didominasi pada jenis kapal motor fiber 1 GT.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti dari beberapa informan penerima bantuan di kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan maka jenis bantuan yang memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan nelayan pada bantuan perikanan tangkap adalah bantuan kapal motor fiber 1 GT dan kapal motor

3 GT. Uraian penjelasan dari kedua jenis bantuan sarana penangkapan ikan tersebut sebagai berikut.

5.6.1.1 Kapal Motor Fiber 1 GT dan Kapal Motor Kayu 3 GT

Pemberian bantuan sarana perikanan tangkap jenis kapal motor fiber 1 GT telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada masyarakat nelayan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 dengan menggunakan APBD. Khusus untuk kawasan Minapolitan Pemerintah Kabupaten Bintan telah mendistribusikan sebanyak 52 unit kapal motor fiber 1 GT dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bintan Timur : 9 unit pada tahun 2015
2. Kecamatan Bintan Pesisir
 - a. 10 unit pada tahun 2015
 - b. 10 unit pada tahun 2017
3. Kecamatan Mantang
 - a. 8 unit pada tahun 2015
 - b. 15 unit pada tahun 2017

Sementara itu, untuk bantuan jenis kapal motor kayu 3 GT, Pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 5 Unit untuk kawasan Minapolitan sejak tahun 2014 hingga 2017. Khusus untuk penerima bantuan armada kapal motor kayu 3 GT diberikan kepada kelompok yang terdiri 3 orang nelayan dan akan mendapatkan 1 unit armada atau sarana perikanan tangkap. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kecamatan Bintan Timur

- a. 1 unit pada tahun 2014
 - b. 1 unit pada tahun 2017
2. Kecamatan Mantang
- a. 1 unit pada tahun 2015
 - b. 2 unit pada tahun 2017

Sarana perikanan tangkap ini sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai target peningkatan produksi perikanan. Selain itu, aspek kesejahteraan masyarakat nelayan merupakan tujuan utama yang harus dicapai pemerintah dalam memberikan sarana perikanan tangkap tersebut. Terdapat banyak indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan salah satunya adalah dari sisi pendapatan nelayan. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan nelayan setelah mendapatkan bantuan sarana perikanan tangkap sebagai berikut.

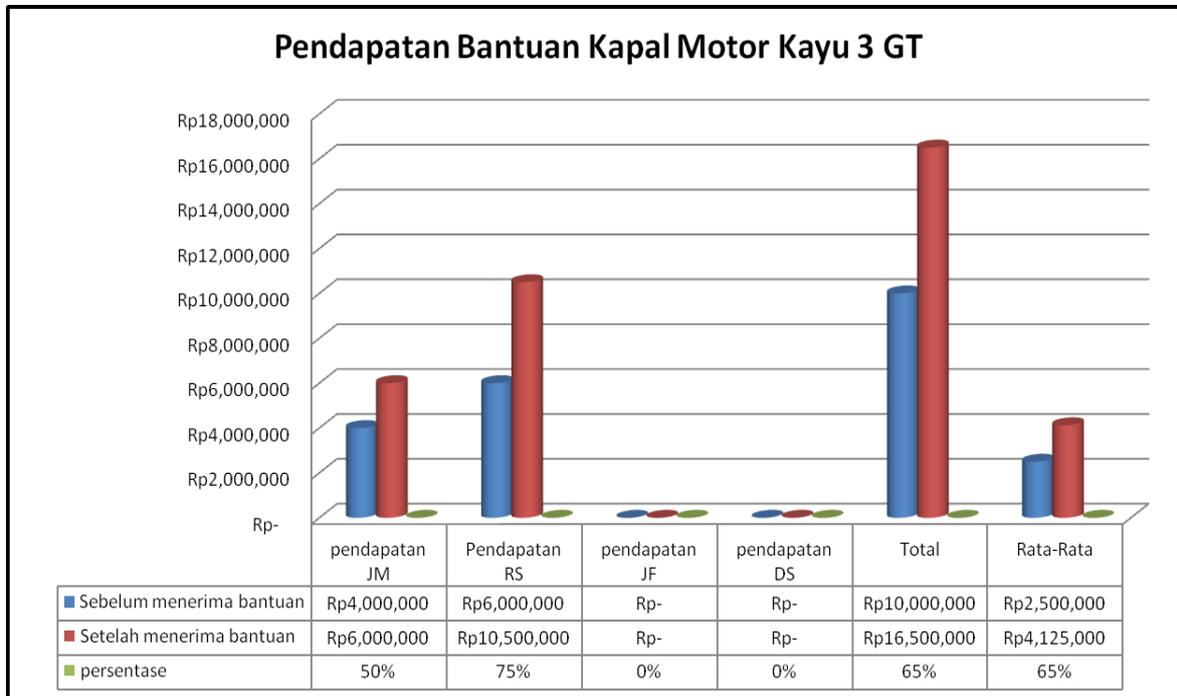
Tabel. 5.

Pendapatan Bantuan Kapal Motor Fiber 1 GT

No	Uraian	Sebelum menerima bantuan	Setelah menerima bantuan	persentase
1	Pendapatan AD	Rp 1,250,000	Rp 3,750,000	200%
2	Pendapatan SM	Rp 1,250,000	Rp 3,750,000	200%
3	Pendapatan AS	Rp 1,300,000	Rp 5,000,000	285%
4	Pendapatan ES	Rp 4,000,000	Rp 7,000,000	75%
5	Pendapatan UR	Rp 2,500,000	Rp 4,000,000	60%
6	Pendapatan MS	Rp 3,500,000	Rp 6,500,000	86%
7	Pendapatan SH	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000	100%
8	Pendapatan MA	Rp 4,500,000	Rp 6,000,000	33%

Total	Rp 20,300,000	Rp 40,000,000	97%
Rata-Rata	Rp 10,150,000	Rp 20,000,000	97%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018



Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan nelayan telah terjadi bagi setiap penerima bantuan kapal motor fiber 1 GT. Rata-rata peningkatan pendapatan nelayan mencapai 97 % setelah menerima bantuan. Sedangkan peningkatan pendapatan bantuan jenis sarana tangkap kapal motor kayu 3 GT setelah menerima bantuan rata-rata mencapai 65 %. Hal ini terjadi karena bantuan tersebut sangat membantu nelayan dalam menjalani aktivitasnya sebagai nelayan. Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan nelayan tersebut sebagai berikut:

1. Perubahan armada atau sarana perikanan yang dimiliki

Mayoritas armada atau sarana perikanan yang dimiliki oleh nelayan di kawasan minapolitan sebelum menerima bantuan adalah sampan dan bahkan tidak memiliki armada. Bagi yang memiliki sampan selama ini mereka melakukan aktivitasnya tidak dapat menjangkau area yang cukup jauh atau tempat dimana populasi ikan lebih banyak tersedia. Hal ini disebabkan karena kemampuan untuk mendayung sampan yang tidak memungkinkan untuk mencapai area tersebut. Selain itu juga berkaitan dengan resiko yang akan dihadapi para nelayan ketika sewaktu-waktu terjadinya perubahan cuaca di laut. Rata-rata hasil produksi dengan menggunakan armada sampan berkisar antara 2-5 kg setiap kali melaut. Dengan adanya pemberian bantuan armada perikanan ini menyebabkan terjadinya perubahan lokasi tujuan nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut dimana mereka bisa menjangkau area yang lebih jauh dari sebelumnya. Jarak tempuh setelah menggunakan armada bantuan bisa mencapai 2-3 miles dan bahkan ada yang menjangkau 7 miles. Jika ditinjau dari hasil produksi terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana hasil tangkapan tersebut rata-rata bisa mencapai 5-20 kg setiap kali melaut dan bahkan bisa mencapai 30 kg setiap kali melaut. Hal ini jelas memberikan dampak terhadap pendapatan nelayan dimana jika hasil produksi meningkat maka pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan.

2. Tidak adanya keterikatan dengan Tauke (Patron-Client)

Bagi beberapa penerima bantuan merasa sangat terbantu untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan. Program bantuan armada tersebut memberikan suatu perubahan bagi nelayan buruh yang

selama ini bekerja dengan menggunakan armada tauke (patron-client). Jika menggunakan armada yang disediakan tauke maka mempengaruhi pendapatan yang akan dibawa pulang oleh setiap nelayan dimana adanya pembagian yang cukup besar bagi tauke setiap kali nelayan melaut dimana akan dilakukan pemotongan sebesar 20% sebagai biaya pemeliharaan armada yang dimiliki oleh tauke. Secara umum, System pembagian hasil seperti ini antara tauke (juragan kapal) dengan ABK sudah berlaku umum seperti yang disampaikan oleh Naim (2011) dimana tauke atau juragan kapal akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari penghasilan ABK.

Selain itu, hasil tangkapan seyogyanya akan dibeli oleh tauke dengan harga dibawah standar pada umumnya yang bisa mencapai Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per/kg. hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dimana penetapan harga oleh Manoarfa *et.al* (2015) bahwa mitra (pemodal) tidak layak yang mengindikasikan bahwa nelayan (terutama modal melaut yang didapatkan melalui modal pinjaman dari tauke atau juragan atau pemodal) dalam posisi nilai tawar yang lemah dan tidak memiliki kebebasan dalam menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar.

Adanya bantuan dari pemerintah ini memberikan daya baru bagi nelayan untuk melepaskan diri dari adanya keterikatan tersebut. Hal ini memiliki dampak dalam meningkatkan pendapatan nelayan dimana mereka bisa bebas untuk menjual hasil tangkapan. Selain itu, nelayan juga bisa menentukan sendiri untuk biaya pemeliharaan armada dan bahkan nelayan tersebut dapat menentukan besaran uang dari

pendapatan melaut untuk disisihkan guna mempersiapkan biaya pemeliharaan armada tersebut. Fakta yang terjadi ini merupakan kendala dimana sistem bagi hasil masih menggunakan sistem bagi hasil dari tradisi setempat (Naim, 2011). Namun demikian, system pembagian hasil yang mengadopsi dari system patron-client ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan nelayan. Seyogyanya, system yang diadopsi ini juga telah memikirkan dan merencanakan pembagian hasil untuk kepentingan dari keberlanjutan kelompok nelayan dimasa mendatang.

3. Intensitas melaut

Keadaan iklim sangat menentukan tingkat keseringan nelayan untuk pergi melaut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti rata-rata nelayan melaut dalam sebulan berkisar 20-25 hari. Tidak adanya ikatan kerja dengan siapapun membuat nelayan bebas menentukan kapan mereka harus pergi melaut dan kapan mereka harus pulang dan tergantung dari setiap individu masing-masing. Rata-rata dalam sehari nelayan yang menggunakan kapal motor fiber 1 GT melaut hanya 8-10 jam (pergi pagi pulang siang) atau istilah yang sering digunakan adalah *one day fishing* (Satria, 2015; Arnawa, 2016). Semakin baik cuaca pada setiap waktu maka semakin besar kemungkinan nelayan di kawasan minapolitan untuk pergi melaut. Namun demikian, intensitas melaut nelayan bisa saja menurun dari pada idealnya yang disebabkan oleh cuaca yang kurang baik. Selain itu, faktor istirahat yang terlalu panjang juga bisa mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Beberapa dari informan menyampaikan

bahwa hal ini bisa terjadi karena merasa masih memiliki uang hasil penjualan tangkapan sebelumnya. Lebih lanjut, usia dan kesehatan para nelayan juga menjadi factor yang dapat mempengaruhi intensitas kerja para nelayan. Semakin berumur dan kesehatan yang semakin menurun mengakibatkan semakin berkurangnya intensitas melaut (kerja) para nelayan.

4. Kebebasan dalam menjual hasil tangkapan (akses terhadap pasar)

Pasar merupakan salah satu faktor terpenting untuk menyalurkan (menjual) hasil tangkapan nelayan. Salah satu kendala yang diungkapkan oleh Naim (2011) berkaitan dengan pasar adalah tidak adanya jaminan stabilitas harga pasar. Belum adanya tempat penampungan ikan menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan dengan tauke. Setiap tauke memiliki keberagaman dalam menetapkan harga ikan berdasarkan jenisnya masing-masing. Biasanya nelayan akan mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan harga tertinggi yang diambil dari setiap tauke. Hal ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan bagi nelayan meskipun tidak terlalu signifikan.

5.6.1.2 *Bantuan Bubu Rajungan dan Kawat Bubu*

Untuk jenis bantuan bubu rajungan dan kawat bubu mengalami dampak yang paling rendah terhadap pendapatan nelayan dan bahkan tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan para nelayan. Ada beberapa factor yang menyebabkan bantuan tersebut tidak berjalan dengan efektif yaitu:

1. Penerima bantuan tidak pernah mengajukan bantuan tersebut khususnya bantuan dengan jenis kawat bubu melainkan diajukan oleh pihak yang tidak pernah mereka ketahui. Untuk diketahui bahwa bantuan yang diterima oleh nelayan tersebut hanya berbentuk kawat gulungan dan bukan bubu yang siap pakai. Ini artinya bahwa nelayan tersebut perlu untuk membeli beberapa material seperti kayu penopang, paku dan sebagainya untuk dirakit sehingga menjadi bubu yang siap pakai. Oleh karena itu, bantuan tersebut dirasakan tidak tepat sasaran oleh para nelayan karena mereka menganggap bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para nelayan tersebut. Berdasarkan diskusi bersama informan didapati bahwa bantuan tersebut diberikan oleh salah satu partai politik yang cukup besar di Kabupaten Bintan dan bukan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Selanjutnya, bantuan yang telah diterima tersebut hanya disimpan hingga material menjadi lapu dan berkarat. Kawat bubu tidak pernah dimanfaatkan untuk dijadikan bubu yang siap pakai sebagai API. Namun demikian, penerima bantuan juga tidak berani untuk menjual material tersebut dikarenakan takut sewaktu-waktu ada tim monitoring yang akan mengecek keberadaan material tersebut.
2. Penerima bantuan mengajukan bantuan tersebut dan bahkan sudah mendapatkan dua kali dengan tahun anggaran yang berbeda namun tidak bisa menjaga keberlanjutan untuk memiliki alat penangkapan ikan (API) di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh daya tahan API ini tidak mampu untuk bertahan (masa penggunaan

API) dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan keterangan yang didapatkan melalui informan bahwa API jenis kawat bubu hanya mampu bertahan dalam kisaran 3-4 bulan saja. Selanjutnya, penerima bantuan tidak pernah melakukan persiapan tabungan atau menyisihkan pendapatan hasil tangkapan untuk melakukan pembelian material kawat bubu sebagai persiapan menyediakan API yang baru.

3. API jenis kawat bubu rentan hilang sewaktu nelayan menebarkan API di lautan sehingga para nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapannya. Berdasarkan keterangan dari informan bahwa hilangnya API di lautan bisa terjadi karena **pertama**, terbawa arus sehingga nelayan kesulitan untuk menemukan kembali posisi bubu yang ditebarkan dan **kedua**, informan meyakini bahwa bubu yang mereka tebarkan tersebut telah di curi oleh nelayan-nelayan yang tidak bertanggungjawab.

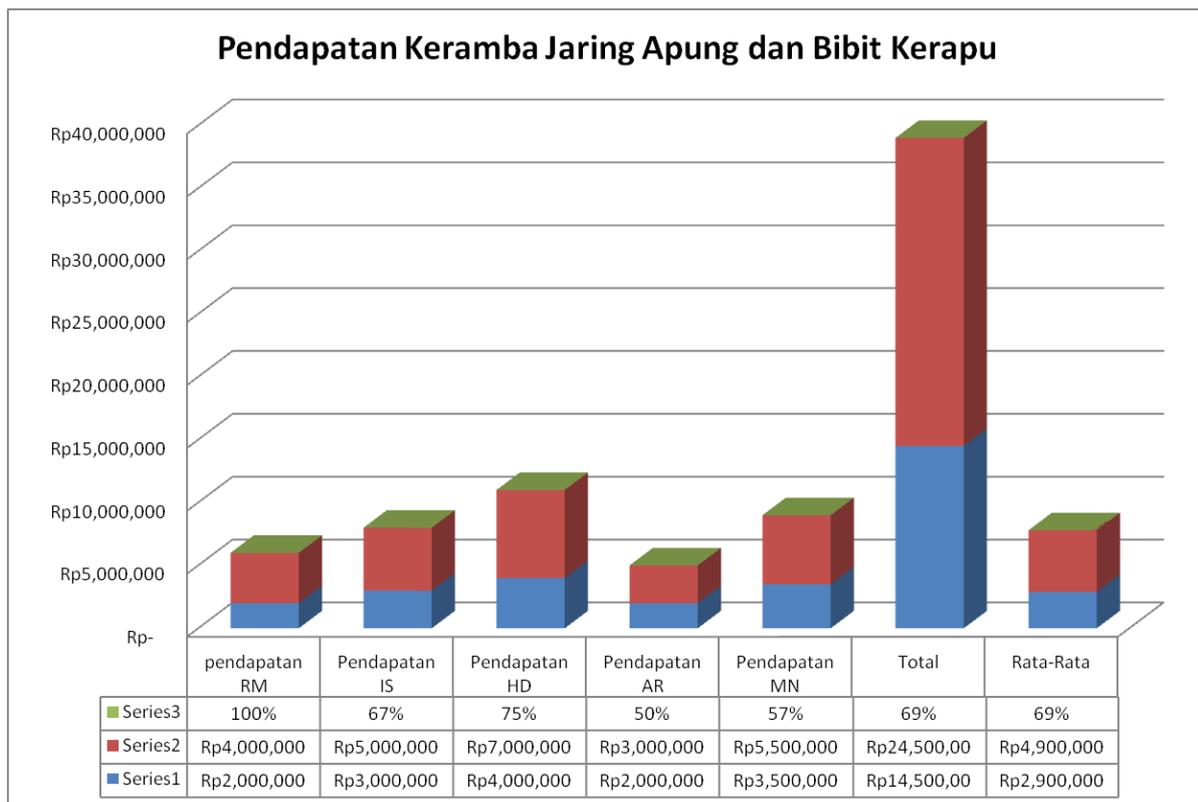
5.6.2 Pembudidaya

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/Per-DJPB/2017 Tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah prasarana dan sarana budidaya berbasis kelembagaan tahun 2017 maka terdapat banyak jenis bantuan yang dapat disalurkan kepada setiap penerima baik bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara umum bantuan tersebut jika dikelola dan ditangani secara serius oleh setiap penerima memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan bagi setiap penerima bantuan tersebut. Namun demikian, dari

berbagai jenis bantuan tersebut khususnya pada kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan memiliki keberagaman terhadap dampak peningkatan pendapatan bagi setiap pembudidaya. Berdasarkan ulasan sebelumnya maka didapati bahwa jenis bantuan yang memiliki dampak terbesar sebagai berikut:

5.6.2.1 Keramba Jaring Apung dan Bibit Kerapu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh tim kepada beberapa penerima bantuan maka jenis bantuan keramba jaring apung dan bibit kerapu memiliki peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dimana jika melihat perbandingan pendapatan pembudidaya air laut antara sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan maka terjadi peningkatan rata-rata sebesar 69 %.



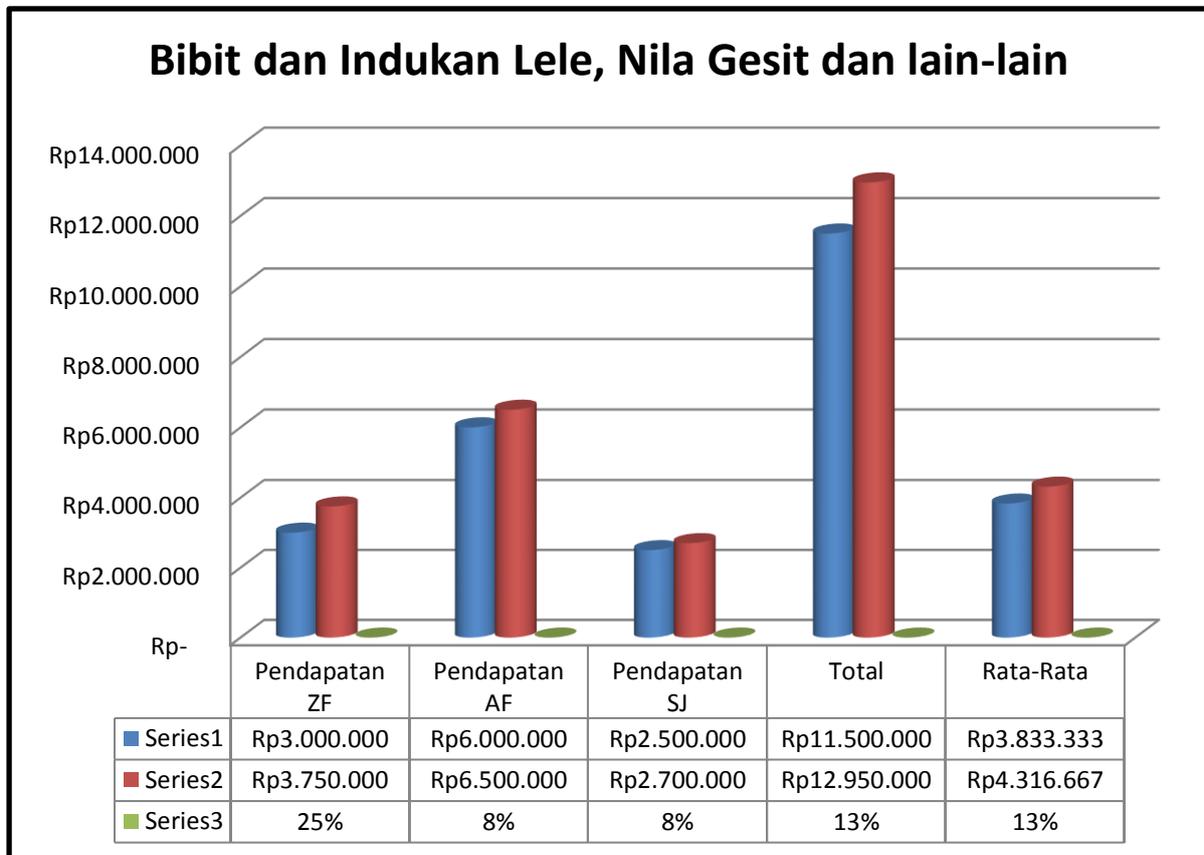
Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Signifikansi peningkatan pendapatan untuk jenis bantuan keramba jaring apung dan bibit ini bergantung pada metode dan keahlian dari setiap pembudidaya. Semakin kecil persentase kematian bibit dalam proses pembesaran maka semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh pembudidaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan didapati bahwa selama proses pembesaran berhasil menghidupkan sebesar 40 % maka baru mampu untuk mengembalikan biaya operasional. Pada kenyataannya bahwa kemampuan pembudidaya untuk menghidupkan dan membesarkan ikan rata-rata mencapai 60 %. Fase yang paling sulit dalam menghidupkan bibit tersebut berada pada umur 2-3 bulan. Selain itu, rentan terhadap penyakit ikan juga mengancam proses menghidupkan dan pembesaran ikan tersebut hingga ikan tersebut layak untuk dijual. Rentang yang ideal dan memiliki nilai jual tinggi berkisar antara 0,6 – 1 Kg. Harga normal untuk kerapu cantang bisa mencapai Rp. 120.000/Kg.

Untuk pasokan bibit kerapu di kawasan Minapolitan sendiri hanya memiliki 2 penyedia (pemasok) yang terdapat di Kijang dan di Batu Licin. System pembelian bibit bisa dilakukan secara tunai dan hutang. Sementara untuk pemasaran hasil budidaya harus dipasarkan kepada penyedia bibit tersebut. Ada beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh pembudidaya jika mereka memasarkan produk ke pihak yang lain maka tidak akan diberikan pasokan bibit kembali di kemudian hari kepada pembudidaya tersebut. Hal ini berlaku kepada pembeli bibit secara tunai maupun secara hutang. Selain itu, jika pembudidaya yang melakukan pembelian secara

hutang maka akan mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga normalnya yaitu berkisar Rp 110.000/kg.

5.6.2.2 Budidaya Nila Gesit , Bibit lele, Indukan Lele, bahan pembuatan Kolam dan sebagainya



Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Secara keseluruhan peningkatan pendapatan pada bantuan sector budidaya tidak memiliki kenaikan terlalu signifikan dimana hanya mencapai 13 %. Pendapatan pembudidaya sebelum menerima bantuan berkisar Rp 3.833.333,- dan setelah menerima bantuan pendapatan pemdudidaya meningkat menjadi Rp 4.316.667,-. Hal ini disebabkan bentuk bantuan yang diberikan hanya berupa penambahan bibit dan indukan yang mana tidak dapat mempengaruhi peningkatan jumlah produksi budidaya yang

disebabkan kapasitas atau daya tampung untuk pembesaran yang dimiliki oleh pembudidaya masih tetap sama dengan sebelumnya setelah pembudidaya mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan ditemukan bahwa sebelum dan setelah menerima bantuan para pembudidaya memiliki kolam dengan jumlah dan kapasitas yang sama dimana jika melihat target pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan tidak akan pernah terjadi dan sulit untuk dicapai. Hal ini disebabkan karena setiap kolam yang dimiliki pembudidaya memiliki batas maksimal yang bergantung pada ukuran dan kapasitasnya masing-masing sementara penambahan kolam tidak pernah dilakukan oleh pembudidaya.

Selanjutnya, dampak bantuan yang dapat dirasakan oleh pembudidaya sebagai berikut:

1. Setelah menerima bantuan maka Pembudidaya tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit dan indukan ikan untuk satu kali fase pembesaran atau pembenihan.
2. Pembudidaya tidak mengeluarkan biaya pakan pada satu periode yang seharusnya memerlukan pengeluaran biaya usaha
3. Pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk membeli bibit, indukan dan pakan tidak digunakan untuk menambah kuantitas persediaan usaha (penambahan kolam).
4. Dengan tidak adanya penambahan kolam maka jumlah produksi yang dihasilkan juga sama dengan sebelum pembudidaya menerima bantuan

Selain fenomena diatas, tidak adanya standar harga pasar yang ditetapkan juga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Hal tersebut merupakan kendala bagi nelayan dan pembudidaya yang mana tidak adanya jaminan stabilitas harga pasar (Naim, 2011). Fluktuasi harga pasar ini disebabkan banyak faktor seperti adanya pasokan ikan budidaya dari kota Batam yang merupakan pasokan dari Malaysia, adanya pembudidaya musiman yang menjual hasil budidaya dibawah harga normal, adanya pembudidaya utama yang sanggup melepaskan hasil produksi dibawah harga normal serta tidak adanya kelompok organisasi pembudidaya di Kabupaten Bintan dan di Kota Tanjungpinang yang menyebabkan tidak adanya standar harga yang tetap yang harus disepakati secara bersama.

BAB VI KONKLUSI, REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 Konklusi kajian

Adapun konklusi dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Bintan masih terdapat hal-hal yang kurang baik seperti regulasi pemberian bantuan, SOP, pengusulan serta pemeliharaan dan pendampingan.
2. Identifikasi permasalahan yang muncul dilapangan dalam rangka pemberian bantuan sebagai berikut: (1). Adanya manipulasi data oleh penerima bantuan atau pengusul bantuan (2). Adanya ketidaksesuaian data antara pengusul dengan penerima bantuan (*tidak pernah mengusulkan dan tidak menerima bantuan tetapi bantuan tetap disalurkan kepada nama yang berbeda*) (3). Besarnya pengaruh intervensi politik dalam menentukan penerima bantuan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya (4). Adanya penerima bantuan yang mendapatkan bantuan dua kali pada tahun yang berbeda sementara masih ada calon penerima yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
3. Pelaksanaan pembinaan pasca pemberian bantuan teridentifikasi belum dilaksanakan secara baik yang dapat di tinjau dari pelaksanaan prosedur pembinaan secara sistematis dan belum maksimalnya koordinasi antara satuan tugas yang ada dilapangan

4. Pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan perlu mendapat perhatian agar dapat mencapai kehidupan nelayan yang sejahtera dan berkualitas.
5. Terjadinya peningkatan pendapatan yang signifikan pada jenis bantuan Kapal Motor Fiber 1 GT, KJA dan Bibit Kerapu, Kapal Motor Kayu 3 GT dan Bantuan Bibit Kerapu. Sebaliknya, untuk jenis bantuan Bubu Ranjungan, Kawat Bubu, Bibit lele dan nila gesit, Indukan lele dan nila gesit, dan lain-lain tidak menunjukkan dampak yang terlalu signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan Nelayan dan Pembudidaya memberikan dampak positif terhadap pendapatan penerima bantuan. Oleh karena itu, program pemberian bantuan ini dapat dilanjutkan dengan melakukan beberapa perbaikan/revisi

6.2 Rekomendasi Langkah-Langkah

6.2.1 Sektor Perikanan Tangkap

1. Menyusun dan membuat bank data nelayan berbasis TI yang terdiri dari nama, alamat, contact person, koordinat tempat tinggal, jenis bantuan yang pernah diterima baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun pihak swasta
2. Memberikan pelatihan teknis terkait jenis bantuan yang diberikan
3. Memberikan pendamping teknis lapangan

4. Memberikan pendamping perencanaan keuangan bagi penerima bantuan
5. Menyediakan radio komunikasi bagi nelayan yang menggunakan Kapal Motor terutama Kapal Motor diatas 3 GT
6. Khusus untuk jenis bantuan kawat bulu pemerintah disarankan untuk memberikan bantuan API siap pakai
7. Memastikan dan membimbing kelompok nelayan yang sudah ada melalui pembinaan kegiatan manajemen organisasi
8. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkala
9. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugas-tugas pendamping/penyuluh

6.2.2 Sektor Perikanan Budidaya

1. Menyusun dan membuat bank data pembudidaya berbasis TI yang terdiri dari nama, alamat, contact person, koordinat tempat tinggal, jenis bantuan yang pernah diterima baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun pihak swasta, data kapasitas produksi berdasarkan jenis budidaya
2. Memastikan tujuan pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada pembudidaya.
3. Memastikan penerima bantuan memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah produksinya yang dilihat dari (a). ketersediaan lahan budidaya (b). Memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha menjadi lebih

besar dan tidak memberikan bantuan kepada pembudidaya yang berorientasi sebagai pedagang

4. Melaksanakan pelatihan bagi pembudidaya mengenai (1). Pembuatan dan perawatan kolam (2). Pola pemberian pakan dan pakan alternatif (3). Penggunaan bibit unggul dan penambahan probiotik secara teratur (4). Pembuatan pengamanan dengan pagar baring (5). Pengenalan jenis penyakit ikan budidaya
5. Memberikan pendamping perencanaan keuangan bagi penerima bantuan
6. Memastikan pembentukan kelompok atau kelompok penerima bantuan pemerintah daerah bukan kelompok yang dibentuk sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi penerima bantuan, melainkan merupakan kondisi nyata bahwa ada pekerjaan bersama yang dilakukan oleh anggota kelompok.
7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkala
8. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugas-tugas pendamping/penyuluh

6.3 Rekomendasi Kebijakan

Adapun rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan terutama bagi Dinas Perikanan dalam melaksanakan program bantuan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Bupati atau minimal Surat Keputusan Kepala Dinas tentang SOP hibah bantuan perikanan tangkap yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan
2. Menetapkan program bank data pada rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bintan pada tahun 2019
3. Merekomendasikan perubahan pemberian bantuan berupa kawat bubu menjadi API yang siap pakai
4. Dalam rangka untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, pemerintah Kabupaten Bintan dianjurkan untuk mengganti bantuan yang diberikan berupa bibit dan indukan menjadi pembuatan kolam permanen
5. Dalam rangka untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, pemerintah Kabupaten Bintan dianjurkan untuk menambah jenis yang dapat disesuaikan dengan kemajuan teknologi API yang lebih modern misalnya menggunakan GPS dan Fish Finder

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi, H., I., (2016). Efektivitas Dan Dampak Program Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau (Studi Di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Amanah, S., & Farmayanti, N., (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani – Nelayan, Keunikan Agroeko sistem dan Daya Saing*. Jakarta: Yayasan Psutaka Obor Indonesia.
- Amwas, O. M., (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, S., (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Arnawa, I. K., Purnama, I. B., Arisena, G. M. Korri., (2016). Dampak Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*. 4(1). 47-55.
- Badan Pusat Statistik, (2016). *Bintan Dalam Angka 2016*. Bintan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.
- Badan Pusat Statistik, (2017). *Bintan Dalam Angka 2017*. Bintan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan
- Badan Pusat Statistik, (2017). *Kecamatan Bintan Timur dalam Angka 2017*. Bintan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan
- Badan Pusat Statistik, (2017). *Kecamatan Bintan Pesisir dalam Angka 2017*. Bintan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan
- Badan Pusat Statistik, (2017). *Kecamatan Mantang dalam Angka 2017*. Bintan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan

- Badan Pusat Statistik, (2018). *Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau September 2018*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- Blaine R. Worthen, James R. Sanders, 1979. *Educational Evaluation Alternative Approaches And Practical Guidelines*.
- Bonser, C. F., McGregor, E. B. Jr., Oster, Jr. C. V. (1999). *American public policy problems: An introductory guide, (2nd ed.)*. New Jersey: Prentice Hall.
- Budiono, M. W., Wiyono, E.S., & Sudarmo, P.S., (2017). Persepsi Nelayan Terhadap Program Bantuan Alat Penangkapan Ikan Di Kecamatan Sungailiat. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Matematika, Sains dan Teknologi 2017*. Universitas Terbuka Convention Center. Hal. 119-130.
- Dye, T. R. (2000). *Understanding Public Policy: (10th ed.)*. New Jersey: Prentice Hall.
- Easton, D. (1984). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Bina Jakarta: PT Bina Aksara.
- Fauzi, A., (2010). *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Fathurrohman, Yusuf Enril., (2016). *Model kerjasama kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) pada pemasaran agribisnis ikan gurami di kabupaten banyumas*. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.<http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika>.AgriekonomikaVolume5,Nomor2,2016
- Hartik, A., (14 Agustus 2018). Menteri Susi: Stok Ikan Indonesia Naik Jadi 12,5 Juta Ton. *Kompas.com* diakses pada: <https://regional.kompas.com/read/2018/08/14/18581041/menteri-susi-stok-ikan-indonesia-naik-jadi-125-juta-ton>.

- Hikmat, H., (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Revisi*. Bandung: Humaniora
- Huraerah, A., (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*. Edisi Kedua. Bandung: Humaniora
- Kartasasmita, G. (1997). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kasubbag Perencanaan dan Anggaran KKP (8 November 2017). *Isu Strategis Perikanan Tangkap 2018*. Diakses pada <http://dkp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Paparan-Ditjen-Tangkap.pdf>
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. (17 April 2017). Perkuat Armada Kapal Nasional 2017, KKP Bangun 1.068 Kapal Perikanan. Diakses pada: <https://kkp.go.id/artikel/1612-perkuat-armada-kapal-nasional-2017-kkp-bangun-1-068-kapal-perikanan>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). *Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2017*. Diakses pada : <http://kkp.go.id/artikel/2628-daftar-penerima-bantuan-pemerintah-tahun-2017>
- Manoarfa, H., Chalil., Taqwa, E., (2015). Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Nelayan Tangkap Berbasis Tepung Ikan untuk Meraih Potensi Pasar Pakan Ternak Unggas sebagai Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Tepung Ikan di Indonesia (Survey di Sentra Produksi Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah). *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*. 13(1). Hal. 44-55
- Mardikanto, T., & Soebiato, P., (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Naim, A., (2011). Analisis Karakteristik Transformasi Industri Penangkapan Dalam Komunitas Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Masyarakat

- Nelayan Di Desa Panambuang Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)*. 4(2). Hal. 22-37
- Nurfakhrana, Y., (2016). Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Tesis*. Universitas Indonesia
- Panama, N., (13 Desember 2017). Nelayan Bintan Dapat Bantuan 108 Kapal Motor. *AntaraNews.com*. diakses pada : <https://www.antaraneews.com/berita/671393/nelayan-bintan-dapat-bantuan-108-kapal-motor>
- Pratama, D. S., Gumilar, I., & Maulina, I., (2012). Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur Di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. 3(3). Hal. 107-116
- Rahim, A., & Hastuti, D. R. Dwi., (2016). Determinan Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Wilayah Pesisir Barat Kabupaten Barru. *J. Sosek KP*. 11(1). Hal. 75-88
- Reressy, S., Rengkung, L. R., & Katiandagho, T. M., (2016). Strategi Pengembangan Subsektor Perikanan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku. *ASE*. 12(1). 127 - 144
- Saparinto, C., (2012). *Budi Daya Ikan Di Kolam Terpal*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya
- Satria, A., (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stewart, Jr. J., Hedge D. M. & Lester, J. P. (2008). *Public policy: An evolutionary approach*. Boston: Thomson Wadsworth.
- Suharto, E., (2010). *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat (kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Edisi keempat. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Theresia. A, Andini. K.S, Nugraha, P.G.P, & Mardikanto. T, (2015)
Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta

Warta Indonesia (6 November 2014). 2015 Pemkab Bantu 100 Kapal Fiber
Ukuran 1 GT Untuk Nelayan Bintan. Diakses pada:
[http://www.wartaindonesianews.com/2015-pemkab-bantu-100-
kapal-fiber-ukuran-1-gt-untuk-nelayan-bintan/](http://www.wartaindonesianews.com/2015-pemkab-bantu-100-kapal-fiber-ukuran-1-gt-untuk-nelayan-bintan/)

Winarno, B. 2007. *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media
Pressindo.

Zuriat, (2016). Analisis Pendapatan Nelayan Pada Kapal Motor 5-10 Gt Di
Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Perikanan Tropis*. III(1). Hal. 85-94

LAPORAN AKHIR

**PENELITIAN DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN
TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN/PEMBUDIDAYA
DI KABUPATEN BINTAN
T.A 2018**



KERJASAMA ANTARA:
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)
Kabupaten Bintan
Dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
STISIPOL Raja Haji